

CARITAS IN VERITATE

Kasih dalam Kebenaran



Ensiklik
Paus Benediktus XVI
29 Juni 2009

Terbatas untuk Kalangan Sendiri

DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA

Jakarta, Desember 2014

Seri Dokumen Gerejawi No. 89

CARITAS IN VERITATE

KASIH DALAM KEBENARAN

Ensiklik Paus Benediktus XVI
29 Juni 2009

Diterjemahkan dari teks Italia dan Inggris oleh:
B. R. Agung Prihartana, MSF

Editor:
F.X. Adisusanto SJ & Bernadeta Harini Tri Prasasti

DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA
Jakarta, Desember 2014

Seri Dokumen Gerejawi No. 89

CARITAS IN VERITATE

Kasih dalam kebenaran

Ensiklik Paus Benediktus XVI

29 Juni 2009

- Diterjemahkan oleh : B.R. Agung Prihartana, MSF
dari *vatican.va* bahasa Italia dan Inggris (dengan
perbandingan bahasa Perancis dan Latin)
- Editor : F.X. Adisusanto, SJ & Bernadeta Harini Tri Prasasti
- Hak Cipta Terjemahan
dalam bahasa Indonesia : © DOKPEN KWI
- Diterbitkan oleh : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI
Alamat : Jalan Cut Meutia 10, JAKARTA 10340
Telp./Faks.: (021) 31925757
E-mail: dokpen@kawali.org
- Pembayaran Administrasi : 1. Rekening di KWI.
2. Wesel Pos.
3. Bank.

Kebijakan tentang penerbitan terjemahan Seri Dokumen Gerejawi:

1. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut: a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
2. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.*
3. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.*

Cetakan Pertama : Desember 2014

Isi di luar tanggung jawab Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	3
Pengantar	5
Bab Satu Pesan <i>Populorum Progressio</i>	14
Bab Dua Perkembangan Manusia pada Zaman Kita	26
Bab Tiga Persaudaraan, Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat Sipil.....	44
Bab Empat Perkembangan Bangsa-bangsa Hak dan Kewajiban Lingkungan	59
Bab Lima Kerja Sama Keluarga Manusia	73
Bab Enam Perkembangan Bangsa-bangsa dan Teknologi	92
Kesimpulan	102

ENSIKLIK
KASIH DALAM KEBENARAN

BAPA SUCI BENEDIKTUS XVI
KEPADA PARA USKUP
PARA IMAM DAN DIAKON
BIARAWAN DAN BIARAWATI
DAN UMAT KRISTIANI
SERTA SEMUA ORANG YANG BERKEHENDAK BAIK
ATAS PERKEMBANGAN MANUSIA SEUTUHNYA
DALAM KASIH DAN KEBENARAN

PENGANTAR

1. Kasih dalam kebenaran, yang diwartakan Yesus Kristus melalui hidup duniawi-Nya dan secara khusus melalui kematian dan kebangkitan-Nya, adalah kekuatan utama perkembangan sejati setiap orang dan seluruh umat manusia. Kasih *-caritas-* merupakan sebuah kekuatan luar biasa, yang mendorong orang untuk ikut terlibat dengan berani dan penuh semangat dalam bidang keadilan dan perdamaian. Inilah sebuah kekuatan yang berasal dari Allah, Kasih Abadi dan Kebenaran Mutlak. Setiap orang menemukan kebajikannya dengan kesetiaan pada rencana Allah bagi dirinya, menyadarinya secara penuh: dalam rencana ini, ia menemukan kebenarannya, dan melalui kesetiaan pada kebenaran ini, ia menjadi merdeka (bdk. Yoh 8:32). Oleh karena itu, membela kebenaran, mengungkapkannya dengan kerendahan hati dan keyakinan serta memberikan kesaksian padanya dalam kehidupan adalah wujud yang tepat dan tak tergantikan dari kasih. Sesungguhnya, kasih adalah “bersukacita dalam kebenaran” (1Kor 13:6). Semua orang merasakan dorongan dari dalam untuk mengasihinya secara sungguh-sungguh: kasih

dan kebenaran tidak pernah meninggalkan mereka sepenuhnya, karena kasih dan kebenaran itu adalah panggilan yang ditanam Allah di dalam hati dan budi setiap manusia. Yesus Kristus memurnikan dan membebaskan dari kerapuhan manusiawi kita pencarian kasih dan kebenaran, dan Ia menyatakan pada kita sepenuhnya inisiatif kasih dan rencana atas hidup sejati yang telah disiapkan oleh Allah bagi kita. Dalam Kristus, *kasih dalam kebenaran* menjadi Wajah Pribadinya, sebuah panggilan bagi kita untuk mengasihi saudara-saudari kita dalam kebenaran rencana-Nya. Sesungguhnya, Ia adalah Sang Kebenaran itu sendiri (bdk. Yoh 14: 6).

2. Kasih adalah jantung hati ajaran sosial Gereja. Setiap tanggung jawab dan setiap komitmen yang keluar dari ajaran tersebut berasal dari kasih, yang menurut ajaran Yesus, merupakan sintesis keseluruhan hukum (bdk. Mat 22:36-40). Ajaran itu memberi hakikat sejati pada relasi personal dengan Allah dan sesama; inilah prinsip yang bukan hanya sekadar untuk relasi-mikro (dengan teman, anggota keluarga atau dalam kelompok kecil), tetapi juga untuk relasi-makro (bidang sosial, ekonomi, dan politik). Bagi Gereja, yang mengikuti ajaran Injil, kasih adalah segalanya, karena sebagaimana Santo Yohanes mengajarkannya (bdk. 1Yoh 4:8, 16) dan seperti yang saya ingatkan dalam ensiklik pertama saya, "*Allah adalah kasih*" (*Deus Caritas Est*): *Segala sesuatu berasal dari kasih Allah, diciptakan oleh kasih, diarahkan menuju kasih*. Kasih adalah anugerah terbesar dari Allah bagi manusia, kasih adalah janji-Nya dan harapan kita.

Saya menyadari adanya dan terus berlangsungnya upaya-upaya penyalahartian serta pengosongan makna kasih, dengan akibat disalahtafsirkan, dipisahkan dari penghayatan etika dan juga kurang dihargai. Dalam bidang sosial, hukum, budaya, politik, dan ekonomi –dengan kata lain, dalam konteks yang paling terkena bahaya ini– disingkirkan dengan mudah sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk menerjemahkan dan memberi arah pada tanggung jawab moral. Oleh karena itu, perlu menghubungkan kasih dengan kebenaran bukan hanya sekadar dalam urutan, sebagaimana ditunjukkan oleh Santo

Paulus mengenai kebenaran dalam kasih (Ef. 4: 15), melainkan juga sebaliknya, saling melengkapi dengan kasih dalam kebenaran. Kebenaran perlu dicari, ditemukan dan diungkapkan dalam “ekonomi” kasih, tetapi pada gilirannya, kasih perlu dipahami, ditegaskan, dan dilaksanakan dalam terang kebenaran. Dengan demikian, kita tidak hanya melakukan pelayanan kasih yang diterangi kebenaran, tetapi kita juga memberi penghargaan pada kebenaran, dengan memperlihatkan kekuatannya yang meyakinkan dan terbukti secara konkret dalam kehidupan sosial. Hal ini sangat penting pada zaman ini, dalam sebuah konteks sosial dan budaya yang *merelatifkan* kebenaran, dengan sering kurang memerhatikannya dan kurang mau mengakui keberadaannya.

3. Melalui kaitan erat dengan kebenaran, kasih dapat dikenali sebagai suatu ungkapan autentik kemanusiaan dan suatu unsur yang sangat fundamental dalam relasi manusia, juga yang bersifat publik. *Hanya dalam kebenaran, kasih memancarkan cahaya*; hanya dalam kebenaran, kasih dapat dihayati secara autentik. Kebenaran adalah terang yang memberi makna dan nilai pada kasih. Terang itu adalah terang akal budi dan terang iman, yang dengan melaluinya akal budi mencapai kebenaran kodrati dan adikodrati akan kasih: menangkap maknanya sebagai anugerah, penerimaan dan persekutuan. Tanpa kebenaran, kasih merosot ke dalam rasa sentimental. Cinta menjadi ruang kosong, untuk dipenuhi dengan cara yang sewenang-wenang. Kasih akan menghadapi risiko berat dalam sebuah budaya tanpa kebenaran. Kasih itu menjadi korban perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran subjektif yang berubah-ubah, kata “cinta” disalahgunakan dan diselewengkan, sampai pada arti sebaliknya. Kebenaran membebaskan kasih dari batasan emosional yang menghalanginya dari isi relasional dan sosial, dan dari *fideisme* yang menghalanginya dari kehidupan manusia dan alam semesta. Dalam kebenaran, kasih memancarkan dimensi iman personal dan publik akan Allah dalam Kitab Suci, yang sekaligus adalah *Agape* dan *Logos*: Kasih dan Kebenaran, Cinta dan Sabda.

4. Oleh karena dipenuhi dengan kebenaran, kasih dapat dimengerti dalam kelimpahan nilai-nilainya, dapat dibagikan dan dikomunikasikan. Kenyataannya, *Kebenaran* adalah *Logos* yang menciptakan *diá-logos*, dan karena itu juga komunikasi dan persekutuan. Kebenaran, yang memampukan laki-laki dan perempuan melepaskan diri dari pikiran-pikiran dan kesan-kesan subjektif mereka, membiarkan mereka melampaui batas-batas budaya dan sejarah dan bersatu dalam penilaian atas nilai dan hakikat sesuatu. Kebenaran membuka dan menyatukan pikiran kita dalam *Logos* cinta kasih: inilah pewartaan dan kesaksian Kristiani akan kasih. Dalam konteks sosial dan budaya saat ini, di mana ada kecenderungan meluas untuk merelatifkan kebenaran, menghayati kasih dalam kebenaran membantu orang untuk mengerti bahwa setia pada nilai-nilai Kristiani tidak hanya sekadar berguna, tetapi juga menjadi unsur mendasar untuk membangun masyarakat yang baik dan demi perkembangan sejati manusia seutuhnya. Kasih Kristiani tanpa kebenaran akan dapat lebih mudah digantikan dengan suatu perasaan-perasaan baik, berguna bagi hubungan sosial, tetapi kecil signifikansinya. Dengan kata lain, tidak akan ada lagi tempat nyata bagi Tuhan di dunia. Tanpa kebenaran, kasih dibatasi pada bidang yang sempit tanpa relasi. Kasih disingkirkan dari rencana dan proses memajukan perkembangan manusiawi dalam lingkup universal, dalam dialog antara pengetahuan dan praksis.

5. Kasih adalah cinta yang diterima dan dianugerahkan. Inilah “rahmat” (*cháris*). Sumbernya adalah mata air kasih Bapa kepada Putra, dalam Roh Kudus. Cinta yang berasal dari Putra turun atas kita. Cinta adalah pencipta, yang melaluinya kita ada; cinta adalah penebus, yang melaluinya kita diciptakan kembali. Cinta diwahyukan dan dilaksanakan oleh Kristus (bdk. Yoh 13:1) dan “dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus” (Rom 5:5). Karena kasih Allah, laki-laki dan perempuan menjadi subjek kasih, mereka dipanggil menjadi saluran rahmat, untuk mengalirkan kasih Allah dan merajut jaringan kasih.

Dinamika kasih yang diterima dan dianugerahkan ini melahirkan ajaran sosial Gereja. Inilah *caritas in veritate in re sociali* - “kasih dalam kebenaran dalam masalah sosial”: pewartaan kebenaran akan kasih Kristus dalam masyarakat. Ajaran ini adalah sebuah pelayanan kasih, tetapi dalam kebenaran. Kebenaran menjaga dan mengungkapkan kekuatan kasih yang membebaskan dalam setiap peristiwa yang selalu baru dalam sejarah. Sekaligus inilah kebenaran iman dan akal budi, baik dalam perbedaannya sekaligus dalam sinergi dua bidang kognitif tersebut. Pengembangan, kesejahteraan sosial, suatu solusi memadai bagi persoalan berat sosioekonomi yang menyengsarakan manusia, semuanya membutuhkan kebenaran ini. Yang lebih diperlukan lagi adalah kebenaran tersebut dicintai dan diperlihatkan. Tanpa kebenaran, tanpa kepercayaan dan cinta terhadap apa yang benar, tidak ada kesadaran dan tanggung jawab sosial, dan tindakan-tindakan sosial berakhir sebagai tindakan melayani kepentingan pribadi dan diarahkan pada kekuasaan, yang menghasilkan perpecahan dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat global pada masa-masa sulit seperti sekarang ini.

6. *Kasih dalam kebenaran* adalah prinsip yang menggerakkan ajaran sosial Gereja, suatu prinsip berbentuk praktis dalam kriteria yang menentukan tindakan moral. Saya ingin mengingatkan kembali dua hal ini yang secara khusus berkaitan dengan komitmen pengembangan dalam masyarakat yang tengah mengalami globalisasi: *keadilan dan kesejahteraan umum*.

Pertama-tama keadilan. *Ubi societas, ibi ius*: setiap masyarakat membuat sistemnya sendiri mengenai keadilan. *Kasih mele-bihi keadilan*, karena mencintai adalah memberi, mempersembahkan apa yang “kumiliki” untuk orang lain, tetapi itu tidak pernah tanpa keadilan, yang mendorong orang untuk memberikan kepada yang lain apa yang “dimilikinya”, yaitu yang menjadi haknya karena keberadaannya atau tindakannya. Saya tidak dapat “memberi” apa yang “kumiliki” kepada orang lain, tanpa pertama-tama memberinya sesuatu yang sesuai dengan keadilan. Jika kita mencintai orang lain

dengan kasih, maka kita pertama-tama akan bersikap adil terhadapnya. Keadilan bukan hanya tidak asing terhadap kasih, bukan hanya suatu jalan alternatif atau sejajar dengan kasih: melainkan keadilan tak terpisahkan dari kasih¹, dan hakiki bagi kasih. Keadilan adalah jalan utama kasih, sebagaimana dikatakan oleh Paulus VI, “ukuran minimum” darinya², bagian integral cinta “dengan perbuatan dan dalam kebenaran” (1Yoh 3:18), seperti Santo Yohanes menyatakannya pada kita. Di satu pihak, kasih menuntut keadilan: pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak sah pribadi dan masyarakat. Kasih berupaya membangun *kota duniawi* sesuai dengan hukum dan keadilan. Di lain pihak, kasih melampaui keadilan dan menyempurnakannya dalam logika memberi dan mengampuni³. *Kota duniawi* tidak hanya dimajukan dengan hubungan antara hak dan kewajiban, tetapi lebih dari itu dan lebih mendasar adalah dengan hubungan antara kemurahan hati, belas kasih dan persekutuan. Kasih selalu mewujudkan cinta Allah dalam relasi manusia juga, memberikan nilai teologis dan keselamatan pada seluruh komitmen untuk keadilan di dunia.

7. Pertimbangan lain yang penting adalah kebaikan umum. Mencintai seseorang berarti menginginkan kebaikan orang tersebut dan mengambil langkah-langkah efektif untuk hal itu. Selain kebaikan pribadi, ada kebaikan yang berkaitan dengan hidup bermasyarakat: kesejahteraan umum. Itulah kebaikan “kita semua”, yang dibangun oleh orang perseorangan, keluarga-keluarga dan kelompok-kelompok yang bersama-sama membangun masyarakat⁴. Itulah kebaikan yang dicari bukan demi diri sendiri, melainkan untuk orang-orang yang

¹ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio* (26 Maret 1967), 22; AAS 59 (1967), 268; Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern *Gaudium et Spes*, 69.

² *Sambutan pada Hari Pembangunan* (23 Agustus 1968): AAS 60 (1968), 626-627

³ Bdk. Yohanes Paulus II, *Pesan Pada Hari Perdamaian Sedunia 2002*: AAS 94 (2002), 132-140.

⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern *Gaudium et Spes*, 26.

merupakan bagian dari komunitas sosial dan hanya mereka yang dapat sungguh-sungguh dan lebih efektif mengejar kebaikan mereka sendiri. Menginginkan *kesejahteraan umum* dan berjuang untuk mencapainya adalah *syarat keadilan dan kasih*. Melibatkan diri dalam kesejahteraan umum, di satu pihak adalah memberi perhatian terhadap, dan di lain pihak memberi bantuan kepada, hal-hal kompleks yang membentuk tatanan hidup bermasyarakat secara yuridis, sipil, politik, budaya, dengan membentuknya sebagai *pólis*, atau kota. Semakin efektif kita mencintai sesama, semakin kita melakukan banyak upaya untuk kesejahteraan umum, yang berkaitan dengan kebutuhan konkretnya. Setiap orang Kristiani dipanggil untuk melakukan kasih seperti ini, dengan cara yang sesuai dengan panggilannya dan tingkat pengaruhnya dalam *pólis*. Inilah jalur institusional –yang juga kita sebut cara politis– dari kasih, yang tak kalah baik dan efektifnya dibandingkan kasih yang secara langsung dijumpai oleh sesama, di luar perantaraan kelembagaan *pólis*. Bila digerakkan oleh kasih, komitmen untuk kesejahteraan umum lebih tinggi nilainya daripada sekadar posisi sekuler dan politik semata. Seperti halnya komitmen pada keadilan, komitmen itu terletak dalam kesaksian akan kasih ilahi, yang menyiapkan jalan untuk keabadian melalui kegiatan duniawi. Tindakan duniawi manusia, ketika diilhami dan ditopang oleh kasih, memberi sumbangan pada pembangunan *kota Allah* yang universal, yang merupakan tujuan sejarah keluarga umat manusia. Dalam masyarakat yang semakin mengglobal, kesejahteraan umum dan usaha untuk mencapainya haruslah menerima dimensi keluarga manusia secara menyeluruh, yaitu komunitas masyarakat dan bangsa⁵, sedemikian rupa untuk membentuk *kota duniawi* dalam kesatuan dan kedamaian, yang memberinya dalam tingkat tertentu pengharapan dan bayangan *kota Allah* yang utuh.

⁵ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris* (11 April 1963): AAS 55 (1963), 268-270.

8. Pada tahun 1967, ketika Ensiklik *Populorum Progressio* diterbitkan, Yang Mulia pendahulu saya Paus Paulus VI menerangkan tema besar mengenai pembangunan masyarakat dengan kemuliaan kebenaran dan cahaya sejati kasih Kristus. Beliau mengajarkan bahwa hidup dalam Kristus adalah faktor pertama dan utama dari perkembangan⁶ dan beliau memercayakan kepada kita tugas menempuh perjalanan perkembangan dengan seluruh hati dan budi kita⁷, yaitu dengan semangat kasih dan kebijaksanaan akan kebenaran. Inilah kebenaran utama akan kasih Allah, rahmat yang dilimpahkan pada kita, yang membuka hidup kita pada anugerah dan memungkinkannya berharap pada “perkembangan manusia seutuhnya dan seluruh umat manusia⁸, berharap akan kemajuan “dari kondisi yang kurang manusiawi menjadi lebih manusiawi”⁹, yang diperoleh dengan mengatasi kesulitan-kesulitan yang secara tak terhindarkan dijumpai di sepanjang perjalanan.

Setelah lebih dari empat puluh tahun diterbitkannya ensiklik tersebut, saya ingin menyampaikan penghargaan dan memberikan penghormatan pada kenangan akan Bapa Suci Paulus VI yang agung, dengan mengingat kembali ajarannya mengenai *perkembangan manusia seutuhnya* dan menempatkan diri saya pada jalan yang diuraikannya, untuk diterapkan pada zaman sekarang. Penerapan yang berkesinambungan pada situasi masa sekarang ini dimulai dengan ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, yang dengan ensiklik itu Hamba Allah Yohanes Paulus II ingin mengenangkan peringatan yang kedua puluh tahun terbitnya *Populorum Progressio*. Selama masa itu, hanya *Rerum Novarum* yang pernah diperingati dengan cara seperti ini. Sekarang, setelah lebih dari dua puluh tahun, saya menyatakan keyakinan saya bahwa *Populorum Progressio* patut dipertimbangkan sebagai “*Rerum Novarum* pada zaman ini,” yang menerangi perjalanan kemanusiaan menuju kesatuan.

⁶ Bdk. no 16: *loc.cit.*, 265

⁷ Bdk. *ibid.*, 82: *loc.cit.*, 297.

⁸ *Ibid.* 42: *loc.cit.* 278.

⁹ *Ibid.*, 20: *loc.cit.*, 267.

9. Kasih dalam kebenaran –*caritas in veritate*– adalah tantangan besar bagi Gereja dalam dunia yang mengglobal secara progresif dan pervasif. Bahaya bagi zaman kita adalah kenyataan saling ketergantungan antara masyarakat dan bangsa tidak sesuai dengan interaksi etis suara hati dan pikiran, yang membangkitkan perkembangan yang sungguh-sungguh manusiawi. Hanya dalam *kasih, yang diterangi oleh terang akal budi dan iman*, dimungkinkan mengejar tujuan perkembangan yang lebih manusiawi dan memanusiakan. Pemerataan kesejahteraan dan sumber daya, yang menghasilkan perkembangan autentik tidak dijamin oleh hanya kemajuan teknis dan kaitannya dengan keuntungan, tetapi dijamin oleh kekuatan kasih yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan (bdk. Rom 12:21), dan membuka jalan menuju hubungan timbal balik antara suara hati dengan kebebasan.

Gereja tidak memiliki pemecahan teknis yang bisa ditawarkan¹⁰ dan tidak bermaksud “terlibat dengan cara apa pun dalam politik negara mana pun”¹¹. Namun, Gereja mempunyai misi kebenaran untuk diselesaikan, di setiap waktu dan situasi, menuju suatu masyarakat yang memadai bagi manusia, martabatnya, serta panggilannya. Tanpa kebenaran, akan mudah jatuh ke dalam pandangan empiris dan skeptis akan hidup, tidak mampu bangkit pada tingkat praksis karena kurangnya minat untuk menangkap nilai-nilai – apalagi makna– yang digunakan untuk menilai dan mengaturnya. Kesetiaan pada manusia menuntut *kesetiaan pada kebenaran*, yang dengan sendirinya menjadi *jaminan kebebasan* (bdk. Yoh 8 32) dan menjadi *kemungkinan perkembangan manusia seutuhnya*. Oleh karena itu, Gereja mencari kebenaran, tanpa kenal lelah mewartakannya dan mengenalinya di mana pun kebenaran itu diwujudkan. Misi

¹⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern *Gaudium et Spes*,36; Paulus VI, Ensiklik *Octogesima Adveniens* (14 Mei 1971), 4: AAS 63 (1971), 403-404; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus* (1 Mei 1991), 43: AAS 83 (1991), 847.

¹¹ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 13: *loc.cit.*, 263-264.

kebenaran ini adalah sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan Gereja. Ajaran sosial Gereja adalah suatu dimensi khusus dari pewartaan ini: suatu pengabdian pada kebenaran yang memerdekakan. Terbuka pada kebenaran, yang menjadi asal mula cabang pengetahuan apa pun, ajaran sosial Gereja menerimanya, meletakkannya ke dalam satu kesatuan bagian-bagian yang sering ditemukan, dan memadukannya dalam perubahan terus-menerus pola hidup masyarakat dan bangsa¹².

BAB SATU

PESAN *POPULORUM PROGRESSIO*

10. Membaca kembali *Populorum Progressio*, setelah lebih dari empat puluh tahun diterbitkan, mengajak kita untuk tetap setia pada pesannya akan kasih dan kebenaran, dilihat dalam keseluruhan konteks magisterium khusus Paulus VI, dan secara lebih umum dalam tradisi ajaran sosial Gereja. Selanjutnya perlu adanya sebuah evaluasi atas aneka ragam istilah, yang sekarang ini digunakan dalam persoalan pembangunan, dibandingkan dengan empat puluh tahun lalu. Maka, sudut pandang yang benar adalah bahwa dari *tradisi iman para rasul*¹³, warisan, baik yang lama maupun yang baru, di luar tradisi itu *Populorum Progressio* akan menjadi sebuah dokumen tanpa akar – dan persoalan yang berkaitan dengan perkembangan akan direduksi menjadi semata-mata data sosiologis.
11. Publikasi *Populorum Progressio* terjadi segera sesudah berakhirnya Konsili Ekumenis Vatikan II, dan dalam paragraf pembukaannya secara jelas diperlihatkan keterkaitannya yang

¹² Bdk. Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, 76.

¹³ Bdk. Benediktus XVI, *Sambutan pada Pembukaan Konferensi Umum Kelima Para Uskup Amerika Latin dan Karibia*, (Aparecida, 13 Mei 2007)

erat dengan Konsili¹⁴. Dua puluh tahun kemudian, dalam *Sollicitudo Rei Socialis*, Yohanes Paulus II, pada gilirannya, menggarisbawahi relasi yang sangat baik antara ensiklik yang terdahulu dengan Konsili, dan khususnya dengan Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*¹⁵. Saya juga ingin mengingatkan di sini pentingnya Konsili Vatikan II bagi ensiklik Paulus VI dan bagi keseluruhan magisterium sosial berikutnya dari para Paus. Konsili mendalami apa yang selalu menjadi milik kebenaran iman, yaitu bahwa Gereja, dalam pengabdian kepada Allah, melayani dunia dalam kasih dan kebenaran. Berangkat dari pandangan inilah Paulus VI mulai menyampaikan kepada kita dua kebenaran besar. Pertama, *seluruh Gereja, dalam keberadaan dan tindakannya –ketika iaewartakan, merayakan dan melaksanakan karya kasih–terlibat dalam memajukan perkembangan manusia seutuhnya*. Gereja mempunyai peran publik selain kegiatan-kegiatan amal kasih dan pendidikan: seluruh kekuatan digunakannya untuk kemajuan umat manusia dan persaudaraan universal yang diwujudkan ketika Gereja mampu melaksanakannya dalam iklim kebebasan. Dalam kasus yang tidak sedikit, kebebasan dihambat oleh larangan-larangan dan penganiayaan-penganiayaan, atau dibatasi ketika kehadiran publik Gereja direduksi hanya semata-mata pada kegiatan-kegiatan amal kasih. Kebenaran kedua adalah bahwa *perkembangan manusiawi yang autentik menyangkut keseluruhan pribadi dalam setiap dimensinya*¹⁶. Tanpa perspektif kehidupan kekal, kemajuan manusia di dunia ini kehilangan nafas. Terkurung dalam sejarah, kemajuan tersebut berisiko direduksi menjadi sekadar akumulasi kekayaan; demikianlah kemanusiaan kehilangan keberanian untuk mengabdikan kebaikan yang lebih tinggi, prakarsa besar dan tanpa pamrih yang muncul dari kasih universal. Manusia tidak hanya berkembang dengan kekuatannya sendiri, juga perkembangan tidak sekadar diberikan kepadanya. Sepanjang sejarah seringkali dianggap

¹⁴ Bdk. no. 3-5: *loc.cit.*, 258-260

¹⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* (30 Desember 1987), 6-7: AAS 80 (1987), 517-519.

¹⁶ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 14: *loc.cit.* 264.

bahwa pendirian lembaga-lembaga cukup untuk menjamin pemenuhan hak-hak manusia untuk berkembang. Sayangnya, terlalu berlebihan kepercayaan yang diberikan kepada lembaga-lembaga tersebut, seolah-olah mereka mampu mencapai tujuan yang diinginkan secara otomatis. Kenyataannya, lembaga-lembaga itu sendiri tidak cukup, karena perkembangan manusia seutuhnya pertama-tama adalah panggilan, dan karena itu melibatkan pengambilan tanggung jawab bebas dalam solidaritas dari semua pihak. Lebih dari itu, perkembangan demikian menuntut suatu visi transenden pribadi, perkembangan itu membutuhkan Tuhan: tanpa Dia, perkembangan entah ditolak entah dipercayakan secara eksklusif pada manusia, yang terperangkap ke dalam jerat pemikiran bahwa ia dapat menyelamatkan diri sendiri dan akhirnya mendorong suatu perkembangan yang kurang manusiawi. Hanya melalui sebuah perjumpaan dengan Allah, membuat kita tidak “melihat yang lain hanya sekadar sebagai ciptaan lain”¹⁷, tetapi mengakuinya sebagai gambaran ilahi, sehingga sungguh menemukan yang lain dan mematangkan kasih yang “menjadi kepedulian dan perhatian bagi orang lain”¹⁸.

12. Hubungan antara *Populorum Progressio* dan Konsili Vatikan II tidak menunjukkan keterputusan antara magisterium sosial Paulus VI dengan magisterium dari para Paus sebelumnya, karena Konsili merupakan penyelidikan yang lebih mendalam mengenai magisterium ini di dalam keberlangsungan kehidupan Gereja¹⁹. Dalam pengertian ini, bagian ringkasan tertentu dari doktrin sosial Gereja, yang mempergunakan ajaran sosial Paus yang tak ada hubungan dengannya tidak memberi kejelasan. Tidak ada dua tipologi doktrin sosial, satu doktrin pra-Konsili dan yang lain pasca-Konsili, yang berbeda satu dengan yang lain: sebaliknya, merupakan *satu ajaran*,

¹⁷ Bdk. Benediktus XVI, Ensiklik *Deus Caritas Est* (25 Desember), 18: AAS 98 (2006), 232.

¹⁸ *Ibid.* 6: *l.c.*, 222

¹⁹ Benediktus XVI, *Sambutan Natal pada Kuria Roma*, 22 Desember 2005

yang konsisten dan selalu baru pada zamannya²⁰. Boleh saja memerhatikan karakteristik khusus ensiklik yang satu atau lainnya, ajaran Paus yang satu atau lainnya, tetapi tidak boleh mengesampingkan koherensi *tubuh* doktrin secara menyeluruh²¹. Koherensi bukan berarti sistem tertutup: sebaliknya, itu berarti kesetiaan dinamis pada terang yang diterima. Ajaran sosial Gereja menerangi persoalan-persoalan baru yang selalu muncul dengan terang yang tidak berubah²². Ini menjaga sifat permanen dan historis “warisan” doktrinal²³ yang dengan karakteristik khususnya merupakan bagian dari Tradisi Gereja yang senantiasa hidup²⁴. Ajaran sosial dibangun atas dasar warisan dari para Rasul sampai Bapa-bapa Gereja, dan kemudian diterima dan diperdalam oleh para guru Kristiani ternama. Ajaran ini secara tegas menunjuk pada Manusia Baru pada “Adam terakhir [yang] menjadi roh yang menghidupkan” (1Kor.15:45), prinsip kasih yang “tidak berkesudahan” (1Kor. 13:8). Ini diberi kesaksian oleh para kudus dan oleh mereka yang memberikan hidupnya bagi Kristus, Penyelamat kita di bidang keadilan dan perdamaian. Inilah sebuah ungkapan tugas kenabian dari Takhta Suci untuk memberikan bimbingan apostolik kepada Gereja Kristus dan mempertimbangkan tuntutan baru evangelisasi. Oleh karena itu, *Populorum Progressio*, yang ditempatkan dalam arus besar Tradisi, masih dapat mengatakan sesuatu pada kita saat ini.

- 13.** Selain keterkaitan penting dengan keseluruhan ajaran sosial Gereja, *Populorum Progressio* mempunyai hubungan yang sangat erat dengan seluruh magisterium Paus Paulus VI, khususnya ajaran sosialnya. Ajaran sosialnya tentu saja adalah ajaran sosial yang sangat penting: beliau menggarisbawahi arti pentingnya Injil dalam membangun suatu masyarakat menurut kebebasan dan keadilan, dalam perspektif ideal dan historis

²⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 3; *loc.cit.*, 515

²¹ Bdk. *ibid.*, 1; *loc.cit.*, 513-514

²² Bdk. *Ibid.*, 3; *loc.cit.*, 515

²³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens* (14 September 1981), 3; *AAS* 73 (1981), hal. 583-584.

²⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 3; *loc.cit.*, 794-796

dari suatu peradaban yang dijiwai oleh kasih. Paulus VI sangat memahami bahwa masalah sosial telah mendunia²⁵ dan beliau mengerti keterkaitan antara dorongan menuju penyatuan umat manusia dan cita-cita Kristiani akan kesatuan keluarga bangsa-bangsa dalam solidaritas serta persaudaraan. *Dalam konsep perkembangan, yang dipahami secara manusiawi dan Kristiani, ia mengenali inti pesan sosial Kristiani, dan menganjurkan kasih Kristiani sebagai kekuatan utama dalam pelayanan pembangunan. Digerakkan oleh keinginan menjadikan kasih Kristus tampak sepenuhnya pada manusia zaman ini, Paulus VI menyampaikan persoalan-persoalan etika yang penting dengan tegas, tanpa menyerah pada kelemahan-kelemahan budaya pada zamannya.*

14. Dalam Surat Apostolik *Octogesima Adveniens* tahun 1971, Paulus VI merefleksikan arti politik dan *bahaya yang dibangun oleh pandangan utopia dan ideologis* yang membahayakan dimensi etis dan manusiawi. Ini adalah hal-hal yang berhubungan erat dengan perkembangan. Sayangnya, ideologi-ideologi negatif berkembang terus-menerus. Paulus VI telah memperingatkan supaya berhati-hati terhadap ideologi teknokratis yang begitu lazim sekarang ini²⁶, dengan menyadari sepenuhnya bahaya besar memercayakan seluruh proses perkembangan pada teknologi saja, sebab dengan cara itu perkembangan akan kehilangan arah. Teknologi, dilihat dalam dirinya sendiri, bersifat ambivalen. Jika di satu sisi, saat ini kita cenderung memercayakan seluruh proses perkembangan pada teknologi, di sisi lain, kita sedang melihat meningkatnya ideologi-ideologi yang menyangkal secara total nilai perkembangan itu sendiri, dengan melihatnya sebagai anti-manusiawi secara radikal dan semata-mata suatu sumber degradasi. Ini mengarah pada suatu penolakan, tidak hanya terhadap cara yang menyimpang dan tidak adil, ke mana kemajuan sering diarahkan, tetapi juga terhadap penemuan-penemuan ilmiah sendiri, yang jika digunakan dengan baik,

²⁵ Bdk. Ensiklik *Populorum Progressio*, 3; *loc.cit.*, 258

²⁶ Bdk. *Ibid.*, 34; *loc.cit.*, 274

dapat berfungsi sebagai peluang perkembangan bagi semua. Gagasan mengenai dunia tanpa perkembangan menunjukkan kurangnya kepercayaan pada manusia dan pada Allah. Oleh karena itu, merupakan suatu kesalahan serius merendahkan kemampuan manusia untuk melakukan kontrol atas penyimpangan perkembangan atau mengabaikan kenyataan bahwa manusia sesuai keadaannya menuju ke arah “menjadi lebih”. Mengidealkan kemajuan teknis, atau merenungkan utopia akan kembalinya keadaan alamiah asal mula kemanusiaan, adalah dua cara yang berlawanan dalam memisahkan kemajuan dari evaluasi moralnya dan karenanya dari tanggung jawab kita.

15. Dua dokumen lainnya dari Paulus VI yang tidak berhubungan langsung dengan ajaran sosial –Ensiklik *Humanae Vitae* (25 Juli 1968) dan Seruan Apostolik *Evangelii Nuntiandi* (8 Desember 1975)– adalah dokumen yang sangat penting karena menggambarkan makna manusiawi sepenuhnya mengenai perkembangan yang dimaksudkan oleh Gereja. Oleh karena itu, sangat membantu mempertimbangkan tulisan-tulisan ini, juga dalam kaitannya dengan *Populorum Progressio*.

Ensiklik *Humanae Vitae* menekankan makna seksualitas, baik unitif maupun prokreatif, dengan demikian menempatkan pada fondasi masyarakat pasangan suami-istri, laki-laki dan perempuan, yang saling menerima satu sama lain, dalam perbedaan dan saling melengkapi: karena itu, pasangan yang terbuka pada kehidupan²⁷. Hal ini bukanlah masalah moralitas individu semata: *Humanae Vitae* memperlihatkan hubungan yang kuat antara etika hidup dan etika sosial, dengan memperkenalkan satu tema baru dari ajaran magisterium yang secara bertahap telah disampaikan dalam serangkaian dokumen, yang terbaru adalah Ensiklik *Evangelium Vitae* dari Yohanes Paulus II²⁸. Gereja dengan sekuat tenaga tetap menjaga hubungan antara etika hidup dan etika sosial ini,

²⁷ Bdk. no. 8-9; AAS 60 (1968), 485-487; Benediktus XVI: *Sambutan kepada para Peserta Kongres Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Pontifikal Lateran pada Peringatan ke-40 Ensiklik Paulus VI Humanae vitae*, 10 Mei 2008.

²⁸ Bdk. Ensiklik *Evangelium Vitae* (25 Maret 1995), 93: AAS 87 (1995), 507-508

sepenuhnya sadar bahwa “masyarakat kehilangan fondasinya yang andal, bila di satu pihak, menegaskan nilai-nilai seperti martabat pribadi, keadilan dan perdamaian, akan tetapi di lain pihak, bertindak sebaliknya secara radikal dengan membiarkan atau menoleransi berbagai macam cara yang melecehkan dan melanggar hidup manusiawi, terutama yang lemah dan terpinggirkan”²⁹.

Seruan Apostolik *Evangelii Nuntiandi*, untuk sebagian, mempunyai hubungan yang sangat erat dengan perkembangan, sebagaimana ditulis oleh Paulus VI, “evangelisasi tidak akan sempurna jika tidak memerhatikan pengaruh timbal balik yang terus-menerus antara Injil dengan kehidupan konkret manusia, baik personal maupun sosial”³⁰. “Antara evangelisasi dengan kemajuan manusia – perkembangan dan pembebasan– sesungguhnya ada hubungan yang mendalam”³¹: berdasarkan kesadaran ini, Paulus VI menyampaikan dengan jelas hubungan antara pewartaan Kristus dengan kemajuan pribadi dalam masyarakat. *Kesaksian kasih Kristus, melalui karya keadilan, perdamaian dan perkembangan, adalah bagian evangelisasi*, karena Yesus Kristus, yang mengasihi kita, memerhatikan seluruh pribadi manusia. Ajaran penting ini mendasari aspek misioner³² ajaran sosial Gereja, yang adalah unsur hakiki evangelisasi³³. Ajaran sosial Gereja mewartakan dan memberikan kesaksian iman. Ini adalah alat dan kerangka yang sangat diperlukan dalam pembinaan iman.

16. Dalam *Populorum Progressio* Paulus VI mengajarkan bahwa kemajuan, dalam asal dan hakikatnya, pertama-tama dan paling utama adalah *panggilan*: “dalam rencana Allah, setiap manusia dipanggil untuk berkembang dan mengusahakan pemenuhan dirinya, karena setiap kehidupan adalah

²⁹ *Ibid.*, 101: *loc.cit.*, 516-518

³⁰ No 29; AAS 68 (1976), 25

³¹ *Ibid.* 31; *loc.cit.*, 26

³² Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 41; *loc.cit.*, 570-572

³³ Bdk. *ibid.*, Id., Ensiklik *Centesimus Annus*, 5, 54; *loc.cit.*, 799, 859-860

panggilan”³⁴. Inilah yang melegitimasi keterlibatan Gereja dalam seluruh persoalan perkembangan. Jika perkembangan hanya dikaitkan dengan aspek teknis hidup manusia saja, dan tidak dengan makna peziarahan manusia sepanjang sejarah bersama-sama dengan sesamanya manusia, juga tidak dengan mengidentifikasi tujuan perjalanan tersebut, maka Gereja tidak berhak membicarakannya. Paulus VI, seperti Leo XIII dalam *Rerum Novarum*³⁵ menyadari bahwa ia mengemban tugas yang sesuai dengan jabatannya yakni memancarkan cahaya Injil atas persoalan-persoalan sosial pada zamannya³⁶.

Menganggap *perkembangan sebagai panggilan* sama dengan mengakui, di satu pihak, bahwa hal itu berasal dari panggilan transenden dan di lain pihak mengakui ketidakmampuan atas dirinya sendiri untuk memenuhi maknanya yang tertinggi. Bukan tanpa alasan kata “panggilan” juga ditemukan di bagian lain dari Ensiklik, di mana kita baca: “Tidak ada humanisme sejati, kecuali yang terbuka kepada Yang Absolut, dan yang menyadari sebuah panggilan, yang memberikan makna sejati hidup manusiawi”³⁷. Visi perkembangan ini adalah inti *Populorum Progressio* dan mendorong seluruh refleksi Paulus VI tentang kebebasan, kebenaran, dan kasih dalam perkembangan. Juga, visi ini menjadi alasan utama mengapa Ensiklik tersebut masih aktual di zaman kita ini.

17. Panggilan adalah undangan yang menuntut jawaban bebas dan bertanggung jawab. *Perkembangan manusia seutuhnya mensyaratkan kebebasan yang bertanggung jawab* dari setiap individu dan masyarakat: tidak ada struktur yang dapat menjamin perkembangan ini lebih dari dan di atas tanggung jawab manusia. “Bentuk mesianisme yang memberi janji-janji

³⁴ No. 15; *loc.cit.*, 265

³⁵ Bdk. *ibid.*, 2; *loc.cit.*, 258; Leo XIII, Ensiklik *Rerum Novarum* (15 Mei 1891): *Leonis XIII P.M. Acta*, XI, Romae 1892, 97-144; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 8; *loc.cit.*, 519-520; Id., Ensiklik *Centesimus Annus*, 5; *loc.cit.*, 799

³⁶ Bdk. Ensiklik *Populorum Progressio*, 2, 13; *loc.cit.*, 258, 263-264

³⁷ *Ibid.*, 42; *loc.cit.*, 278

tetapi menciptakan ilusi”³⁸ selalu mendasari penolakan terhadap dimensi transenden perkembangan, dalam keyakinan bahwa itu sepenuhnya terletak di tangan mereka sendiri. Keyakinan palsu ini menjadi lemah, karena hal itu merendahkan manusia menjadi budak, sekadar menjadi alat perkembangan, sementara kerendahan hati mereka yang menerima panggilan diubah menjadi otonomi sejati, karena membebaskan mereka. Paulus VI tidak meragukan bahwa rintangan-rintangan dan bentuk-bentuk pengkondisian menghambat perkembangan, tetapi ia juga yakin bahwa “setiap orang, entah dampak apa pun yang memengaruhinya, tetap menjadi pelaku utama kesuksesan atau kegagalannya sendiri”³⁹. Kebebasan ini menyangkut jenis perkembangan yang sedang kita bahas, tetapi juga memengaruhi situasi keterbelakangan, yang tidak disebabkan karena kebetulan atau keharusan sejarah, tetapi disebabkan oleh tanggung jawab manusia. Itulah sebabnya “bangsa yang kelaparan memohon dengan sangat kepada bangsa yang diberkati dengan kelimpahan”⁴⁰. Ini juga panggilan, panggilan yang disampaikan oleh manusia bebas terhadap manusia bebas lainnya untuk menerima tanggung jawab bersama. Paulus VI memahami betapa pentingnya struktur dan lembaga ekonomi, tetapi ia juga memahami dengan sangat baik hakikatnya sebagai sarana kebebasan manusia. Hanya jika bebas, perkembangan dapat menjadi manusiawi sepenuhnya; hanya dalam iklim kebebasan bertanggung jawab, perkembangan itu bertumbuh dengan cara yang memadai.

18. Selain membutuhkan kebebasan, *perkembangan manusia seutuhnya sebagai panggilan juga membutuhkan rasa hormat atas kebenaran*. Panggilan untuk maju mendorong kita untuk “melakukan lebih banyak, mengetahui lebih banyak, dan mempunyai lebih banyak supaya menjadi lebih”⁴¹. Tetapi

³⁸ *Ibid.*, 11; *loc.cit.*, 262; bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 25; *loc.cit.*, 822-824

³⁹ Ensiklik *Populorum Progressio*, 15; *loc.cit.*, 265

⁴⁰ *Ibid.*, 3; *loc.cit.*, 258

⁴¹ *Ibid.*, 6; *loc.cit.*, 260

masalahnya adalah: apa yang dimaksudkan dengan “menjadi lebih”? Paulus VI menjawab pertanyaan ini dengan menunjukkan kualitas mendasar “perkembangan sejati”: perkembangan itu harus “integral, yaitu memajukan kebaikan setiap manusia dan manusia seutuhnya”⁴². Di tengah persaingan beberapa visi tentang manusia yang dikemukakan dalam masyarakat sekarang ini, bahkan lebih daripada pada masa Paulus VI, visi Kristiani memiliki karakteristik khusus mengenai penegasan dan pembenaran nilai-nilai mutlak pribadi manusia dan makna perkembangannya. Panggilan Kristiani terhadap perkembangan membantu mendorong kemajuan semua manusia dan manusia seutuhnya. Paulus VI menuliskan: “Yang bagi kita penting adalah manusia, setiap manusia perorangan dan setiap kelompok manusia, akhirnya mencakup seluruh umat manusia”⁴³. Dalam usaha mendorong perkembangan, iman Kristiani tidak mengandalkan hak-hak istimewa atau posisi kekuasaan, tidak juga bahkan pada keunggulan orang-orang Kristiani⁴⁴ (yang ada dan terus ada di samping keterbatasan kodrati mereka), tetapi hanya pada Kristus, yang kepada-Nya setiap panggilan sejati menuju perkembangan manusia seutuhnya harus diarahkan. *Injil adalah unsur dasar perkembangan* karena di dalam Injil, Kristus, “dalam setiap perwahyuan misteri Bapa serta cinta kasih-Nya sendiri, menampilkan sepenuhnya kemanusiaan bagi manusia”⁴⁵. Diajar oleh Tuhan, Gereja mempelajari tanda-tanda zaman dan menafsirkannya, dengan memberikan dunia “apa yang dimilikinya sebagai sumbangannya yang khas: visi global mengenai manusia dan umat manusia”⁴⁶. Tepatnya karena Tuhan memberikan jawaban “ya” pada manusia⁴⁷,

⁴² *Ibid.*, 14; *loc.cit.*, 264

⁴³ *Ibid.*, bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 53-62; *loc.cit.*, 859-867; Id., Ensiklik *Redemptoris Hominis* (4 Maret 1979), 13-14; AAS 71 (1979), 282-286

⁴⁴ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 12; *loc.cit.*, 262-263

⁴⁵ Konsili Ekumene Vatikan II, Konstitusi Pastoral Gereja di dunia *Modern Gaudium et Spes*, 22

⁴⁶ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 13; *loc.cit.*, 263-264

⁴⁷ Bdk. Benediktus XVI, *Sambutan kepada Para Peserta Kongres Nasional IV Tentang Gereja di Italia*, Verona, 19 Oktober 2006

manusia tidak dapat tidak kecuali membuka diri pada panggilan ilahi untuk mencapai perkembangannya sendiri. Kebenaran perkembangan terletak pada kesempurnaannya: jika perkembangan itu tidak melibatkan manusia seutuhnya dan setiap manusia, itu bukanlah perkembangan sejati. Inilah pesan pokok *Populorum Progressio*, yang berlaku untuk masa kini dan sepanjang masa. Perkembangan manusia seutuhnya pada tingkat kodrati sebagai tanggapan terhadap panggilan dari Allah Pencipta⁴⁸, membutuhkan pemenuhan diri dalam “humanisme transenden yang memberi [kepada manusia] kemungkinan kesempurnaannya yang terbesar: inilah tujuan tertinggi perkembangan manusia”⁴⁹. Maka, panggilan Kristiani pada perkembangan ini berlaku baik untuk tingkat kodrati maupun adikodrati; itulah sebabnya, “ketika Allah dikaburkan, kemampuan kita mengenal tata kodrati, tujuan dan ‘kebaikan’ mulai berkurang”⁵⁰.

19. Akhirnya, visi perkembangan sebagai panggilan mencakup *sentralitas kasih dalam perkembangan* tersebut. Paulus VI, dalam ensikliknya *Populorum Progressio*, memperlihatkan bahwa penyebab kurangnya perkembangan pertama-tama bukanlah soal tatanan materi. Ia mengajak kita untuk mencarinya dalam dimensi lain pribadi manusia: pertama-tama, dalam kehendak, yang sering mengabaikan kewajiban solidaritas. Kedua, dalam pemikiran, yang tidak selalu memberikan arah yang tepat pada kehendak. Oleh karena itu, untuk mencapai perkembangan, diperlukan “gagasan dan pemikiran mendalam para arif bijaksana dalam upaya mencari humanisme baru yang akan memungkinkan manusia modern menemukan dirinya sendiri”⁵¹. Tetapi itu bukan segalanya. Keterbelakangan disebabkan oleh sesuatu yang lebih penting daripada kurangnya pemikiran yang mendalam, yaitu “renggangnya ikatan persaudaraan di antara orang perorangan

⁴⁸ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 16; *loc.cit.*, 265

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Benediktus XVI, *Sapaan pada Kaum Muda di Barangaroo, Sydney*, 17 Juli 2008

⁵¹ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 20; *loc.cit.*, 267

dan bangsa-bangsa”⁵². Apakah mungkin memperoleh persaudaraan ini dengan usaha manusia belaka? Ketika masyarakat semakin mengglobal, itu membuat kita bertetangga, tetapi tidak membuat kita bersaudara. Akal budi sendiri mampu memahami persamaan antarmanusia dan menyeimbangkan hidup bersama antarmanusia, tetapi tidak mampu membangun persaudaraan. Persaudaraan ini bersumber pada panggilan transenden Allah Bapa, yang mengasihi kita lebih dahulu, dengan mengajar kita melalui Putra-Nya apa kasih persaudaraan itu. Paulus VI, dengan menyampaikan berbagai tingkat dalam proses perkembangan manusia, meletakkan sebagai puncak, sesudah menyebutkan iman, “kesatuan dalam kasih Kristus, yang memanggil semua orang untuk ikut menghayati sebagai anak-anak dalam kehidupan Allah yang hidup, Bapa semua orang”⁵³.

20. Perspektif ini, yang dibuka oleh *Populorum Progressio*, tetap penting untuk memberi ruang-bernapas dan arah pada komitmen kita terhadap perkembangan bangsa-bangsa. Lebih dari itu, *Populorum Progressio* berulang kali menggarisbawahi *kebutuhan mendesak untuk perubahan*⁵⁴, dan dalam menghadapi persoalan besar ketidakadilan dalam perkembangan bangsa-bangsa, mengajak untuk bertindak berani, tanpa ditunda-tunda. *Kemendesakan ini juga merupakan konsekuensi dari kasih dalam kebenaran*. Inilah kasih Kristus yang membimbing kita pada: “kasih Kristus menguasai kami” (2Kor. 5:14). Kemendesakan ini dituliskan tidak hanya pada benda-benda, tidak semata-mata berasal dari pergantian cepat peristiwa dan masalah, tetapi juga dari hal yang sangat penting, perwujudan persaudaraan sejati. Jadi, pentingnya tujuan ini menuntut keterbukaan kita untuk memahami secara mendalam dan menggerakkan kita pada kedalaman “hati”, sehingga memberi jaminan bahwa proses

⁵² *Ibid.*, 66; *loc.cit.*, 289-290

⁵³ *Ibid.*, 21; *loc.cit.*, 267-268

⁵⁴ Bdk. no. 3, 29, 32; *loc.cit.*, 258, 272-273

ekonomi dan sosial sekarang ini berkembang menuju hasil-hasil manusiawi sepenuhnya.

BAB DUA

PERKEMBANGAN MANUSIA PADA ZAMAN KITA

21. Paulus VI mempunyai visi perkembangan yang gamblang. Ia memahami istilah untuk menunjukkan tujuan yang menolong bangsabangsa, pertama-tama dan terutama dari kelaparan, penderitaan, penyakit endemik, dan buta huruf. Dari sudut pandang ekonomi, ini berarti partisipasi aktif mereka, dalam arti yang sebenarnya, dalam proses ekonomi internasional; dari sudut pandang sosial, itu berarti evolusi mereka dalam masyarakat terdidik yang ditandai dengan solidaritas; dari sudut pandang politis, itu berarti konsolidasi pemerintah demokratis yang mampu menjamin kebebasan dan perdamaian. Setelah beberapa tahun, sebagaimana kita lihat dengan memerhatikan perkembangan dan perspektif dari serangkaian krisis yang menimpa dunia sekarang ini, *kita bertanya sejauh mana harapan Paulus VI itu sudah terpenuhi* oleh model perkembangan yang diterapkan selama beberapa dekade belakangan ini. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa Gereja merasa prihatin atas kemampuan masyarakat yang melulu bersifat teknologi untuk menetapkan tujuan realistis dan memanfaatkan sarana-sarana yang tersedia. Keuntungan berguna jika menjadi sarana menuju tujuan akhir yang memberi makna, baik bagaimana menghasilkannya maupun bagaimana memanfaatkannya. Sekali keuntungan menjadi tujuan utama, jika keuntungan itu dihasilkan oleh sarana-sarana yang tidak tepat dan tanpa kesejahteraan umum sebagai tujuan akhirnya, hal ini berisiko merusak kekayaan, dan menciptakan kemiskinan. Perkembangan ekonomi yang diharapkan oleh Paulus VI adalah menghasilkan pertumbuhan nyata, menguntungkan setiap orang dan sungguh-sungguh berkelanjutan. Benarlah bahwa perkembangan telah terjadi, dan terus menjadi faktor positif yang telah mengangkat

milyaran orang keluar dari penderitaan – akhir-akhir ini memberi kemungkinan bagi banyak negara untuk menjadi pemain-pemain efektif di dunia politik internasional. Memang harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi ini telah dan terus dibebani oleh *kegagalan-kegagalan serta persoalan-persoalan dramatis*, bahkan masih ditambah lagi dengan krisis akhir-akhir ini. Hal ini menghadapkan kita pada pilihan-pilihan yang tidak bisa ditunda-tunda, tentang nasib manusia yang, lebih-lebih lagi, tidak bisa terpisah dari kodratnya. Kekuatan teknis yang berperan, hubungan timbal-balik global, pengaruh-pengaruh yang merusak ekonomi riil dari transaksi keuangan yang dikelola dengan buruk dan sebagian besar spekulatif, migrasi besar-besaran bangsa-bangsa yang sering ditimbulkan oleh beberapa keadaan khusus dan kurang mendapat perhatian, eksploitasi sewenang-wenang terhadap sumber daya alam: semua ini mengajak kita merenungkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak hanya baru dibandingkan dengan yang disampaikan oleh Paus Paulus VI, tetapi juga terutama, karena dampak kuat atas kesejahteraan umat manusia masa kini dan masa depan. Berbagai aspek krisis, penyelesaiannya, dan kemungkinan terjadinya perkembangan baru di masa datang, semakin saling berkaitan, saling menyiratkan satu sama lain, membutuhkan upaya-upaya baru akan pemahaman holistik dan suatu sintesis *humanistik baru*. Kompleks dan beratnya keadaan ekonomi saat ini sungguh membuat kita prihatin, tetapi kita harus dengan realistis, penuh keyakinan dan harapan, menerima tanggung jawab baru yang diberikan kepada kita demi masa depan dunia yang membutuhkan pembaruan budaya yang mendalam, dunia yang perlu menemukan kembali nilai-nilai dasar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Krisis saat ini mengharuskan kita merencanakan kembali perjalanan kita, menetapkan sendiri peraturan-peraturan baru dan menemukan bentuk baru komitmen, untuk membangun pengalaman-pengalaman positif dan menolak yang negatif. Dengan demikian krisis menjadi *kesempatan untuk memikirkan pertimbangan-pertimbangan, yang digunakan untuk membangun visi baru bagi masa depan.*

Dalam semangat inilah, lebih dengan keyakinan daripada kepasrahan, tepatlah menanggapi kesulitan-kesulitan zaman sekarang.

22. Sekarang ini gambaran perkembangan memiliki *banyak lapisan yang tumpang-tindih*. Para pelaku dan penyebab keterbelakangan dan perkembangan bermacam ragam, kesalahan dan kebaikan berbeda. Fakta ini seharusnya mendorong kita membebaskan diri dari ideologi yang sering terlalu menyederhanakan realitas ke dalam cara-cara artifisial, dan menuntun kita untuk meneliti secara objektif dimensi manusiawi sepenuhnya dari persoalan-persoalan tersebut. Sebagaimana sudah diamati oleh Yohanes Paulus II, garis pembatas antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin tidak lagi sejelas seperti pada zaman *Populorum Progressio*⁵⁵. *Kekayaan dunia berkembang dalam arti absolut, tetapi kesenjangan terus meningkat*. Di negara-negara kaya, sektor-sektor baru masyarakat dikalahkan oleh kemiskinan dan bentuk baru kemiskinan bermunculan. Di daerah-daerah yang lebih miskin, beberapa kelompok menikmati semacam “perkembangan super” dari bentuk pemborosan dan konsumtif yang menciptakan perbedaan yang tidak dapat diterima dengan situasi pemiskinan kemanusiaan yang terus-menerus. “Skandal *kesenjangan* yang mencolok”⁵⁶ berlangsung terus. Sayangnya, korupsi dan ketidakabsahan tampak nyata di dalam perilaku kelas ekonomi dan politik di negara-negara kaya, baik yang lama maupun yang baru, juga di negara-negara miskin. Di antara mereka yang kadang-kadang tidak mampu menghormati hak-hak asasi manusia para pekerja adalah perusahaan-perusahaan multinasional besar, juga pengusaha-pengusaha lokal. Bantuan internasional seringkali diselewengkan dari tujuan yang sebenarnya, melalui tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, baik dalam rangkaian para penderma maupun para penerima. Juga dalam konteks penyebab non-material atau kultural perkembangan dan

⁵⁵ Bdk. Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 28; *loc.cit.*, 548-550

⁵⁶ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 9; *loc.cit.*, 261-262

keterbelakangan kita menemukan pola tanggung jawab yang sama. Di pihak negara-negara kaya ada semangat berlebihan untuk melindungi pengetahuan melalui pernyataan yang terlalu keras mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Pada saat yang sama, di beberapa negara miskin, model-model budaya dan norma-norma sosial dari perilaku yang menghambat proses pembangunan tetap berlangsung.

23. Banyak wilayah di dunia sekarang ini telah berkembang pesat, walaupun dengan cara yang bermasalah dan tidak merata, dengan masuk di antara kekuatan-kekuatan besar yang bertujuan untuk memainkan peranan penting di masa depan. Namun seharusnya ditegaskan bahwa *kemajuan yang hanya sekedar ekonomis dan teknologis tidaklah cukup*. Perkembangan membutuhkan lebih dari semua itu agar menjadi tepat dan integral. Keluar dari keterbelakangan ekonomi, meskipun positif, tidak memecahkan masalah kompleks dari kemajuan manusiawi, baik bagi negara-negara yang sudah maju, maupun negara-negara ekonomi berkembang, bahkan juga bagi negara-negara yang masih miskin, yang dapat menderita tidak hanya melalui bentuk-bentuk lama eksploitasi, tetapi juga dari konsekuensi-konsekuensi negatif suatu pertumbuhan yang ditandai dengan penyimpangan dan ketimpangan.

Setelah runtuhnya sistem ekonomi dan politik negara-negara komunis Eropa Timur dan berakhirnya “blok pertentangan”, perlu adanya kajian ulang secara menyeluruh atas pembangunan. Paus Yohanes Paulus II telah menyebutnya pada tahun 1987 ketika ia menunjuk keberadaan blok-blok ini sebagai salah satu penyebab utama keterbelakangan⁵⁷ karena politik menarik sumber-sumber daya dari ekonomi dan dari budaya, dan ideologi menghalangi kebebasan. Lebih lanjut, pada tahun 1991, sesudah kejadian-kejadian tahun 1989, ia meminta agar pada masa berakhirnya blok-blok itu ada rencana baru yang menyeluruh untuk pembangunan, tidak

⁵⁷ Bdk. Ensiklik *Sollicitudo Rei Solicialis*, 20; *loc.cit.*, 536-537

hanya di negara-negara tersebut, tetapi juga di Barat dan di belahan dunia lainnya yang sedang berkembang⁵⁸. Hal ini tercapai hanya sebagian dan masih menjadi tugas nyata yang perlu dituntaskan, mungkin melalui pilihan-pilihan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi saat ini.

24. Dunia yang dihadapi oleh Paulus VI –meskipun masyarakat sudah maju sedemikian rupa sehingga ia dapat membicarakan persoalan-persoalan sosial yang mendunia– masih sangat kurang terintegrasi dibandingkan dunia zaman ini. Kegiatan ekonomi dan proses politik sebagian besar terjadi di daerah yang secara geografis sama, dan karena itu dapat saling mendukung satu sama lain. Produksi terjadi sebagian besar dalam batas-batas nasional, dan investasi finansial di luar negeri agak terbatas, sehingga politik beberapa negara masih dapat menentukan prioritas-prioritas ekonomi dan sampai taraf tertentu mengatur pelaksanaannya dengan menggunakan alat-alat yang tersedia. Oleh karena itu *Populorum Progressio* menetapkan peran sentral, sekalipun tidak secara eksklusif, "pejabat publik"⁵⁹.

Pada zaman kita, negara berada dalam situasi yang mengharuskan berhadapan dengan keterbatasan-keterbatasan pada kekuasaannya yang diajukan oleh kondisi baru perdagangan dan keuangan internasional, yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas modal finansial dan sarana-sarana produksi, material dan non-material. Keadaan baru ini telah mengubah kekuatan politik negara-negara.

Sekarang ini, dengan memerhatikan pelajaran dari krisis ekonomi yang memperlihatkan para *pejabat publik* negara terlibat langsung dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan dan disfungsi-difungsi, tampaknya lebih realistis untuk *mengevaluasi kembali* peran dan kekuasaan mereka, yang perlu ditinjau kembali secara bijaksana dan memperbaruinya sedemikian rupa sehingga membuat mereka mampu, mungkin

⁵⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 22-29; *loc.cit.*, 819-830

⁵⁹ Bdk. nos. 23, 33; *loc.cit.*, 268-269, 273-274

melalui bentuk baru keterlibatan, menanggapi tantangan-tantangan dunia zaman ini. Segera sesudah peran pejabat publik dirumuskan dengan lebih jelas, orang dapat memperkirakan peningkatan bentuk-bentuk baru keterlibatan politik, secara nasional dan internasional, yang telah terjadi melalui kegiatan organisasi-organisasi yang diselenggarakan di tengah masyarakat sipil; dengan cara ini diharapkan bahwa kepentingan dan partisipasi warga negara dalam *res publica* akan mengakar lebih dalam.

25. Dari sudut pandang sosial, sistem perlindungan dan kesejahteraan, yang sudah ada di banyak negara pada masa Paulus VI, sedang mengalami kesulitan dan bahkan dapat lebih sulit lagi di masa mendatang untuk mencapai tujuan keadilan sosial yang sesungguhnya dalam lingkungan yang sangat berubah saat ini. Pasar global telah mendorong pertama-tama dan terutama pihak negara-negara kaya, pencarian wilayah-wilayah untuk memasarkan produksi dengan harga rendah guna menurunkan harga barang-barang, meningkatkan daya beli dan dengan demikian mempercepat laju pembangunan dengan penyediaan barang-barang konsumsi yang lebih banyak bagi pasar domestik. Akibatnya, pasar telah mendorong bentuk baru kompetisi antarnegara karena mereka berusaha menarik perusahaan-perusahaan asing untuk membangun pusat-pusat produksi, dengan berbagai macam cara, termasuk rezim perpajakan yang menguntungkan dan deregulasi pasar tenaga kerja. Proses ini mengarah pada *perampingan sistem jaminan sosial* demi mencari keuntungan kompetitif lebih besar di pasar global, dengan konsekuensi bahaya besar bagi hak-hak para pekerja, hak-hak asasi manusia dan bagi solidaritas yang dilaksanakan dalam bentuk-bentuk tradisional negara sosial. Sistem jaminan sosial bisa kehilangan kemampuan melaksanakan tugasnya, baik di negara-negara sedang berkembang, maupun di negara-negara yang sudah maju, juga di negara-negara miskin. Di sini, kebijakan anggaran belanja, dengan pemotongan anggaran sosial yang sering dibuat di bawah tekanan lembaga-lembaga keuangan internasional, dapat menyebabkan

ketidakberdayaan warga negara dalam menghadapi risiko-risiko lama dan baru; ketidakberdayaan tersebut meningkat karena kurangnya perlindungan efektif pada pihak serikat pekerja. Melalui gabungan perubahan sosial dan ekonomi, *organisasi-organisasi serikat pekerja* mengalami kesulitan yang lebih besar dalam melaksanakan tugas mereka untuk menyampaikan kepentingan para pekerja, sebagian karena Pemerintah, dengan alasan manfaat ekonomi, sering membatasi kebebasan atau kemampuan negosiasi serikat pekerja. Karena itu, jaringan solidaritas tradisional menghadapi semakin banyak rintangan untuk diatasi. Seruan yang berulang kali disampaikan dalam ajaran sosial Gereja, mulai dengan *Rerum Novarum*⁶⁰, untuk memajukan perkumpulan-perkumpulan para pekerja agar dapat melindungi hak-hak mereka sekarang ini, dengan demikian harus dihargai lebih daripada di masa lalu, dengan memberikan tanggapan segera dan jauh ke depan, terhadap kebutuhan mendesak akan bentuk-bentuk baru kerja sama pada tingkat internasional, juga pada tingkat lokal.

Mobilitas pekerja, yang terkait dengan iklim deregulasi, adalah fenomena penting dengan aspek-aspek positif tertentu, karena hal itu dapat mendorong produksi barang-barang berharga dan pertukaran budaya. Namun demikian, ketidakpastian akan kondisi kerja yang disebabkan oleh mobilitas dan deregulasi, ketika menjadi endemik, cenderung menciptakan bentuk-bentuk baru ketidakstabilan psikologis, yang menimbulkan kesulitan dalam membangun rencana hidup koheren, termasuk rencana hidup perkawinan. Akibatnya adalah situasi yang merendahkan manusia, untuk tidak mengatakan pemborosan sumber-sumber daya sosial. Dibandingkan dengan korban masyarakat industri di masa lalu, pengangguran saat ini menimbulkan bentuk-bentuk baru marginalisasi ekonomi, dan krisis saat ini hanya membuat situasi menjadi lebih buruk. Tidak bekerja untuk waktu yang lama atau tergantung untuk jangka panjang pada bantuan pemerintah atau swasta merongrong kebebasan dan

⁶⁰ Bdk. *loc.cit.*, 135

kreativitas orang dan keluarganya serta relasi sosialnya, sehingga menimbulkan penderitaan psikologis dan spiritual. Saya ingin mengingatkan setiap orang, terutama pemerintah yang terlibat dalam meningkatkan aset ekonomi dunia dan aset sosial, bahwa *modal utama yang harus dijaga dan dihargai adalah manusia, pribadi manusia dalam integritasnya*: “Manusia adalah sumber, pusat dan tujuan seluruh kehidupan ekonomi dan sosial”⁶¹.

26. Pada tataran budaya, dibandingkan dengan masa Paulus VI, perbedaan bahkan lebih jelas. Pada saat itu kebudayaan-kebudayaan digambarkan relatif baik dan memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan diri melawan upaya-upaya yang akan meleburnya menjadi satu. Sekarang ini kemungkinan *interaksi antarbudaya* telah berkembang secara signifikan, sehingga menimbulkan peluang baru untuk dialog antarbudaya: suatu dialog yang, jika ingin menjadi efektif, harus dimulai dari kesadaran mendalam atas identitas khusus dari bermacam-macam mitra dialog. Tidak boleh dilupakan bahwa meningkatnya komersialisasi pertukaran budaya saat ini menimbulkan bahaya ganda. Pertama, perlu dicatat bahwa *eklektisme budaya* sering dipandang secara tidak kritis: budaya-budaya ditempatkan sejajar satu sama lain dan dipandang pada hakikatnya sama saja serta dapat dipertukarkan. Hal ini dengan mudah memunculkan relativisme yang justru tidak membantu dialog antarbudaya sejati; pada tataran sosial, relativisme budaya membuat kelompok-kelompok budaya yang berdampingan tetap terpisah, tanpa dialog autentik dan karenanya tidak ada integrasi yang sesungguhnya. Kedua, ada bahaya sebaliknya, yakni *penyeragaman budaya* dan penerimaan sama rata terhadap bermacam tingkah laku dan gaya hidup. Dengan demikian hilanglah makna mendalam kebudayaan dari berbagai macam bangsa, tradisi-tradisi berbagai bangsa, yang dengannya orang menegaskan dirinya dalam kaitannya dengan

⁶¹ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral mengenai Gereja di Zaman Modern, *Gaudium et Spes*, 63

persoalan pokok kehidupan⁶². Apa yang biasa ada dalam *eklektisme* dan penyeragaman budaya adalah pemisahan budaya dari kodrat manusia. Jadi, kebudayaan-kebudayaan tidak lagi dapat menjelaskan diri mereka sendiri dalam suatu kodrat yang transenden⁶³, dan akhirnya manusia direduksi hanya menjadi statistik budaya. Bila hal ini terjadi, umat manusia menghadapi risiko baru perbudakan dan manipulasi.

27. Kehidupan di beberapa negara miskin masih sangat tidak aman sebagai akibat dari kekurangan pangan, dan situasi bisa menjadi lebih buruk: *kelaparan* masih menimbulkan jumlah korban yang sangat besar di antara mereka, yang seperti Lazarus, tidak diizinkan untuk mengambil remah-remah dari meja orang kaya, bertentangan dengan harapan-harapan yang diungkapkan oleh Paulus VI⁶⁴. *Memberi makan kepada yang lapar* (bdk. Mat. 25:35,37,42) adalah kewajiban etis bagi Gereja Semesta, karena ia menanggapi ajaran Pendirinya, Tuhan Yesus, mengenai solidaritas dan berbagi harta milik. Lebih dari itu, penghapusan kelaparan dunia di zaman global, juga menjadi suatu tuntutan untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan planet. Kelaparan tidak berarti sangat tergantung pada kekurangan materi seperti pada kekurangan sumber-sumber daya sosial, yang paling penting adalah sumber kelembagaan. Dengan kata lain, apa yang hilang adalah jaringan lembaga-lembaga ekonomi yang mampu menjamin akses tetap ke makanan yang cukup dan air untuk kebutuhan gizi, dan juga mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan yang muncul dari krisis pangan sesungguhnya, apakah karena sebab-sebab alamiah atau tiadanya tanggung jawab politik, secara nasional dan internasional. Persoalan kerawanan pangan perlu ditanggapi dalam perspektif jangka panjang, dengan menghilangkan sebab-sebab struktural yang

⁶² Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 24; *loc.cit.*, 821-822

⁶³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Veritatis Splendor* (6 Agustus 1993), 33, 46, 51; AAS 85 (1993), 1160, 1169-1171, 1174-1175; *Id.*, *Pidato pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa*, 5 Oktober 1995, 3

⁶⁴ Bdk. Ensiklik *Populorum Progressio*, 47; *loc.cit.*, 280-281; Yoh. Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 42; *loc.cit.*, 572-574

menimbulkan persoalan tersebut dan dengan meningkatkan pengembangan pertanian di negara-negara miskin. Hal ini dapat dilaksanakan dengan berinvestasi dalam infrastruktur pedesaan, sistem irigasi, transportasi, organisasi pasar, dan dalam pengembangan serta penyebarluasan teknologi pertanian yang dapat memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya manusia, sumber daya alam dan sosioekonomi yang lebih siap tersedia di tingkat lokal, sekaligus juga menjamin kelestariannya untuk jangka panjang. Semua ini perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat dalam pemilihan dan keputusan yang memengaruhi pemanfaatan lahan pertanian. Dalam perspektif ini, mungkin akan berguna mempertimbangkan kemungkinan baru yang terbuka terhadap pemanfaatan yang tepat atas teknik pertanian tradisional dan inovatif, selalu dengan mengasumsikan bahwa semua hal ini telah dipertimbangkan, setelah diuji secukupnya, menjadi layak, menghargai lingkungan dan memerhatikan kebutuhan orang-orang yang sangat berkekurangan. Secara bersamaan, permasalahan reformasi agraria yang tepat di negara-negara berkembang tidak boleh diabaikan. Hak untuk mendapatkan makanan, demikian juga dengan hak untuk mendapat air, mempunyai kedudukan yang penting dalam pemenuhan hak-hak lainnya, berawal dengan hak dasar untuk hidup. Karena itu perlulah mengupayakan kesadaran publik yang memandang *makanan dan akses ke air sebagai hak universal seluruh umat manusia, tanpa pembedaan atau diskriminasi*⁶⁵. Lebih lanjut, penting ditekankan bahwa solidaritas terhadap negara-negara miskin dalam proses pembangunan dapat mengarah ke sebuah solusi krisis global saat ini, sebagaimana para politisi dan para penanggung jawab lembaga-lembaga internasional telah mulai merasakan akhir-akhir ini. Dengan memberikan dukungan kepada negara-negara yang miskin secara ekonomi melalui rencana keuangan yang disemangati oleh solidaritas –sehingga negara-negara ini dapat melangkah untuk memenuhi permintaan warga negara

⁶⁵ Bdk. Benediktus XVI, *Pesan untuk Hari Pangan Sedunia 2007*; AAS 99 (2007), 933-935

mereka sendiri terhadap kebutuhan barang-barang konsumsi dan untuk perkembangan- tidak hanya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya, tetapi juga dapat membantu mempertahankan kemampuan produktif negara-negara kaya yang berisiko dirusak oleh krisis.

28. Salah satu aspek perkembangan paling mencolok di zaman ini adalah pentingnya masalah *hormat terhadap kehidupan*, yang tidak dapat dilepaskan, dengan cara apa pun juga, dari persoalan-persoalan perkembangan bangsa-bangsa. Inilah aspek yang telah berkembang baik akhir-akhir ini, yang mengharuskan kita memperluas konsep kemiskinan⁶⁶ dan keterbelakangan untuk menyertakan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penerimaan hidup, khususnya dalam kasus-kasus di mana hidup dihalangi dengan berbagai macam cara.

Tidak hanya situasi kemiskinan yang masih menyebabkan tingginya angka kematian bayi di beberapa wilayah, tetapi beberapa belahan dunia masih mengalami praktik-praktik pengendalian demografi, pada pihak pemerintah yang sering menganjurkan kontrasepsi dan bahkan lebih jauh lagi memaksakan aborsi. Di negara-negara yang berkembang secara ekonomi perundang-undangan melawan kehidupan tersebar sangat luas, dan sudah membentuk sikap moral dan praksis yang menyebarkan mentalitas anti-kelahiran; usaha berkali-kali dibuat untuk mengeksplor mentalitas ini ke negara-negara lain seolah-olah itu merupakan kemajuan budaya.

Beberapa Organisasi non-Pemerintah bekerja secara aktif menyebarkan aborsi, kadang-kadang dengan mendorong praktik sterilisasi di negara-negara miskin, dalam beberapa kasus bahkan tidak menjelaskan hal ini pada perempuan-perempuan yang tidak sadar akan hal ini. Lagipula, ada alasan untuk mencurigai bahwa bantuan pembangunan kadang-kadang dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan pelayanan

⁶⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 18, 59, 63-64; *loc.cit.*, 419-421, 467-468, 472-475

kesehatan tertentu yang *de facto* mencakup pemaksaan tindakan pengaturan kelahiran yang kuat. Alasan lebih lanjut untuk keprihatinan-keprihatinan lain adalah undang-undang yang mengizinkan eutanasia, juga tekanan dari kelompokkelompok nasional maupun internasional, yang mendukung pengakuan yuridisnya.

Keterbukaan terhadap kehidupan merupakan pusat perkembangan sejati. Ketika masyarakat mengarah pada penolakan atau penindasan terhadap kehidupan, akhirnya tidak lagi menemukan perlunya motivasi dan energi untuk mengusahakan kebaikan sejati manusia. Jika kepekaan pribadi dan sosial terhadap penerimaan hidup baru hilang, maka bentuk-bentuk penerimaan lainnya yang berharga bagi masyarakat juga menjadi lenyap⁶⁷. Penerimaan kehidupan memperkuat kekuatan moral dan membuat masyarakat mampu saling membantu. Dengan memperkuat keterbukaan pada kehidupan, bangsa-bangsa kaya dapat memahami dengan lebih baik kebutuhan bangsa-bangsa miskin, mereka dapat menghindari penggunaan sumber-sumber daya ekonomi dan intelektual secara besar-besaran untuk memuaskan keinginan egois warga negaranya sendiri, dan malahan mereka dapat memajukan tindakan luhur dalam perspektif produksi yang sehat secara moral dan ditandai oleh solidaritas, yang menghargai hak asasi untuk hidup setiap bangsa dan setiap pribadi.

29. Aspek lain dari kehidupan modern yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan: penolakan atas *hak kebebasan beragama*. Saya tidak menunjuk semata-mata pada pertentangan dan konflik yang terus-menerus bergolak di dunia dengan alasan agama, juga jika kadang-kadang motif agama itu hanya untuk menutupi alasan-alasan lain, seperti misalnya ambisi kekuasaan dan kekayaan. Kenyataannya, saat ini orang-orang sering membunuh atas nama Allah, sebagaimana baik pendahulu saya, Yohanes Paulus II, maupun

⁶⁷ Bdk. Benediktus XVI, *Pesan pada Hari Perdamaian Sedunia 2007*, 5

saya sendiri sering menyatakan dan menyesali secara publik⁶⁸. Kekerasan menghambat perkembangan sejati dan menghalangi pembangunan bangsa-bangsa menuju kesejahteraan sosio-ekonomi dan spiritual yang lebih baik. Hal itu berlaku khususnya dalam terorisme yang dilatarbelakangi oleh fundamentalisme⁶⁹, yang melahirkan penderitaan, kerusakan dan kematian, menghalangi dialog antarbangsa dan menyelewengkan sumber-sumber daya yang melimpah dari penggunaannya demi perdamaian dan masyarakat.

Namun, perlu ditambahkan bahwa selain fanatisme agama yang dalam beberapa keadaan menghalangi pelaksanaan hak kebebasan beragama, demikian juga meningkatnya sikap acuh tak acuh pada agama atau ateisme praktis di beberapa negara menghalangi kebutuhan masyarakat untuk berkembang, dengan merampas sumber-sumber spiritual dan kemanusiaan mereka. *Allah adalah Penjamin perkembangan sejati manusia*, karena setelah menciptakannya menurut citra-Nya, Ia juga menetapkan martabat ilahi laki-laki dan perempuan dan memenuhi kerinduan dalam diri mereka untuk “menjadi lebih”. Manusia bukanlah suatu atom yang hilang di alam semesta tanpa tujuan⁷⁰, tetapi ia adalah ciptaan Allah, yang dianugerahi jiwa abadi dan yang selalu dicintai-Nya. Jika manusia hanya sekadar hasil dari suatu peristiwa atau kebutuhan, atau jika ia harus menurunkan cita-citanya sampai pada batas cakrawala dunia di mana ia hidup, jika semua realitas hanya sekadar sejarah dan budaya, dan manusia tidak memiliki kodrat yang ditetapkan untuk melampaui dirinya dalam hidup adikodrati, maka ia dapat berbicara mengenai pertumbuhan, atau evolusi, tetapi bukan perkembangan.

⁶⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, *Pesan Hari Perdamaian Sedunia 2002*, 4-7, 12-15; AAS 94 (2002), 134-136, 138-140; Id., *Pesan Hari Perdamaian Sedunia 2004*, 8; AAS 96 (2004), 119; Id., *Pesan Hari Perdamaian Sedunia 2005*, 4; AAS 97 (2005), 177-178; Benediktus XVI, *Pesan Hari Perdamaian Sedunia 2006*, 9-10; AAS 98 (2006), 60-61; Id., *Pesan Hari Perdamaian Sedunia 2007*, 5, 14; *loc.cit.*, 778, 782-783

⁶⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, *Pesan Hari Perdamaian Sedunia 2002*, 6; *loc.cit.*, 135; Benediktus XVI, *Pesan Hari Perdamaian Sedunia 2006*, 9-10; *loc.cit.*, 60-61

⁷⁰ Bdk. Benediktus XVI, *Homili pada Misa*, Islinger Feld, Regensburg, 12 September 2006

Ketika negara menganjurkan, mengajarkan, atau memaksakan bentuk-bentuk ateisme praktis, negara menghambat kekuatan moral dan spiritual warga negaranya yang sangat dibutuhkan untuk mencapai perkembangan manusiawi seutuhnya dan menghalangi mereka untuk maju dengan dinamisme yang diperbarui ketika mereka berusaha keras memberikan tanggapan manusiawi yang lebih tulus kepada kasih Allah⁷¹. Dalam konteks relasi budaya, perdagangan atau politik, kadang-kadang juga terjadi bahwa negara-negara maju dan negara-negara berkembang, mengeksport visi yang diturunkan maknanya tentang orang dan nasibnya ke negara-negara miskin. Ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh “perkembangan super”⁷² terhadap perkembangan sejati ketika hal itu disertai oleh “keterbelakangan moral”⁷³.

30. Dalam konteks ini, tema perkembangan manusiawi seutuhnya bahkan mencakup arti yang lebih luas: korelasi antar berbagai unsur menuntut komitmen untuk *meningkatkan interaksi berbagai tingkat pengetahuan manusia* guna mendorong pengembangan autentik bangsa-bangsa. Seringkali dianggap bahwa perkembangan, atau langkah-langkah sosio-ekonomis yang menyertainya, hanya perlu dilaksanakan melalui tindakan bersama. Namun, tindakan bersama ini perlu diarahkan karena “semua bentuk kegiatan sosial mencakup ajaran tertentu”⁷⁴. Mengingat kompleksitas permasalahan, jelaslah bahwa berbagai macam disiplin ilmu harus bekerja sama melalui pertukaran antar cabang ilmu pengetahuan yang teratur. Kasih tidak meniadakan pengetahuan, tetapi justru membutuhkannya, memajukannya, serta menjiwainya dari dalam. Pengetahuan tidak pernah merupakan pekerjaan akal budi semata-mata. Tentu saja pengetahuan bisa direduksi menjadi penilaian dan percobaan, tetapi jika pengetahuan itu ingin menjadi kebijaksanaan yang mampu mengarahkan manusia sesuai asal mula dan tujuan akhirnya, haruslah

⁷¹ Bdk. Benediktus XVI, Ensiklik *Deus Caritas Est*, 1; *loc.cit.*, 217-218

⁷² Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo rei Socialis*, 28; *loc.cit.*, 548-550

⁷³ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 19; *loc.cit.*, 266-267

⁷⁴ *Ibid.*, 39; *loc.cit.*, 276-277

“dibumbui” dengan “garam” kasih. Perbuatan tanpa pengetahuan adalah buta, dan pengetahuan tanpa kasih adalah mandul. Memang, “pribadi yang dijiwai oleh cinta kasih sejati mengerahkan kecerdasan akalnya untuk menemukan penyebab penderitaan, mencari cara-cara yang efektif untuk memerangi dan mengatasinya⁷⁵. Berhadapan dengan fenomena yang ada di hadapan kita, kasih dalam kebenaran menuntut pertama-tama kita mengetahui dan memahami, dengan mengakui dan menghargai kemampuan khusus setiap tingkat pengetahuan. Kasih bukanlah suatu ekstra yang ditambahkan, seperti suatu tambahan pada pekerjaan yang telah disimpulkan di setiap pelbagai ilmu pengetahuan, kasih mengikutsertakannya dalam dialog dari awal mula. Tuntutan kasih tidak bertentangan dengan tuntutan akal budi. Pengetahuan manusiawi tidak cukup dan kesimpulan ilmu pengetahuan tidak dapat menunjukkan sendiri jalan menuju perkembangan manusiawi seutuhnya. Selalu ada kebutuhan untuk mendorong ke arah lebih maju: inilah yang dikehendaki oleh kasih dalam kebenaran⁷⁶. Namun melangkah lebih, tidak pernah berarti terpisah dari kesimpulan akal budi, juga tidak bertentangan dengan hasilnya. Akal budi dan kasih tidak terpisahkan; *kasih disuburkan oleh akal budi dan akal budi dipenuhi oleh kasih*.

31. Ini berarti bahwa penilaian moral dan penelitian ilmiah harus berkembang bersama dan kasih harus menjiwaitnya dalam keseluruhan antarcabang ilmu pengetahuan yang serasi, yang ditandai oleh kesatuan dan perbedaan. Ajaran sosial Gereja, yang memiliki *dimensi penting bersifat interdisipliner*⁷⁷, dapat menjalankan, dalam perspektif ini, fungsi efektivitas yang luar biasa. Ajaran itu memungkinkan iman, teologi, metafisika, dan ilmu pengetahuan menemukan tempatnya dalam upaya kerja sama untuk pelayanan kemanusiaan. Lebih dari itu, di sini ajaran sosial Gereja menunjukkan dimensi kebijaksanaannya.

⁷⁵ *Ibid.*, 75; *loc.cit.* 293-294

⁷⁶ Bdk. Benediktus XVI, Ensiklik *Deus Caritas Est*, 28; *loc.cit.*, 238-240

⁷⁷ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 59; *loc.cit.*, 864

Paulus VI telah melihat dengan jelas bahwa di antara penyebab-penyebab keterbelakangan itu ada kekurangan kebijaksanaan dan refleksi, kekurangan pemikiran yang mampu merumuskan sintesis yang mengarahkan⁷⁸, yang amat memerlukan “suatu visi jelas dari semua aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya dan spiritual”⁷⁹. Pengkotak-kotakan pengetahuan yang berlebihan⁸⁰, ketertutupan pengetahuan manusiawi terhadap metafisika⁸¹, kesulitan yang terjadi dalam dialog antara ilmu pengetahuan dan teologi merugikan tidak hanya perkembangan pengetahuan, tetapi juga pengembangan bangsa-bangsa, karena hal-hal tersebut mempersulit pemahaman tentang kebaikan manusia seutuhnya dalam berbagai dimensinya. “Perluasan konsep kita tentang akal budi dan penerapannya⁸² sangat diperlukan agar kita berhasil mempertimbangkan dengan tepat semua unsur yang terangkum di dalam persoalan perkembangan dan penyelesaian persoalan sosio-ekonomi.

32. Unsur-unsur baru yang penting dalam gambaran perkembangan bangsa-bangsa saat ini dalam banyak kasus membutuhkan *penyelesaian baru*. Hal ini perlu dicari bersama-sama, dengan menghargai hukum yang tepat untuk setiap unsur dan dalam terang visi integral akan manusia, yang mencerminkan pelbagai aspek pribadi manusia, dan direnungkan melalui pandangan yang dimurnikan oleh kasih. Konvergensi luar biasa dan kemungkinan penyelesaian akan terungkap, tanpa mengaburkan unsur penting dalam kehidupan manusia.

Martabat pribadi setiap orang dan tuntutan keadilan membutuhkan, terutama pada masa kini, bahwa pilihan ekonomis tidak menimbulkan peningkatan kesenjangan kekayaan secara berlebihan dan yang secara moral tidak dapat

⁷⁸ Bdk. Ensiklik *Populorum Progressio*, 40, 85; *loc.cit.*, 277, 298-299

⁷⁹ *Ibid.*, 13; *loc.cit.*, 263-264

⁸⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Fides et Ratio* (14 September 1998), 85: AAS 91 (1999), 72-73

⁸¹ *Ibid.*, 83; *loc.cit.*, 70-71

⁸² Benediktus XVI, *Sambutan di Universitas Regensburg*, 12 September 2006

diterima⁸³, serta kita tetap *memprioritaskan tujuan akses pekerjaan atau keberlangsungannya* bagi semua orang. Jelas hal ini juga dituntut oleh “logika ekonomi”. Peningkatan sistemik akan kesenjangan sosial, baik dalam satu negara maupun antara penduduk berbagai negara, yaitu peningkatan masif dalam kemiskinan relatif, tidak hanya mengikis ikatan sosial, dan dengan demikian membahayakan demokrasi, tetapi juga berdampak negatif terhadap ekonomi, melalui pengikisan progresif “modal sosial”: jaringan hubungan kepercayaan, tingkat kepercayaan, dan ketaatan pada peraturan, yang semuanya sangat diperlukan bagi setiap bentuk hidup bersama.

Ilmu ekonomi selalu mengatakan bahwa situasi ketidakamanan struktural melahirkan sikap anti-produktif dan pemborosan sumber daya manusia, karena pekerja cenderung menyesuaikan diri secara pasif pada mekanisme otomatis daripada menghasilkan kreativitas. Juga dalam hal ini ada titik temu antara ilmu pengetahuan dan penilaian moral. *Biaya manusiawi selalu* menyangkut *biaya ekonomi*, dan disfungsi ekonomi selalu menyangkut biaya manusiawi.

Perlu diingat juga reduksi budaya ke dimensi teknologi, sekalipun dalam jangka pendek dapat memberikan keuntungan, dalam jangka panjang menghalangi pengayaan timbal-balik dan dinamika kerja sama. Pentinglah membedakan antara pertimbangan ekonomis atau sosiologis jangka pendek dan jangka panjang. Menurunkan tingkat perlindungan hak-hak para pekerja, atau mengabaikan mekanisme pembagian kembali kekayaan untuk meningkatkan daya saing internasional negara, menghambat pencapaian pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, perlu berhati-hati mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi manusiawi atas kecenderungan saat ini terhadap tujuan ekonomi jangka pendek, kadang-kadang malah sangat pendek. Hal ini menuntut *suatu refleksi baru dan lebih dalam mengenai arti*

⁸³ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 33; *loc.cit.*, 273-274

perekonomian dan tujuannya,⁸⁴ juga revisi mendalam dan berwawasan ke depan terhadap model pembangunan masa kini, untuk memperbaiki disfungsi dan penyimpangannya. Hal ini dituntut, dalam kenyataannya, oleh kondisi kesehatan ekologis bumi; terutama dituntut oleh krisis budaya dan moral manusia, yang gejalanya sejak lama sudah tampak jelas di setiap belahan dunia.

33. Empat puluh tahun lebih setelah *Populorum Progressio*, tema dasarnya, perkembangan, *tetap merupakan persoalan terbuka*, yang menjadi lebih akut dan mendesak karena krisis ekonomi dan keuangan saat ini. Jika beberapa wilayah di dunia, dengan sejarah kemiskinan, telah mengalami perubahan luar biasa dalam hal pertumbuhan ekonomi dan peran sertanya dalam produksi dunia, beberapa kawasan lainnya masih hidup dalam situasi kemiskinan yang sebanding dengan situasi yang ada pada masa Paulus VI, dan dalam beberapa kasus bahkan dapat dikatakan lebih buruk. Adalah penting bahwa beberapa penyebab situasi ini sudah dijelaskan dalam *Populorum Progressio*, seperti misalnya tingginya tarif yang dibebankan oleh negara-negara maju, yang masih mempersulit produk-produk dari negara-negara miskin untuk memasuki pasar negara-negara kaya. Namun, beberapa sebab lainnya, yang hanya disinggung sekilas dalam ensiklik, telah muncul kembali secara lebih jelas lagi. Ini adalah kasus penilaian terhadap proses dekolonisasi, yang kemudian memuncak. Paulus VI menyerukan agar perjalanan menuju otonomi dilakukan dengan kebebasan dan kedamaian. Sesudah lebih dari empat puluh tahun, kita harus mengakui bahwa betapa sulitnya jalan ini, baik karena bentuk baru kolonialisme maupun ketergantungan yang terus berlanjut pada kekuatan asing yang lama dan yang baru, serta karena besarnya ketiadaan tanggung jawab dalam negara-negara yang telah mencapai kemerdekaan.

⁸⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, *Pesan Hari Perdamaian Sedunia 2000*, 15; *AAS* 92 (2000), 366

Ciri khas baru yang utama adalah *ledakan saling ketergantungan di seluruh dunia*, yang biasanya dikenal sebagai globalisasi. Paulus VI sudah memprakirakannya sebagian, tetapi langkah perkembangan yang sangat cepat tidak dapat diprakirakan sebelumnya. Muncul di negara-negara yang secara ekonomi berkembang, proses globalisasi ini pada hakikatnya telah menyebar ke seluruh bidang perekonomian. Hal ini telah menjadi kekuatan penggerak utama untuk keluar dari keterbelakangan seluruh wilayah dan pada dirinya sendiri merupakan kesempatan besar. Meskipun demikian, tanpa bimbingan kasih dalam kebenaran, kekuatan global ini dapat menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi dan menimbulkan perpecahan baru dalam keluarga umat manusia. Oleh karena itu, kasih dan kebenaran menghadapkan kita pada sebuah tantangan baru dan sekaligus kreatif, tentu saja sangat luas dan kompleks. Tantangan ini adalah *tentang memperluas jangkauan akal budi dan menjadikannya mampu mengenali dan mengarahkan kekuatan baru yang sangat kuat ini*, dengan menjiwainya dalam perspektif “peradaban kasih” yang benihnya telah ditanam Allah dalam diri setiap orang, dalam setiap kebudayaan.

BAB TIGA

PERSAUDARAAN, PENGEMBANGAN EKONOMI DAN MASYARAKAT SIPIL

34. *Kasih dalam kebenaran* menempatkan manusia di hadapan pengalaman anugerah yang mengagumkan. Anugerah cuma-cuma ada dalam hidup kita dalam berbagai macam wujud, yang seringkali tidak dikenali karena terhalang oleh pandangan hidup yang benar-benar konsumeris dan utilitarian. Manusia diciptakan untuk anugerah, yang mengungkapkan dan menghadirkan dimensi transendennya. Kadang-kadang manusia modern secara salah meyakini dirinya sebagai penulis tunggal dirinya sendiri, hidupnya dan masyarakat. Inilah kesombongan yang terjadi karena terkungkung dalam keegoisan diri, yang disebabkan oleh –

dalam istilah iman- *dosa asal*. Kebijakan Gereja selalu menunjuk pada kehadiran dosa asal dalam situasi sosial dan dalam struktur masyarakat: “ketidaktahuan bahwa manusia mempunyai kodrat yang terluka, yang cenderung jahat, menimbulkan kesalahan besar di bidang pendidikan, politik, tindakan sosial dan moral⁸⁵. Dalam daftar bidang-bidang di mana pengaruh merusak dari dosa tampak dengan jelas, ekonomi telah termasuk di dalamnya sejak lama. Kita mempunyai bukti yang jelas tentang hal ini saat ini. Keyakinan bahwa orang bisa mandiri dan berhasil menghilangkan kejahatan dalam sejarah dengan tindakannya sendiri telah membuatnya merancukan kebahagiaan dan keselamatan dengan bentuk-bentuk imanen kemakmuran material dan aksi sosial. Kemudian, keyakinan bahwa perekonomian harus otonom, harus terlindungi dari “pengaruh-pengaruh” karakter moral, telah menyebabkan orang menyalahgunakan proses ekonomi dengan cara yang sungguh-sungguh merusak. Dalam jangka panjang, keyakinan ini menyebabkan sistem ekonomi, sosial dan politik menginjak-injak kebebasan pribadi dan sosial, dan karena itu tidak mampu memberikan keadilan yang mereka janjikan. Sebagaimana telah saya katakan dalam ensiklik saya *Spe Salvi*, sejarah dengan demikian kehilangan *pengharapan Kristiani*⁸⁶, kehilangan sumber daya sosial yang kuat untuk melayani pengembangan manusia seutuhnya, yang dicari dalam kebebasan dan keadilan. Pengharapan mendorong akal budi dan memberi kekuatan padanya untuk mengarahkan kehendak⁸⁷. Pengharapan sudah ada dalam iman, memang dilahirkan oleh iman. Kasih dalam kebenaran memupuk pengharapan dan sekaligus mewujudkannya. Sebagai anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma, pengharapan mengalir dalam hidup kita sebagai sesuatu yang bukan karena hak kita, sesuatu yang melampaui setiap hukum keadilan. Anugerah pada hakikatnya melebihi pahala, kaidahnya adalah keberlimpahan. Anugerah ada lebih dahulu

⁸⁵ Katekismus Gereja Katolik, 407; bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 25; *loc.cit.*, 822-824

⁸⁶ Bdk. No 17; *AAS* 99 (2007), 1000

⁸⁷ Bdk. *Ibid.*, 23; *loc.cit.*, 1004-1005

dalam jiwa kita sebagai tanda kehadiran Allah dalam diri kita, tanda akan apa yang diharapkanNya dari kita. Kebenaran – yang sama halnya dengan kasih, adalah anugerah– lebih besar daripada kita, sebagaimana Santo Agustinus mengajarkannya⁸⁸. Demikian juga kebenaran tentang diri kita sendiri, tentang kesadaran pribadi kita, pertama-tama *diberikan* kepada kita. Dalam setiap proses kognitif, kebenaran bukanlah sesuatu yang kita hasilkan, melainkan selalu yang kita temukan, atau lebih tepatnya, kita terima. Kebenaran, seperti cinta kasih, “tidak direncanakan atau diinginkan, melainkan ditetapkan pada manusia”⁸⁹.

Karena anugerah diterima oleh setiap orang, kasih dalam kebenaran adalah kekuatan yang membangun komunitas, menyatukan semua orang tanpa menetapkan halangan dan batas. Komunitas manusiawi yang kita bangun sendiri tidak pernah dapat, hanya dengan kekuatannya sendiri, menjadi komunitas persaudaraan sepenuhnya, tidak juga dapat mengatasi setiap pemisahan dan menjadi komunitas yang sungguh universal. Kesatuan umat manusia, persekutuan persaudaraan yang mengatasi segala perpecahan, diciptakan oleh Sabda Allah-yang-adalah-Kasih. Dalam menghadapi persoalan penting ini, kita harus memperjelas, di satu pihak, bahwa logika anugerah tidak meniadakan keadilan dan tidak juga hanya sekadar menyejajarkannya sebagai unsur kedua yang ditambahkan dari luar; di lain pihak, perkembangan ekonomi, sosial dan politik, jika harus sungguh-sungguh manusiawi, perlu memberi ruang bagi *prinsip kemurahan hati* sebagai ungkapan persaudaraan.

⁸⁸ St. Agustinus menjelaskan ajaran ini secara terperinci dalam dialognya mengenai kehendak bebas (*De libero arbitrio*, II, 3, 8 dst.). Ia menunjukkan eksistensi dalam jiwa manusia “perasaan dalam”. Perasaan ini terkandung dalam tindakan yang terpenuhi di luar fungsi normal akal budi, suatu tindakan yang bukan hasil refleksi, melainkan hampir instingtif, melalui akal budi, menyadari kodratnya yang fana dan dapat salah, mengakui keberadaan sesuatu yang kekal, yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri, sesuatu yang secara absolut benar dan pasti. Nama yang diberikan oleh St. Agustinus pada kebenaran interior ini adalah Nama Allah (*Confessions* X, 24, 35; XII, 25, 35; *De libero arbitrio* II, 3, 8), lebih sering dengan sebutan Kristus (*De magistro* II, 38; *Confessions* VII, 18, 24; XI, 2, 4).

⁸⁹ Benediktus XVI, Ensiklik *Deus Caritas Est*, 3; *loc.cit.* 219

35. *Pasar*, jika ada kepercayaan timbal-balik dan dikenal luas, adalah institusi ekonomi yang memungkinkan terjadinya pertemuan antarpribadi, karena mereka adalah subjek ekonomi yang menggunakan kontrak untuk mengatur relasi mereka ketika tukar-menukar barang dan jasa yang setara nilainya, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Pasar adalah subjek bagi prinsip dari apa yang disebut *keadilan komutatif*, yang mengatur relasi memberi dan menerima antara pihak-pihak dalam suatu transaksi. Namun, ajaran sosial Gereja terus-menerus menyoroti pentingnya *keadilan distributif* dan *keadilan sosial* untuk ekonomi pasar, tidak hanya karena hal itu masuk dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas, melainkan juga karena jaringan relasi yang lebih luas di mana hal itu terjadi. Sebenarnya, jika pasar diatur hanya dengan prinsip kesamaan nilai dari barang-barang yang dipertukarkan, tidak dapat menghasilkan ikatan sosial yang dibutuhkan agar berfungsi dengan baik. *Tanpa bentuk-bentuk internal akan solidaritas dan kepercayaan timbal-balik, pasar tidak dapat sepenuhnya melaksanakan fungsi ekonomis yang tepat.* Dewasa ini kepercayaan inilah yang telah hilang; dan hilangnya kepercayaan adalah suatu kerugian besar. Tepatlah bila Paulus VI, dalam *Populorum Progressio*, menekankan bahwa sistem ekonomi itu sendiri memperoleh manfaat dari penerapan keadilan yang berdaya jangkauan luas karena yang pertama-tama memperoleh manfaat dari perkembangan negara-negara miskin adalah negara-negara makmur⁹⁰. Menurut Paus, ini bukan hanya sekadar masalah memperbaiki disfungsi melalui bantuan. Orang miskin tidak boleh dianggap sebagai “beban”⁹¹, tetapi sebagai sumber daya, bahkan dari sudut pandang ekonomi semata. Namun demikian, juga salah beranggapan bahwa ekonomi pasar memiliki kebutuhan melekat akan kuota kemiskinan dan keterbelakangan agar dapat berfungsi paling baik. Kepentingan pasar adalah memajukan emansipasi, tetapi agar

⁹⁰ Bdk. No. 49; *loc.cit.*, 281

⁹¹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 28; *loc.cit.*, 827-828

dapat melakukannya secara efektif, pasar sungguh tidak dapat hanya bersandar pada dirinya sendiri, karena tidak mampu menghasilkan sendiri sesuatu yang melampaui kemampuannya. Pasar harus memperoleh kekuatan moralnya dari subjek lain yang mampu menghasilkannya.

36. Kegiatan ekonomi tidak dapat memecahkan semua masalah sosial melalui penerapan sederhana *logika pasar*. Hal ini perlu *diarahkan menuju pencapaian kesejahteraan umum*, yang juga harus menjadi tanggung jawab komunitas politik pada khususnya. Karena itu, harus diingat bahwa ketidakseimbangan yang parah terjadi ketika tindakan ekonomi, yang hanya dimengerti sebagai mesin pencipta kekayaan, dipisahkan dari tindakan politik, yang dimengerti sebagai alat pencari keadilan melalui redistribusi.

Gereja selalu menegaskan bahwa tindakan ekonomi tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang antisosial. Pada hakikatnya, pasar bukan dan karena itu tidak boleh menjadi tempat di mana yang kuat menindas yang lemah. Masyarakat tidak harus melindungi diri dari pasar, seolah-olah perkembangan pasar menyebabkan *ipso facto* kematian relasi manusiawi sejati. Tentu saja benar bahwa pasar dapat menjadi kekuatan negatif, bukan karena sifat dasarnya, tetapi karena ideologi tertentu dapat membuatnya demikian. Perlu diingat bahwa pasar tidak berada dalam kondisi murni. Pasar dibentuk oleh susunan budaya yang menetapkan dan mengarahkannya. Ekonomi dan keuangan, sebagai alat, dapat digunakan secara buruk ketika mereka yang berkuasa hanya dimotivasi oleh tujuan egois semata. Dengan demikian, alat yang dari dirinya sendiri baik dapat diubah menjadi alat yang merugikan. Tetapi gelapnya akal budi manusialah yang menghasilkan konsekuensi-konsekuensi ini, bukan alatnya *per se*. Maka, bukanlah alat yang harus bertanggung jawab, melainkan manusia, kesadaran moral mereka serta tanggung jawab pribadi dan sosial mereka.

Ajaran sosial Gereja menegaskan bahwa relasi sosial manusiawi yang sebenarnya akan persahabatan, solidaritas dan timbal-baliknya dapat juga dilakukan di dalam kegiatan

ekonomi, dan tidak hanya di luar atau “sesudah”-nya. Lingkungan ekonomi tidak netral secara etis, tidak juga bersifat tidak manusiawi dan antisosial. Lingkungan ekonomi adalah bagian dan bidang kegiatan manusia dan justru karena bersifat manusiawi, harus disusun dan diatur secara etis.

Tantangan besar di hadapan kita, diperkuat dengan masalah-masalah perkembangan di zaman global ini dan bahkan semakin mendesak karena krisis ekonomi dan keuangan, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa, dalam pikiran dan perilaku, tidak hanya prinsip-prinsip tradisional etika sosial seperti transparansi, kejujuran dan tanggung jawab tidak dapat diabaikan atau disepelekan, tetapi juga bahwa dalam *relasi komersial prinsip kemurahan hati* dan logika anugerah sebagai suatu ungkapan persaudaraan dapat dan harus *menemukan tempatnya dalam kegiatan ekonomi normal*. Ini adalah tuntutan manusiawi pada zaman sekarang, tetapi juga dituntut oleh logika ekonomi. Ini adalah tuntutan baik kasih maupun kebenaran.

37. Ajaran sosial Gereja selalu menegaskan bahwa *keadilan harus diterapkan di setiap tahap kegiatan ekonomi*, karena hal ini selalu berkaitan dengan manusia dan kebutuhannya. Penempatan sumber-sumber daya, pembiayaan, produksi, konsumsi dan semua tahap lain dalam siklus ekonomi, mau tak mau mempunyai implikasi moral. *Dengan demikian setiap keputusan ekonomi mempunyai konsekuensi moral*. Ilmu pengetahuan sosial dan tren ekonomi dewasa ini juga mengarah kepada kesimpulan yang sama. Mungkin pada suatu waktu pernah dipikirkan bahwa pertama-tama ekonomi dipercaya untuk menghasilkan kekayaan dan politik bertugas membagikannya. Sekarang, hal itu menjadi lebih sulit, mengingat kegiatan ekonomi tidak lagi dibatasi dalam batas teritorial, sedangkan kekuasaan pemerintah pada prinsipnya tetap bersifat lokal. Oleh karena itu, hukum-hukum keadilan harus dihormati sejak awal, ketika proses ekonomi dilaksanakan, dan bukan hanya sesudahnya atau secara kebetulan. Selanjutnya, perlu juga diciptakan ruang dalam pasar untuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh subjek

yang secara bebas memilih bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda dari prinsip yang murni mencari keuntungan, tanpa mengorbankan produksi nilai ekonomis dalam proses tersebut. Banyak entitas ekonomi yang berasal dari prakarsa kaum religius dan awam memperlihatkan bahwa hal ini secara konkret dimungkinkan.

Di zaman global ini, ekonomi dipengaruhi oleh model-model kompetitif yang terikat dengan budaya yang sangat berbeda-beda. Aneka macam bentuk usaha ekonomi yang berkembang mendapatkan titik temu utamanya dalam keadilan komutatif. *Kehidupan ekonomi* pasti menuntut *kontrak*, untuk mengatur hubungan pertukaran antarbarang yang bernilai setara. Tetapi hal itu juga memerlukan *hukum yang adil* dan *bentuk-bentuk redistribusi* yang diatur oleh politik, dan terlebih lagi, membutuhkan karya-karya yang ditandai oleh *semangat pemberian*. Ekonomi di zaman global tampak mengistimewakan logika sebelumnya, yaitu pertukaran kontrak, tetapi langsung atau tidak langsung juga memperlihatkan kebutuhannya terhadap dua hal lainnya: logika politik dan logika pemberian tak bersyarat.

38. Pendahulu saya Yohanes Paulus II memberi perhatian pada masalah ini dalam *Centesimus Annus*, ketika beliau berbicara tentang perlunya sebuah sistem dengan tiga subjek: *pasar*, *negara*, dan *masyarakat sipil*⁹². Beliau melihat masyarakat sipil sebagai lingkungan yang paling alami untuk ekonomi kemurahan hati dan persaudaraan, tetapi tidak bermaksud menolak dua lingkungan lainnya. Sekarang ini kita dapat mengatakan bahwa kehidupan perekonomian harus dipahami sebagai sebuah fenomena multidimensi: dalam setiap dimensi, dengan aneka macam tingkatan dan dengan cara tertentu yang sesuai dengan tingkatannya, harus ada aspek persaudaraan timbal-balik. Di zaman global, kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kemurahan hati, yang mengembangkan dan menyebarkan solidaritas dan tanggung jawab untuk keadilan dan kesejahteraan umum di antara para pelaku ekonomi yang

⁹² Bdk. no. 35; *loc.cit.*, 836-838

beragam. Hal ini jelas merupakan bentuk khusus dan mendalam dari demokrasi ekonomi. Solidaritas adalah pertama-tama dan terutama rasa tanggung jawab setiap orang terhadap semua orang⁹³, dan karena itu tidak dapat hanya didelegasikan pada negara. Sementara di masa lalu dimungkinkan memperdebatkan apakah keadilan harus tercapai lebih dahulu dan kemurahan hati baru dapat terjadi sesudahnya, sebagai pelengkap; sekarang jelas bahwa tanpa kemurahan hati sama sekali tidak akan ada keadilan. Karena itu, apa yang diperlukan adalah pasar yang memungkinkan pelaksanaan bebas, dalam kondisi kesempatan yang sama, usaha-usaha untuk mencapai aneka macam tujuan kelembagaan. Selain perusahaan swasta yang berorientasi pada laba dan aneka macam perusahaan publik, harus ada ruang bagi entitas komersial yang berdasarkan prinsip keuntungan timbal-balik dan pencapaian tujuan sosial agar dapat mengakar dan mengungkapkan diri. Dari pertemuan timbal-balik dalam pasarlah orang dapat mengharapkan munculnya bentuk persilangan perilaku komersial dan karenanya perhatian terhadap cara-cara *membudayakan perekonomian*. Kasih dalam kebenaran, dalam hal ini, menuntut bahwa bentuk dan struktur yang diberikan pada kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut, tanpa menolak laba, bertujuan melampaui sekadar logika pertukaran barang yang setara, serta laba sebagai tujuan itu sendiri.

39. Paulus VI dalam *Populorum Progressio* meminta untuk membuat *sebuah model perekonomian pasar yang mampu mencakup semua bangsa dalam jangkauannya dan bukan hanya mereka yang keadaannya lebih baik*. Beliau meminta upaya-upaya untuk membangun dunia yang lebih manusiawi bagi semua orang, dunia di mana “semua orang akan mampu memberi dan menerima, sehingga kemajuan pihak-pihak tertentu tidak diperoleh dengan merugikan pihak-pihak lain”⁹⁴. Dengan cara ini beliau menerapkan secara global

⁹³ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 38; *loc.cit.*, 565-566

⁹⁴ No. 44; *loc.cit.*, 279

pandangan dan cita-cita yang tercantum dalam *Rerum Novarum*, yang ditulis ketika, sebagai akibat Revolusi Industri, gagasan tersebut pertama kalinya diajukan –agak lebih maju dari zamannya– bahwa tata masyarakat sipil, demi tegaknya peraturannya sendiri, juga memerlukan campur tangan Negara untuk tujuan redistribusi. Kini visi ini, selain terancam oleh proses keterbukaan pasar dan masyarakat, juga ternyata tidak cukup memenuhi tuntutan ekonomi manusiawi sepenuhnya. Apa yang selalu didukung oleh ajaran sosial Gereja, berdasarkan visinya akan manusia dan masyarakat, juga sekarang diperkuat oleh dinamika globalisasi.

Ketika, baik logika pasar maupun logika negara setuju bahwa masing-masing akan tetap melaksanakan monopoli atas wilayah pengaruh masing-masing, dalam jangka panjang akan banyak yang hilang: solidaritas dalam relasi antarwarga negara, peran serta dan ketaatan, tindakan-tindakan kemurahan hati, semua hal yang berlawanan dengan *memberi agar mendapatkan* (logika pertukaran) dan *memberi karena kewajiban* (logika kewajiban umum, yang ditetapkan oleh hukum negara). Untuk mengalahkan keterbelakangan, dituntut tindakan tidak hanya untuk meningkatkan transaksi berdasarkan pertukaran dan untuk mengubah struktur pelayanan umum, tetapi terutama untuk secara bertahap *meningkatkan keterbukaan, di tingkat dunia, terhadap bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang ditandai oleh kemurahan hati dan persekutuan*. Model pasangan eksklusif pasar-negara menghancurkan masyarakat, sedangkan bentuk ekonomi yang berdasarkan pada solidaritas, yang menemukan tempat alamiahnya di dalam masyarakat sipil tanpa dibatasi untuk itu, membangun masyarakat. Pasar kemurahan hati tidak ada, dan sikap kemurahan hati tidak dapat ditentukan oleh hukum. Namun, baik pasar maupun politik membutuhkan pribadi-pribadi yang terbuka bagi pemberian timbal-balik.

40. Kenyataan dinamis perekonomian internasional sekarang ini, yang ditandai oleh penyimpangan dan kegagalan berat, *membutuhkan cara yang sungguh-sungguh baru dalam memahami perusahaan bisnis*. Model lama hilang, tetapi

muncul model baru yang menjanjikan di masa depan. Tanpa diragukan, salah satu risiko terbesar bagi bidang usaha adalah jika mereka secara eksklusif menanggapi para investor, dan dengan demikian membatasi nilai-nilai sosial mereka. Karena pertumbuhan dalam skala dan meningkatnya kebutuhan modal, semakin jarang perusahaan-perusahaan bisnis berada di tangan direktur yang tangguh, yang merasa bertanggung jawab dalam jangka panjang, tidak hanya jangka pendek, terhadap kehidupan dan hasil-hasil perusahaannya, dan semakin jarang usaha-usaha bergantung pada satu wilayah tertentu. Lebih dari itu, apa yang sering disebut alihdaya produksi (*outsourcing production*) dapat melemahkan rasa tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*) –yaitu para pekerja, pemasok, pembeli, lingkungan alam dan masyarakat luas–, demi para pemegang saham (*shareholders*), yang tidak terikat pada suatu wilayah geografis tertentu dan karenanya memiliki mobilitas yang luar biasa. Pasar modal internasional saat ini menawarkan kebebasan besar dalam kegiatan. Memang benar bahwa juga ada peningkatan kesadaran akan perlunya *tanggung jawab sosial* yang lebih besar di pihak perusahaan. Bahkan jika prinsip pertimbangan etis yang sekarang ini mewarnai debat mengenai tanggung jawab sosial dunia usaha, tidak semuanya diterima menurut perspektif ajaran sosial Gereja, namun demikian ada perkembangan keyakinan bahwa *tata kelola usaha tidak dapat hanya memerhatikan kepentingan para pemilik perusahaan, tetapi juga harus bertanggung jawab untuk semua pemangku kepentingan yang lain, yang memberi sumbangan untuk memajukan kehidupan usaha*: para pekerja, klien, pemasok aneka unsur produksi, komunitas rujukan. Beberapa tahun terakhir ini kelas kosmopolitan baru, para manajer telah muncul, yang sering hanya bertanggung jawab pada para pemilik saham yang pada umumnya terdiri dari dana-dana anonim yang *de facto* menentukan gaji mereka. Meskipun demikian, sebaliknya sekarang ini banyak manajer yang berpandangan jauh semakin menyadari ikatan mendalam antara perusahaan mereka dan wilayah atau wilayah-wilayah di mana perusahaan itu beroperasi. Paulus VI mengajak orang-

orang untuk memberi perhatian serius pada kerugian bagi negara asal yang disebabkan oleh karena pengalihan modal ke luar negeri yang dilakukan semata-mata untuk keuntungan pribadi⁹⁵. Yohanes Paulus II mengajarkan bahwa *investasi selalu memiliki makna moral, sekaligus makna ekonomis*.⁹⁶ Semua ini –semestinya ditekankan– masih berlaku saat ini, meskipun pasar modal telah menjadi liberal, dan pemikiran teknologi modern dapat menyarankan bahwa investasi hanyalah tindakan teknis, bukan tindakan manusiawi dan etis. Tidak ada alasan untuk menolak bahwa sejumlah modal tertentu dapat menghasilkan kebaikan, bila modal itu diinvestasikan di luar negeri daripada di dalam negeri. Namun persyaratan keadilan harus dilindungi, dengan memerhatikan cara bagaimana modal itu dihasilkan dan kerugian terhadap banyak orang yang akan terjadi jika modal tidak digunakan di tempat di mana dihasilkan⁹⁷. Yang seharusnya dihindari adalah pemanfaatan spekulatif *sumber keuangan* yang menimbulkan godaan untuk sekadar mencari laba jangka pendek, tanpa memerhatikan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang, manfaatnya terhadap perekonomian riil dan perhatiannya pada kemajuan, dengan cara-cara yang sesuai dan tepat, prakarsa-prakarsa ekonomi di negara-negara yang membutuhkan pembangunan. Tak ada alasan untuk menyangkal bahwa relokasi investasi dan keahlian dapat menguntungkan rakyat dari negara yang menerimanya. Tenaga kerja dan pengetahuan teknis adalah kebutuhan universal. Memang tidak tepat mengekspor hal-hal ini hanya demi memperoleh kondisi yang menguntungkan, atau lebih buruk lagi untuk tujuan eksploitasi, tanpa memberikan sumbangan nyata bagi masyarakat setempat dengan membantu menghasilkan sistem produksi dan sosial yang kuat, faktor utama untuk pembangunan yang stabil.

⁹⁵ Bdk. *Ibid.*, 24; *loc.cit.*, 269

⁹⁶ Bdk. Ensiklik *Centesimus Annus*, 36; *loc.cit.*, 838-840

⁹⁷ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 24; *loc.cit.*, 269

41. Dalam konteks pembicaraan ini, sangatlah berguna melihat bahwa: *perusahaan bisnis* mempunyai dan harus *mencakup berbagai macam nilai, yang* senantiasa semakin luas. Hegemoni yang terus-menerus dari model pasangan pasar-negara telah menjadikan kita biasa berpikir tentang pengusaha swasta tipe kapitalis di satu pihak dan pemimpin negara di lain pihak. Kenyataannya bisnis harus dimengerti dengan cara yang jelas. Ada serangkaian alasan metaekonomi, untuk mengatakan hal ini. Kegiatan bisnis mempunyai makna manusiawi, mendahului makna profesional⁹⁸. Makna ini ada dalam semua pekerjaan, yang dimengerti sebagai tindakan pribadi, suatu *actus personae*⁹⁹. Itulah sebabnya setiap pekerja semestinya memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangannya, mengingat bahwa bagaimanapun juga “ia tahu sedang bekerja untuk dirinya sendiri”¹⁰⁰. Dengan alasan yang bagus, Paulus VI mengajarkan bahwa “setiap pekerja adalah seorang pencipta”¹⁰¹. Untuk menanggapi kebutuhan dan martabat pekerja serta kebutuhan masyarakat, ada berbagai jenis badan usaha, yang jauh melampaui perbedaan sederhana antara “swasta” dan “umum”. Masing-masing menuntut dan memperlihatkan kemampuan usaha khusus. Dalam rangka membangun perekonomian masa depan yang akan segera melayani kesejahteraan umum secara nasional dan global, pantaslah mempertimbangkan arti luas kegiatan bisnis ini. Konsep yang lebih luas ini mendukung pertukaran dan pembelajaran timbal-balik antar berbagai jenis kegiatan usaha, dengan pengalihan kompetensi dari dunia *nirlaba* ke dunia *laba* dan sebaliknya, dari dunia publik ke dunia masyarakat sipil, dari dunia ekonomi maju ke negara-negara yang sedang berkembang.

Kekuasaan politik juga memiliki berbagai *macam nilai*, yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan tatanan baru produktivitas ekonomi, yang bertanggung jawab

⁹⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 32; *loc.cit.*, 832-833; Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 25; *loc.cit.*, 269-270

⁹⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 24; *loc.cit.*, 637-638

¹⁰⁰ *Ibid.*, 15; *loc. cit.*, 616-618

¹⁰¹ Ensiklik *Populorum Progressio*, 27; *loc.cit.*, 271

secara sosial dan manusiawi. Seperti halnya mengembangkan beraneka ragam bentuk kegiatan bisnis pada tingkat dunia, demikian juga kita harus meningkatkan penyebaran kekuasaan politik yang efektif di berbagai tingkatan. Perekonomian terpadu zaman ini tidak menghilangkan peran negara, melainkan perekonomian mengikat pemerintah-pemerintah untuk bekerja sama secara lebih erat. Kebijakan dan kehati-hatian menyarankan untuk tidak terlalu tergesa-gesa menyatakan berakhirnya suatu negara. Dalam rangka penyelesaian krisis saat ini, peran negara tampak berkembang, dengan mendapatkan kembali kompetensi-kompetensinya. Lebih-lebih lagi, di beberapa negara pembangunan atau pembangunan kembali negara tetap menjadi faktor utama pembangunan mereka. *Bantuan internasional*, dalam rencana berdasar solidaritas untuk mengatasi persoalan ekonomi saat ini, seharusnya lebih memperkuat sistem konstitusional, yuridis, administratif di negara-negara yang belum sepenuhnya menikmati kesejahteraan. Bersamaan dengan bantuan ekonomi, perlu ada bantuan untuk memperkuat jaminan yang tepat bagi *negara hukum*: sistem tatanan publik dan hukuman penjara efektif yang menghormati hak-hak asasi manusia, lembaga-lembaga yang sungguh demokratis. Tidak perlu bahwa negara mempunyai sifat-sifat yang sama di mana-mana: dukungan yang bertujuan untuk memperkuat sistem konstitusional yang lemah dapat dengan mudah disertai dengan perkembangan subjek politik lainnya, budaya, sosial, teritorial atau agama, di samping negara. Artikulasi kekuasaan politik di tingkat lokal, nasional, dan internasional adalah salah satu cara terbaik untuk mengarahkan pada proses globalisasi ekonomi. Ini juga merupakan cara untuk meyakinkan bahwa hal itu sesungguhnya tidak merusak dasar-dasar demokrasi.

42. Kadang-kadang *globalisasi* dipandang sebagai istilah yang fatalistik, seakan-akan dinamika yang terlibat adalah hasil kekuatan-kekuatan impersonal anonim atau struktur-struktur

yang tidak tergantung dari kehendak manusiawi¹⁰². Berkaitan dengan hal ini perlulah mengingat bahwa globalisasi dimengerti sebagai proses sosioekonomi, walaupun sebetulnya itu bukan dimensi satu-satunya. Di bawah proses yang lebih kasat mata, umat manusia menjadi semakin saling terkait; kemanusiaan dibangun oleh orang perorangan dan masyarakat yang menerima manfaat dan pembangunan dari proses ini¹⁰³, karena merekalah yang memikul tanggung jawab masing-masing, sendiri-sendiri dan bersama-sama. Pendobrakan batas-batas tidak hanya sekadar fakta material, tetapi juga budaya, baik dalam penyebab maupun dampaknya. Jika globalisasi dipandang dari sudut pandang deterministik, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengarahkan jadi hilang. Sebagai suatu realitas manusiawi, globalisasi merupakan hasil kecenderungan budaya yang bermacam-macam, yang perlu tunduk pada proses menimbang-nimbang. Kebenaran globalisasi sebagai sebuah proses dan kriteria etis dasarnya diberikan oleh persatuan keluarga umat manusia dan pengembangannya menuju apa yang baik. Karena itu komitmen yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk *memajukan proses budaya yang berdasar pada pribadi dan berorientasi pada masyarakat, yang terbuka pada transendensi, proses integrasi dunia*.

Selain beberapa dimensi strukturalnya, yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat juga dimutlakkan, "globalisasi, *a priori*, tidak baik dan tidak buruk. Globalisasi akan menjadi seperti apa yang dikehendaki orang-orang terhadapnya¹⁰⁴. Kita tidak boleh menjadi korbannya, tetapi pelaku utama, dengan bertindak wajar, dibimbing oleh kasih dan kebenaran. Perlawanan yang membabi-buta bisa menjadi tindakan yang salah dan merugikan, tidak mampu mengenali aspek-aspek positif dari proses itu, dengan risiko kehilangan kesempatan

¹⁰² Bdk. Kongregasi Ajaran Iman, Instruksi tentang Kebebasan dan Pembebasan Kristiani *Libertatis Conscientia* (22 Maret 1987), 74; AAS 79 (1987), 587

¹⁰³ Bdk. Yohanes Paulus II, Wawancara yang dipublikasikan di surat kabar Katolik, *La Croix*, 20 Agustus 1997

¹⁰⁴ Yohanes Paulus II, *Pidato Sambutan kepada Akademi Kepausan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 27 April 2001

mendapatkan keuntungan dari beberapa peluang perkembangannya. Proses globalisasi, yang dimengerti dan diarahkan dengan semestinya, memberi kemungkinan yang belum pernah terjadi sebelumnya, akan pembagian kembali dalam skala besar kekayaan tingkat dunia; namun apabila ditangani secara buruk, proses tersebut dapat menimbulkan peningkatan kemiskinan dan kesenjangan, dan bahkan dapat menyebabkan krisis dunia. Kiranya perlu *memperbaiki kegagalan*, beberapa di antaranya serius, yang menyebabkan pemisahan baru antara masyarakat dan dalam masyarakat, dan juga menjamin bahwa pembagian kembali kekayaan tidak menjadi pembagian atau peningkatan kemiskinan: suatu bahaya nyata jika situasi sekarang ini dikelola dengan buruk. Untuk waktu yang lama dianggap bahwa bangsa-bangsa miskin tetap tinggal pada tahap tertentu dalam pembangunan, dan harus puas menerima bantuan amal kasih bangsa-bangsa maju. Paulus VI dengan tegas melawan mentalitas ini dalam *Populorum Progressio*. Sekarang ini sumber-sumber material yang tersedia untuk menyelamatkan bangsa-bangsa ini dari kemiskinan secara potensial lebih besar daripada sebelumnya, tetapi sumber-sumber itu sebagian besar berakhir di tangan masyarakat negara-negara maju, yang memperoleh keuntungan lebih besar dari liberalisasi yang terjadi dalam mobilitas modal dan tenaga kerja. Maka, penyebaran bentuk-bentuk kemakmuran di seluruh dunia seharusnya tidak dihambat oleh proyek-proyek yang egois, proteksionis atau demi pemenuhan kepentingan pribadi. Sesungguhnya, keterlibatan negara-negara yang sedang bertumbuh dan berkembang memungkinkan kita untuk mengendalikan krisis secara lebih baik sekarang ini. Peralihan yang terjadi dalam proses globalisasi memunculkan kesulitan dan bahaya besar, yang dapat diatasi hanya jika kita mampu menempatkan secara wajar roh antropologis dan etis, yang mendorong globalisasi menuju tujuan solidaritas manusiawi. Sayangnya, roh ini sering dibanjiri atau ditekan oleh pertimbangan-pertimbangan etis dan budaya dari sifat individualistis dan utilitarian. Globalisasi adalah sebuah fenomena multidimensi dan kompleks, yang harus dipahami dalam keberagaman dan

kesatuan semua dimensinya, termasuk dimensi teologi. Pemahaman yang demikian memungkinkan kita untuk *mengalami dan mengarahkan globalisasi kemanusiaan dalam hal hubungan, persekutuan dan berbagi harta benda.*

BAB EMPAT

PERKEMBANGAN BANGSA-BANGSA HAK DAN KEWAJIBAN LINGKUNGAN

43. "Kenyataan solidaritas manusia tidak hanya membawa keuntungan, tetapi juga kewajiban."¹⁰⁵ Banyak orang sekarang ini cenderung berdalih tidak mempunyai kewajiban apa pun terhadap siapa pun, kecuali diri sendiri. Mereka hanya peduli terhadap hak-hak mereka sendiri dan mereka sering mengalami kesulitan besar untuk bertanggung jawab terhadap perkembangan integral diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, penting menyerukan sebuah refleksi baru tentang bagaimana *hak-hak mensyaratkan kewajiban, jika tidak akan menjadi sewenang-wenang*¹⁰⁶ Dewasa ini kita sedang menyaksikan suatu inkonsistensi yang berat. Di satu sisi, seruan dibuat untuk hak-hak yang dituntut, yang bersifat sewenang-wenang dan kurang penting, yang disertai dengan permintaan dia-kui dan didukung oleh struktur publik; sementara di lain sisi, hak-hak dasar dan fundamental tetap tidak diakui dan dilanggar oleh sebagian besar dunia¹⁰⁷. Sering tampak adanya keterkaitan antara seruan mengenai "hak yang berlebihan" atau bahkan pelanggaran dan keburukan, di dalam masyarakat makmur, dan kekurangan makanan, air minum, pendidikan dasar atau layanan kesehatan dasar di beberapa wilayah negara-negara terbelakang dan juga di daerah-daerah pinggiran kota besar metropolitan. Keterkaitan tersebut dalam hal ini: hak-hak pribadi, bila dilepaskan dari konteks

¹⁰⁵ Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 17; *loc.cit.*, 265-266

¹⁰⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, *Pesan Hari Perdamaian Sedunia 2003*, 5; *AAS*, 95 (2003), 343

¹⁰⁷ Bdk. *Ibid.*,

kewajiban yang memberinya arti penuh, dapat membuatnya tak terkendali, yang meningkatkan tuntutan-tuntutan yang tak terbatas dan tidak pandang bulu. Penekanan yang berlebihan atas hak-hak mengarah pada pengabaian terhadap kewajiban. Kewajiban membatasi hak karena mengacu pada kerangka antropologis dan etis di mana kebenaran menjadi bagiannya dan dengan demikian tidak menjadi sewenang-wenang. Untuk itulah, kewajiban memperkuat hak-hak dan menganjurkan perlindungan dan kemajuannya sebagai tugas yang harus dilaksanakan untuk melayani kesejahteraan umum. Sebaliknya, jika dasar hak-hak manusia ditemukan hanya dalam pertimbangan-pertimbangan sidang rakyat, hak-hak itu dapat berubah setiap waktu, dan dengan demikian kewajiban menghormati dan mencapainya hilang dari kesadaran umum. Pemerintah dan organisasi-organisasi internasional kemudian dapat melupakan objektivitas dan “tak dapat diganggu-gugatnya” hak-hak. Jika hal ini terjadi, perkembangan sejati bangsa-bangsa terancam¹⁰⁸. Perilaku serupa membahayakan otoritas badan-badan internasional, terutama di mata negara-negara yang paling membutuhkan pembangunan. Dalam kenyataannya, hal ini menuntut komunitas internasional menerimanya sebagai kewajiban membantu mereka untuk menjadi “pembangun hari depan mereka sendiri”¹⁰⁹, yaitu untuk mengambil kewajiban mereka sendiri. *Berbagi kewajiban timbal-balik merupakan pendorong yang sangat kuat terhadap tindakan daripada hanya sekadar penegasan hak-hak.*

44. Konsep tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam pembangunan harus memerhatikan juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan *pertumbuhan penduduk*. Ini merupakan aspek yang sangat penting dari perkembangan sejati, karena berkaitan dengan nilai-nilai hidup dan keluarga yang tak dapat diganggu-gugat¹¹⁰. Menganggap bahwa pertambahan

¹⁰⁸ Bdk. Benediktus XVI, *Pesan Hari Perdamaian Sedunia 2007*, 13; *loc.cit.*, 781-782

¹⁰⁹ Paulus VI, *Ensiklik Populorum Progressio*, 65; *loc.cit.*, 289

¹¹⁰ Bdk. *ibid.*, 36-37; *loc.cit.*, 275-276

penduduk sebagai penyebab utama keterbelakangan adalah keliru, bahkan juga dari sudut pandang ekonomi. Cukup memikirkan, di satu sisi, pengurangan signifikan angka kematian bayi dan peningkatan harapan hidup rata-rata yang ditemukan di negara-negara berkembang secara ekonomi; dan di sisi lain, tanda-tanda krisis yang bisa diamati di masyarakat di mana terjadi penurunan angka kelahiran yang mengkhawatirkan. Karena itu perhatian harus sungguh-sungguh diberikan terhadap prokreasi yang bertanggung jawab, yang di antara hal-hal lain memberi sumbangan positif untuk pengembangan manusia seutuhnya. Gereja, yang mempunyai perhatian terhadap perkembangan sejati manusia, mendesak penghormatan sepenuhnya terhadap nilai-nilai manusia dalam menghayati seksualitas; tidak boleh menurunkannya hanya pada tataran kepuasan dan hiburan. Demikian juga, pendidikan seksual tidak boleh direduksi hanya sebagai suatu instruksi teknis belaka, dengan tujuan hanya untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dari kemungkinan terjangkitnya penyakit atau “risiko” kehamilan. Hal itu sama dengan memiskinkan dan mengabaikan makna seksualitas yang lebih dalam, yang seharusnya justru diakui dan diterima secara bertanggung jawab, baik oleh pribadi maupun komunitas. Kenyataannya, penolakan tanggung jawab terjadi karena mempertimbangkan seksualitas hanya sebagai sumber kesenangan, dan mengaturnya dengan kekuatan politik untuk mengontrol kelahiran. Dalam kedua kasus itu ada konsep-konsep dan politik materialistis, di mana orang akhirnya mengalami berbagai macam bentuk kekerasan. Untuk melawan politik seperti itu, haruslah mempertahankan wewenang utama keluarga dalam bidang seksualitas¹¹¹, juga melawan negara dan politiknya yang membatasi, serta menjamin bahwa orangtua disiapkan selayaknya untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.

Keterbukaan terhadap kehidupan yang bertanggung jawab secara moral merupakan kekayaan sosial dan ekonomi. Bangsa yang padat penduduknya dapat keluar dari kemiskinan dan

¹¹¹ Bdk. *ibid.*, 37; *loc.cit.*, 275-276

justru berterima kasih karena besarnya jumlah dan kemampuan penduduk mereka. Sebaliknya, beberapa bangsa yang dulunya makmur mengalami satu tahap ketidakpastian dan dalam beberapa kasus merosot, terutama karena penurunan angka kelahiran; hal ini menjadi persoalan rumit bagi masyarakat yang sangat makmur. Merosotnya kelahiran, sampai di bawah yang kadang-kadang disebut “tingkat penggantian” (*replacement level*), juga menyebabkan krisis pada sistem kesejahteraan sosial, meningkatkan biaya hidup, mengurangi tabungan dan konsekuensinya sumber keuangan yang dibutuhkan untuk investasi, menurunkan ketersediaan tenaga kerja yang bermutu, mendangkalkan “intelegenesi” yang daripadanya bangsa-bangsa dapat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, keluarga-keluarga kecil, dan kadang-kadang sangat kecil, mempunyai risiko memiskinkan relasi sosial, dan tidak menjamin bentuk solidaritas yang efektif. Situasi ini merupakan gejala-gejala rendahnya kepercayaan diri di masa depan, begitu juga kelelahan moral. Oleh karena itu, menjadi sebuah kebutuhan sosial, bahkan juga ekonomi, untuk menyampaikan kepada generasi masa depan keindahan keluarga dan perkawinan, dan kenyataan bahwa dua lembaga ini menanggapi kebutuhan terdalam dan martabat pribadi. Dari sudut pandang ini, negara dipanggil untuk *menetapkan kebijaksanaan yang memajukan sentralitas dan integritas keluarga* yang dibangun di atas perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sel utama dan sangat penting bagi masyarakat¹¹² dan memikul tanggung jawab terhadap persoalan ekonomi dan keuangannya, dengan menghormati karakter relasionalnya yang mendasar.

45. Memenuhi kebutuhan moral terdalam pribadi juga mempunyai akibat penting dan menguntungkan pada tingkat ekonomi. *Ekonomi memerlukan etika supaya dapat berfungsi secara benar* – bukan sembarangan etika, tetapi sebuah etika yang berpusat pada manusia. Sekarang ini kita mendengar banyak pembicaraan mengenai etika dalam dunia ekonomi, keuangan

¹¹² Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit Kerasulan Awam *Apostolicam Actuositatem*, 11.

dan bisnis. Pusat-pusat penelitian dan seminar-seminar dalam etika bisnis meningkat; sistem sertifikasi etis sedang menyebar ke seluruh dunia berkembang sebagai bagian dari gerakan ide-ide yang berhubungan dengan tanggung jawab bisnis terhadap masyarakat. Bank-bank menganjurkan rekening dan dana investasi yang “etis”. “Pembiayaan yang etis” dikembangkan, istimewa melalui kredit mikro dan secara lebih umum, keuangan mikro. Proses-proses ini patut dipuji dan pantas didukung. Akibat-akibat positifnya juga dirasakan di wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Namun, dianjurkan mengembangkan sebuah kriteria pertimbangan yang sehat, karena kata sifat “etis” dapat disalahgunakan. Ketika kata itu digunakan secara umum, dapat menimbulkan sejumlah penafsiran, bahkan pada titik di mana kata itu mencakup keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang bertentangan dengan keadilan dan kesejahteraan manusia yang sejati.

Kenyataannya, banyak hal tergantung pada sistem moral. Terhadap persoalan ini ajaran sosial Gereja dapat memberi sumbangan khusus, karena ajaran ini berdasarkan penciptaan manusia “menurut gambar Allah” (Kej. 1:27), sebuah *data*, yang melahirkan martabat pribadi manusia yang tak dapat diganggu gugat dan nilai transenden dari norma-norma moral kodrati. Ketika etika bisnis menyimpang dari dua pilar ini, maka secara tak terelakkan akan berisiko kehilangan sifatnya yang khas dan terjerumus pada bentuk eksploitasi; lebih khusus lagi, berisiko tunduk pada sistem ekonomi dan keuangan yang ada daripada memperbaiki aspek-aspeknya yang tidak berfungsi. Selain itu, etika bisnis berisiko dipergunakan untuk membenarkan pembiayaan proyek-proyek yang dalam kenyataannya tidak etis. Maka, kata “etis” semestinya tidak digunakan untuk membuat perbedaan ideologis, seolah-olah menyatakan bahwa inisiatif yang secara formal tidak ditunjuk, akan menjadi tidak etis. Usaha-usaha dibutuhkan –dan penting untuk mengatakan hal ini– tidak hanya untuk menciptakan sektor-sektor atau segmen-segmen “etis” perekonomian atau dunia keuangan, tetapi untuk menjamin bahwa keseluruhan perekonomian –keseluruhan keuangan– adalah etis, tidak hanya karena label luar, tetapi

karena rasa hormat terhadap syarat-syarat yang melekat pada sifatnya sendiri. Ajaran sosial Gereja cukup jelas mengenai persoalan ini, dengan mengingat bahwa perekonomian, dengan semua cabangnya, merupakan sektor kegiatan manusiawi¹¹³.

46. Apabila kita memikirkan masalah yang tercakup dalam *hubungan antara bisnis dan etika*, juga evolusi yang terjadi sekarang ini dalam metode produksi, akan tampak bahwa pembedaan yang sah antara perusahaan yang bertujuan mencari laba dan organisasi nirlaba tidak dapat lagi sepenuhnya bersikap adil terhadap kenyataan, atau menawarkan arahan praktis untuk masa depan. Dalam beberapa dekade terakhir ini muncul wilayah tengah yang luas antara dua jenis perusahaan tersebut. Wilayah tengah ini dibentuk oleh perusahaan-perusahaan tradisional yang tetap menyetujui kesepakatan bantuan sosial dalam mendukung negara-negara terbelakang, yayasan-yayasan amal yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan pribadi, kelompok-kelompok perusahaan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, dan dari bermacam-macam dunia yang disebut "ekonomi sipil" dan "ekonomi persekutuan". Hal ini bukan semata-mata masalah "sektor ketiga", tetapi merupakan sebuah realitas majemuk baru yang lebih luas yang mencakup lingkungan pribadi dan publik, dan yang tidak meniadakan laba, tetapi justru mempertimbangkannya sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan dan sosial. Apakah perusahaan-perusahaan seperti itu membagikan dividen atau tidak, apakah struktur yuridis mereka sesuai dengan satu bentuk yang sudah ditetapkan atau yang lain, menjadi sekunder dalam hubungannya dengan kesediaan mereka untuk memandang laba sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan yang lebih memanusiawikan pasar dan masyarakat. Dapat diharapkan bahwa jenis-jenis baru dari perusahaan ini akan berhasil dalam menemukan struktur

¹¹³ Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 14; *loc.cit.*, 264; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 32; *loc.cit.*; 832-833.

yuridis dan fiskal yang sesuai di setiap negara. Tanpa mengurangi pentingnya manfaat ekonomis dan sosial dari bentuk-bentuk usaha yang lebih tradisional, jenis-jenis baru usaha ini mengendalikan sistem untuk memikul tugas yang lebih jelas dan lebih penuh di pihak pelaku ekonomi. Tidak hanya itu saja. *Bentuk-bentuk kelembagaan usaha yang sangat beraneka ragam memunculkan pasar yang tidak hanya lebih beradab, tetapi juga lebih kompetitif.*

47. Penguatan pelbagai macam jenis usaha, khususnya jenis-jenis yang mampu memandang laba sebagai suatu sarana mencapai tujuan untuk sebuah pasar dan masyarakat yang lebih manusiawi, juga harus diupayakan di negara-negara yang menderita karena diabaikan atau dipinggirkan dari lingkaran perekonomian dunia. Di negara-negara ini sangat penting melanjutkan proyek-proyek berdasar subsidiaritas, yang direncanakan dan dikelola secara tepat, bertujuan untuk memperkuat hak-hak, tetapi juga kesediaan untuk mengemban tanggung jawab yang sesuai. Dalam *program-program pengembangan*, prinsip *sentralitas pribadi manusia*, sebagai subjek yang terutama bertanggung jawab dalam tugas pengembangan, harus dipelihara. Perhatian utama adalah meningkatkan kondisi kehidupan aktual masyarakat di suatu wilayah tertentu, sehingga membuat mereka mampu melaksanakan tanggung jawab mereka, yang karena kemiskinannya saat ini mereka tidak mampu memenuhinya. Perhatian sosial tidak pernah boleh menjadi suatu sikap abstrak. Program pengembangan, agar dapat disesuaikan dengan situasi individu, harus fleksibel; dan orang-orang yang memperoleh manfaat darinya seharusnya ikut terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Juga perlu menerapkan kriteria-kriteria yang ditujukan terhadap perkembangan dalam konteks solidaritas –dengan memantau hasil-hasil secara seksama– karena tidak ada penyelesaian valid secara universal. Kebanyakan bergantung pada cara program-program dikelola dalam praktik. “Bangsa-bangsa ialah perancang-bangun perkembangan mereka sendiri, dan harus menanggung beban kerja itu. Akan tetapi tidak

mungkin mereka melaksanakannya, kalau hidup terasingkan dari bangsa-bangsa lain.”¹¹⁴ Sekarang ini, ketika dunia kita semakin menyatu secara progresif, seruan dari Paulus VI ini bahkan lebih aktual. Dinamika pengikutsertaan tidak bersifat mekanis. Penyelesaian-penyelesaian perlu dirancang dengan seksama agar sesuai dengan kehidupan nyata orang-orang, berdasarkan pada penilaian bijaksana terhadap setiap situasi. Di samping proyek-proyek makro, perlu ada proyek-proyek mikro, dan terutama perlu ada mobilisasi aktif semua subjek dari masyarakat sipil, baik secara yuridis maupun secara fisik.

Kerja sama internasional memerlukan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses perkembangan ekonomi dan kemanusiaan melalui solidaritas kehadiran, pendampingan, pembinaan dan perhatian. Dari sudut pandang ini, organisasi-organisasi internasional seharusnya mempertanyakan efektivitas nyata alat birokrasi dan administrasi, yang seringkali terlalu mahal. Kadang-kadang terjadi bahwa orang yang menerima bantuan menjadi bawahan dari orang yang memberi bantuan dan orang-orang miskin terus melanggengkan birokrasi mahal, yang menghabiskan sebagian besar persentase keuangan yang diperuntukkan bagi pengembangan. Oleh karena itu diharapkan agar semua lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah akan berniat menjalankan keterbukaan sepenuhnya, dengan memberitahukan kepada para penderma dan masyarakat mengenai persentase pendapatan yang dialokasikan untuk program-program kerja sama, isi sesungguhnya dari program-program tersebut, dan akhirnya mengenai pengeluaran untuk kebutuhan lembaga itu sendiri secara terperinci.

48. Dewasa ini subjek perkembangan juga berkaitan sangat erat dengan kewajiban yang muncul dari *hubungan manusia dengan lingkungan alam*. Lingkungan alam ini adalah anugerah Allah untuk setiap orang, dan dalam penggunaannya kita bertanggung jawab terhadap orang-orang miskin, generasi masa depan dan seluruh umat manusia. Apabila alam,

¹¹⁴ Paulus VI, *Ensiklik Populorum Progressio*, 77; *loc.cit.*, 295

terutama manusia, dipandang hanya sebagai hasil dari suatu kebetulan atau determinisme evolusioner, rasa tanggung jawab kita akan berkurang. Dalam alam umat beriman mengenali buah yang mengagumkan dari intervensi kreatif Allah, yang boleh kita gunakan secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang wajar, material maupun imaterial, dengan menghormati keseimbangan intrinsik ciptaan. Apabila visi ini hilang, manusia menganggap alam sebagai sebuah tabu yang tak tersentuh, atau sebaliknya menyalahgunakannya. Kedua sikap ini tidak sesuai dengan pandangan Kristiani tentang alam semesta sebagai buah karya ciptaan Allah.

Alam mengungkapkan rancangan kasih dan kebenaran. Alam ini telah ada sebelum kita dan Allah menganugerahkannya pada kita sebagai tempat kita hidup. Alam berbicara kepada kita tentang Pencipta (bdk. Rom. 1:20) dan kasih-Nya bagi umat manusia. Alam ditetapkan untuk “diringkas” dalam Kristus pada akhir zaman (bdk. Ef. 1:9-10; Kol. 1:19-20). Oleh karena itu juga merupakan “panggilan”¹¹⁵. Alam yang kita miliki bukan seperti “timbunan sampah yang berserakan”¹¹⁶, melainkan anugerah Sang Pencipta yang telah menetapkan tatanan intrinsiknya, sehingga memungkinkan manusia untuk mengambil daripadanya prinsip-prinsip yang diperlukan untuk “mengolah dan memeliharanya” (Kej. 2:15). Tetapi perlu juga digarisbawahi bahwa memandang alam sebagai sesuatu yang lebih penting daripada pribadi manusia justru bertentangan dengan perkembangan sejati. Posisi ini mengarah pada sikap neopaganisme atau neopanteisme – keselamatan manusia tidak dapat berasal dari alam itu sendiri, yang dipahami dalam pengertian naturalistik murni. Sebaliknya, perlulah menolak posisi berlawanan, yang bertujuan untuk penguasaan teknis sepenuhnya atas alam, karena lingkungan alam lebih daripada sekadar materi untuk

¹¹⁵ Yohanes Paulus II, *Pesan pada Hari Perdamaian Sedunia 1990*, 6; AAS 82 (1990), 150.

¹¹⁶ Heraclitus dari Efesus (Efesus, 535 BC – 475 BC) Fragmen 22B124, dalam H. Diels dan W. Kranz, *Die Fragmente der Vorsokratiker*, Weidmann, Berlin, 1952, edisi keenam.

dimanfaatkan demi kesenangan kita; alam adalah sebuah karya menakjubkan Sang Pencipta yang berisi “tata bahasa” yang menetapkan tujuan dan kriteria penggunaannya secara bijaksana, bukan untuk eksploitasi sembarangan. Dewasa ini banyak kerusakan yang terjadi pada perkembangan sebagai akibat dari pemahaman yang keliru tersebut. Merendahkan alam sekadar sebagai sekumpulan data kebetulan mengakibatkan kekerasan terhadap lingkungan dan bahkan mendorong tindakan yang tidak menghormati kodrat manusia itu sendiri. Alam kita, yang dibangun bukan hanya oleh materi melainkan juga oleh roh, dan dengan demikian, juga dibekali dengan makna dan cita-cita transenden, memiliki karakter normatif untuk budaya. Manusia menafsirkan dan membentuk lingkungan alam melalui budaya, yang pada gilirannya diarahkan oleh penggunaan kebebasan yang bertanggung jawab, sesuai dengan perintah-perintah hukum moral kodrati. Oleh sebab itu, proyek-proyek untuk pengembangan manusia seutuhnya tidak bisa mengabaikan generasi mendatang, tetapi perlu *ditandai oleh soli-daritas dan keadilan antargenerasi*, dengan mempertimbangkan aneka konteks: ekologi, hukum, ekonomi, politik, dan budaya¹¹⁷.

49. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan alam dewasa ini semestinya memberi perhatian pada *masalah energi*. Kenyataan bahwa beberapa negara, kelompok-kelompok dan perusahaan-perusahaan yang kuat menimbun sumber-sumber daya energi tak terbarukan, sesungguhnya merupakan suatu kendala besar bagi pengembangan di negara-negara miskin. Negara-negara itu tidak memiliki sarana ekonomi, baik untuk memperoleh sumber-sumber energi tak terbarukan maupun membiayai penelitian untuk memperoleh sumber-sumber baru dan sumber-sumber alternatif. Penimbunan sumber-sumber daya alam, yang dalam banyak kasus ditemukan di negara-negara miskin itu sendiri, menyebabkan eksploitasi dan konflik-

¹¹⁷ Dewan Kepausan untuk Perdamaian dan Keadilan, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, 451-487

konflik yang sering terjadi di antara dan di dalam negara-negara. Konflik ini sering terjadi di tanah negara-negara itu sendiri, yang mengakibatkan sejumlah besar kematian, kerusakan dan kehancuran selanjutnya yang memprihatinkan. Komunitas internasional mempunyai kewajiban mendesak untuk menemukan sarana institusional yang mengatur penggunaan sumber daya tak terbarukan, dengan melibatkan peran serta negara-negara miskin dalam proses, untuk bersama-sama merencanakan masa depan.

Berkaitan dengan hal di atas, ada *kebutuhan moral mendesak untuk memperbarui solidaritas*, khususnya dalam hubungan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara industri maju¹¹⁸. Masyarakat berteknologi lebih maju dapat dan harus mengurangi pemakaian energi dalam negeri mereka, baik karena berkembangnya kegiatan manufaktur, maupun menyebarnya kesadaran ekologis di antara warga negara mereka. Selain itu mesti ditambahkan bahwa saat ini dimungkinkan untuk mencapai peningkatan efisiensi energi sekaligus mendorong riset untuk mendapat bentuk-bentuk energi alternatif. Tetapi, yang juga diperlukan adalah suatu redistribusi sumber-sumber daya energi ke seluruh dunia, sehingga negara-negara yang kekurangan sumber-sumber daya itu dapat memiliki akses untuk memperolehnya. Nasib negara-negara tersebut tak dapat dibiarkan terletak di tangan siapa pun yang pertama kali mengklaim sumber daya tersebut, atau siapa pun yang mampu mengungguli yang lain. Di sini kita berhadapan dengan permasalahan-permasalahan besar; jika permasalahan-permasalahan itu perlu dihadapi secara tuntas, setiap orang harus secara bertanggung jawab mengenali dampaknya bagi generasi yang akan datang, khususnya sebagian besar kaum muda dari bangsa-bangsa miskin, yang “meminta berperan aktif untuk membangun dunia yang lebih baik”¹¹⁹.

¹¹⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, *Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia 1990*, 10: *loc. Cit.*, 152-153.

¹¹⁹ Paulus VI, *Ensiklik Populorum Progressio*, 65; *loc.cit.*, 289.

50. Tanggung jawab ini menjangkau seluruh dunia, karena berkaitan tidak hanya dengan energi, tetapi seluruh ciptaan, yang tidak boleh diwariskan kepada generasi mendatang dengan sumber-sumber daya yang sudah habis. Manusia secara wajar menjalankan *penguasaan yang penuh tanggung jawab atas alam*, untuk melindunginya, menikmati hasilnya dan mengelolanya dengan cara baru dan dengan bantuan teknologi canggih sehingga dapat menyediakan secara layak dan memberi makan penduduk dunia. Di bumi ini ada tempat bagi semua orang; di mana seluruh keluarga umat manusia seharusnya menemukan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup secara bermartabat, dengan bantuan alam itu sendiri –anugerah Allah yang diberikan bagi anak-anak-Nya– dan dengan kerja keras serta bakat mereka sendiri. Sekaligus, kita harus menyadari tugas berat kita untuk mewariskan alam ini kepada generasi mendatang dalam kondisi yang semestinya, sehingga mereka juga dapat menghuninya secara layak dan terus mengusahakannya. Hal ini berarti berkomitmen untuk membuat keputusan bersama “sesudah secara bertanggung jawab mempertimbangkan jalan yang harus ditempuh, keputusan-keputusan yang bertujuan memperkuat *ikatan perjanjian antara manusia dengan lingkungan alam*, yang seharusnya mencerminkan kasih kreatif Allah, dari mana kita berasal dan kepada siapa kita pergi¹²⁰. Marilah kita berharap agar komunitas internasional dan setiap pemerintah berhasil melawan cara-cara yang merugikan dalam memperlakukan lingkungan. Hal ini juga merupakan kewajiban pihak yang berwenang untuk melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa biaya ekonomi dan sosial pemanfaatan sumber daya lingkungan diketahui secara transparan dan sepenuhnya ditanggung oleh mereka yang menikmatinya, bukan oleh bangsa lain atau generasi mendatang: perlindungan lingkungan, sumber-sumber daya dan iklim mewajibkan pemimpin-pemimpin dunia untuk bertindak bersama-sama dan menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dengan penuh kesungguhan, menghormati

¹²⁰ Benediktus XVI, *Pesan Hari Perdamaian Sedunia 2008*, 7; AAS 100 (2008), 41

hukum dan meningkatkan solidaritas dengan wilayah-wilayah terlemah di dunia ini¹²¹. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi ekonomi adalah mencapai pemanfaatan sumber-sumber alam yang paling efisien –tidak menyalahgunakannya– berdasarkan sebuah kesadaran bahwa pengertian “efisiensi” tidak bebas nilai.

51. *Cara manusia memperlakukan lingkungan memengaruhi cara manusia memperlakukan dirinya sendiri, demikian pula sebaliknya.* Hal ini mengajak masyarakat modern untuk meninjau kembali secara serius gaya hidupnya, yang di banyak bagian dunia rentan terhadap hedonisme dan konsumerisme, dengan tetap masa bodoh terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkannya¹²². Apa yang dibutuhkan adalah sebuah perubahan efektif mentalitas yang mengarahkan kita pada *gaya hidup baru* “di mana pencarian kebenaran, keindahan, kebaikan dan persekutuan hidup dengan sesama demi kemajuan bersama merupakan faktor yang menentukan pilihan-pilihan konsumsi, tabungan dan investasi”¹²³. Setiap pelanggaran terhadap solidaritas dan persahabatan sipil menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti halnya kemerosotan lingkungan yang pada gilirannya mengganggu hubungan sosial. Alam, khususnya pada zaman kita, sangat menyatu dengan dinamika sosial dan budaya yang saat ini jarang merupakan variabel bebas. Desertifikasi dan kemerosotan produktivitas pertanian di beberapa wilayah juga merupakan akibat pemiskinan dan keterbelakangan penduduk setempat. Jika pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat didorong maju, alam sendiri juga dilindungi. Selain itu, betapa banyak sumber daya alam telah dihancurkan oleh peperangan! Perdamaian di dalam dan di antara bangsa-bangsa juga akan memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap alam. Penimbunan sumber-sumber alam, terutama

¹²¹ Bdk. Benediktus XVI, *Sambutan pada Sidang Umum PBB*, New York 18 April 2008

¹²² Bdk. Yohanes Paulus II, *Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia 1990*, 13; *loc.cit.*, 154-155.

¹²³ Yohanes Paulus II, *Ensiklik Centesimus Annus*, 36; *loc.cit.*, 838-840.

air, dapat menimbulkan konflik serius di antara bangsa-bangsa yang terlibat. Kesepakatan damai tentang penggunaan sumber-sumber daya alam dapat melindungi alam, dan sekaligus kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

Gereja bertanggung jawab atas ciptaan dan harus menegaskan tanggung jawab ini di depan publik. Dengan demikian, Gereja harus melindungi bukan hanya bumi, air dan udara sebagai anugerah ciptaan milik semua orang. Gereja terutama harus melindungi umat manusia dari penghancuran diri sendiri. Diperlukan apa yang disebut ekologi manusia, yang dipahami secara benar. Perusakan alam kenyataannya terkait erat dengan budaya yang membentuk hidup bersama manusia: *bila "ekologi manusia"¹²⁴ dihormati dalam masyarakat, ekologi lingkungan juga diuntungkan*. Sama seperti keutamaan kemanusiaan saling berkaitan, sedemikian rupa sehingga melemahnya salah satu keutamaan memengaruhi yang lainnya, maka sistem ekologi didasarkan pada rasa hormat akan rencana yang memengaruhi baik kesehatan masyarakat maupun relasinya yang baik dengan lingkungan alam.

Untuk melindungi alam, tidak cukup melakukan campur tangan dengan memberi dukungan atau penghalang ekonomi; bahkan tidak juga cukup dengan pendidikan yang memadai. Ada beberapa langkah penting, tetapi *soal yang menentukan adalah tata moral masyarakat secara keseluruhan*. Jika hak hidup dan kematian alamiah tidak dihormati, jika pembuahan, kehamilan, dan kelahiran manusia dibuat secara artifisial, jika embrio manusia dikorbankan untuk penelitian, hati nurani masyarakat akhirnya kehilangan konsep ekologi manusia, sekaligus juga konsep ekologi lingkungan hidup. Adalah kontradiktif menuntut agar generasi mendatang menghormati lingkungan alam, bila sistem pendidikan dan hukum kita tidak membantu mereka menghargai diri mereka sendiri. Buku alam adalah satu dan tak terpisahkan: tidak hanya membahas tentang lingkungan, tetapi juga kehidupan, seksualitas,

¹²⁴ *Ibid.*, 38; *loc.cit.*, 840-841; Benediktus XVI, *Pesan Hari Perdamaian Sedunia 2007*, 8; *loc.cit.*, 779.

perkawinan, keluarga, relasi sosial: singkatnya pengembangan manusia seutuhnya. Kewajiban kita terhadap lingkungan alam berkaitan dengan kewajiban kita terhadap pribadi manusia, yang dipertimbangkan dalam dirinya sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Kita tidak bisa menekankan satu kewajiban dan mengabaikan yang lainnya. Di sinilah terletak kontradiksi besar dalam mentalitas dan praktik masa kini: yang merendahkan pribadi manusia, mengganggu lingkungan dan merusak masyarakat.

52. Kebenaran, dan cinta kasih yang mengungkapkannya, tidak bisa dihasilkan, tetapi hanya dapat diterima. Sumber utamanya bukanlah, dan tidak bisa, manusia, tetapi hanya Allah, yang adalah Kebenaran dan Kasih itu sendiri. Prinsip ini sangat penting bagi masyarakat dan perkembangan, sebab keduanya tidak mungkin merupakan produk murni manusia; panggilan untuk berkembang bagi orang perorangan dan bangsa-bangsa tidak berdasarkan sekadar pada pilihan manusiawi, tetapi merupakan bagian hakiki dari rencana yang ada sebelum kita dan menjadi tugas yang seharusnya kita terima dengan bebas. Apa yang mendahului kita dan membentuk kita –Kasih dan Kebenaran yang tetap ada selamanya– menunjukkan kepada kita apa itu kebaikan, dan apa yang merupakan kebahagiaan kita. *Hal itu menunjukkan pada kita jalan menuju pengembangan sejati.*

BAB LIMA

KERJA SAMA KELUARGA MANUSIA

53. Salah satu bentuk kemiskinan paling dalam yang dialami seseorang adalah keterasingan. Jika kita melihat lebih dekat bentuk lain dari kemiskinan, termasuk bentuk-bentuk material, kita tahu bahwa bentuk-bentuk itu muncul dari keterasingan, dari tidak dicintai atau sulit untuk mengasihi. Kemiskinan sering ditimbulkan oleh penolakan akan kasih Allah, berasal dari kecenderungan tragis menutup diri, karena menganggap diri sudah mampu mencukupi kebutuhan sendiri,

atau sekadar sebuah kenyataan yang tidak penting dan hanya sekejap mata, “seorang asing” di alam semesta yang tercipta begitu saja. Manusia terasing ketika ia sendirian, ketika ia terpisah dari kenyataan, ketika ia berhenti berpikir dan berhenti percaya pada sebuah dasar¹²⁵. Seluruh kemanusiaan terasing ketika sangat percaya hanya pada proyek-proyek manusia, ideologi-ideologi dan utopia-utopia palsu¹²⁶. Dewasa ini umat manusia tampak lebih interaktif daripada di masa lalu: rasa kedekatan terhadap satu sama lain ini harus diubah menjadi persekutuan sejati. *Pengembangan bangsa-bangsa terutama tergantung pada pengakuan bahwa bangsa manusia adalah satu keluarga yang bekerja bersama dalam persekutuan sejati*, bukan sekelompok orang yang semata-mata hidup saling berdampingan¹²⁷.

Paus Paulus VI mencatat bahwa “dunia menderita karena kurang berpikir”¹²⁸. Ia membuat sebuah pengamatan, tetapi juga mengungkapkan sebuah keinginan: dorongan pemikiran baru diperlukan agar supaya dapat mencapai pemahaman yang lebih baik atas implikasi bahwa kita adalah satu keluarga; interaksi di antara bangsa-bangsa di dunia mengajak kita untuk memulai momentum baru ini, sehingga pengintegrasian dapat memaknai solidaritas¹²⁹, bukan meminggirkannya. Pemikiran seperti ini membutuhkan *evaluasi kritis lebih dalam terhadap kategori relasi*. Ini adalah tugas yang tidak dapat dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial saja, sebab kontribusi dari ilmu-ilmu seperti metafisika dan teologi dibutuhkan apabila martabat transenden manusia itu sungguh-sungguh hendak dipahami secara tepat.

¹²⁵ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 41; *loc.cit.*, 843-845

¹²⁶ Bdk. *Ibid.*

¹²⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Ensiklik *Evangelium Vitae*, 20, *loc.cit.*, 422-424.

¹²⁸ Ensiklik *Populorum Progressio*, 85; *loc.cit.*, 298-299.

¹²⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, *Pesan Hari Perdamaian Sedunia 1998*, 3; AAS 90 (1998), 150; *Sambutan untuk Para Anggota Yayasan Vatikan – “Centessimus Annus – Pro Pontifice”* 9 Mei 1998, 2; *Sambutan untuk Pemerintah Sipil dan Korps Diplomatik Austria*, 20 Juni 1998, 8; *Pesan untuk Universitas Katolik the Sacred Heart*, 5 Mei 2000, 6.

Sebagai makhluk spiritual, manusia mengungkapkan dirinya dalam relasi interpersonal. Semakin autentik orang menghayati relasi-relasi ini, semakin dewasa identitas pribadinya. Manusia menetapkan nilai dirinya bukan dengan keterasingan, melainkan dengan menempatkan dirinya dalam relasi dengan sesama dan Allah. Oleh karena itu, pentingnya relasi ini sangat mendasar. Hal yang sama berlaku juga pada bangsa-bangsa. Maka, pemahaman metafisika tentang relasi antarpribadi bermanfaat besar bagi pengembangan mereka. Berkaitan dengan hal ini, akal budi menemukan inspirasi dan arah dalam pewahyuan Kristiani, yang menurut komunitas manusiawi tidak meleburkan individu, dengan menghilangkan otonominya, seperti yang terjadi pada aneka ragam bentuk totalitarianisme, tetapi lebih menghargainya karena relasi antara individu dan komunitas adalah relasi antara totalitas yang satu dengan totalitas yang lain¹³⁰. Seperti suatu keluarga tidak menenggelamkan identitas para individu anggotanya, seperti halnya Gereja bersukacita dalam setiap “ciptaan baru” (Gal. 6:15; 2Kor. 5:17) yang disatukan dengan baptisan ke dalam Tubuhnya yang hidup, demikian juga kesatuan keluarga manusia tidak menenggelamkan identitas individu-individu, bangsa-bangsa dan budaya-budaya, tetapi menjadikannya lebih terlihat jelas satu sama lain dan menghubungkan mereka secara lebih dekat dalam keberagaman mereka yang sah.

54. Tema pengembangan bersesuaian dengan dimasukkannya-dalam-relasi semua orang dan bangsa-bangsa di dalam satu komunitas keluarga umat manusia, yang dibangun dalam solidaritas berlandaskan nilai-nilai fundamental keadilan dan perdamaian. Perspektif ini diterangi dengan sangat jelas dalam hubungan antara Pribadi Trinitas dalam satu Hakikat ilahi. Trinitas adalah kesatuan mutlak karena ketiga Pribadi Ilahi itu merupakan relasionalitas murni. Transparansi timbal balik antara ketiga Pribadi ilahi itu total dan ikatan satu sama lain

¹³⁰ Menurut Santo Thomas “*ratio partis contrariatur rationi personae*”, dalam *III Sent. D.5,q.3,a.2*; juga “*Homo non ordinatur ad communitatem politicam secundum se totum et secundum omnia sua*”, *Summa Theologiae* I-II, q.21,a.4,ad3.

sempurna, karena Mereka adalah satu kesatuan yang unik dan mutlak. Allah juga berkehendak mempersatukan kita ke dalam realitas persekutuan ini: "Supaya menjadi satu sama seperti Kita adalah satu" (Yoh. 17:22). Gereja adalah tanda dan sarana dari persekutuan ini¹³¹. Demikian juga, relasi an-tara manusia sepanjang sejarah tidak dapat tidak diperkaya dengan mengacu pada model ilahi ini. Terutama, *dalam terang misteri pewahyuan Trinitas*, kita mengerti bahwa keterbukaan sejati bukan berarti kehilangan identitas pribadi, tetapi saling menyatu secara mendalam. Hal ini juga muncul dari pengalaman-pengalaman manusiawi biasa akan kasih dan kebenaran. Seperti halnya cinta sa-kramental pasangan suami-istri mempersatukan mereka secara spiritual menjadi "satu daging" (Kej. 2:24; Mat. 19:5; Ef. 5:31) dan membuat keduanya menjadi kesatuan yang nyata dan relasional, sehingga secara analog kebenaran mempersatukan jiwa-jiwa dan membuat mereka berpikir serempak, dengan menarik mereka untuk bersatu dengan kebenaran itu sendiri.

55. Pewahyuan Kristiani atas kesatuan umat manusia menyiratkan *suatu interpretasi metafisika "humanum" di mana relasionalitas merupakan unsur hakiki*. Kebudayaan-kebudayaan dan agama-agama lain mengajarkan persaudaraan dan perdamaian dan karena itu sangat penting bagi perkembangan manusia seutuhnya. Namun demikian beberapa sikap religius dan budaya tidak sepenuhnya menerima prinsip kasih dan kebenaran dan karena itu berakhir dengan memperlambat atau bahkan menghambat perkembangan sejati manusia. Ada beberapa budaya keagamaan tertentu di dunia sekarang ini yang tidak mewajibkan laki-laki dan perempuan hidup dalam persekutuan, tetapi memisahkan satu sama lain dalam upaya mencari kesejahteraan pribadi, yang terbatas pada pemuasan kebutuhan-kebutuhan psikologis. Lebih lanjut, pengembangan tertentu dari aneka "jalan" keagamaan, yang menarik kelompok-kelompok kecil atau bahkan orang perseorangan,

¹³¹ Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi Dogmatis tentang Gereja *Lumen Gentium*, 1.

bersama-sama dengan sinkretisme keagamaan, dapat menimbulkan keterperpisahan dan pemutusan hubungan. Satu kemungkinan pengaruh negatif dari proses globalisasi adalah suatu kecenderungan menyukai sinkretisme seperti itu¹³², dengan mendukung bentuk-bentuk “agama” yang, alih-alih menyatukan orang-orang, justru mengasingkan pribadi-pribadi satu sama lain dan menjauhkan mereka dari kenyataan. Pada saat yang sama, beberapa warisan-warisan agama dan budaya bertahan yang membuat masyarakat mengeras dalam pengelompokan-pengelompokan sosial yang kaku, dalam kepercayaan magis yang tidak menghormati martabat manusia, dalam sikap tunduk pada kekuatan-kekuatan gaib. Dalam konteks ini, kasih dan kebenaran menghadapi kesulitan menegaskan diri, dan perkembangan sejati terhambat.

Oleh karena itu, jika benar, di satu sisi, bahwa perkembangan membutuhkan agama-agama dan kebudayaan-kebudayaan dari berbagai bangsa, maka benarlah juga, di sisi lain, bahwa dibutuhkan pula suatu pertimbangan yang memadai. Kebebasan beragama tidak berarti sikap acuh tak acuh dalam hal agama dan tidak menganggap semua agama sama¹³³. Sikap menimbang-nimbang mengenai sumbangan budaya-budaya dan agama-agama untuk membangun komunitas sosial yang menghormati kebaikan bersama, diperlukan terutama bagi mereka yang memegang kekuasaan politik. Pertimbangan ini harus didasarkan pada kriteria kasih dan kebenaran. Karena perkembangan pribadi-pribadi dan bangsa-bangsa dipertaruhkan, pertimbangan tersebut perlu memperhitungkan kemungkinan emansipasi dan inklusivitas dalam perspektif suatu komunitas manusia yang sungguh-sungguh universal. “Manusia seutuhnya dan seluruh umat

¹³² Bdk. Yohanes Paulus II *Sambutan pada Kuliah Umum Akademi Kepausan Teologi dan Santo Thomas Aquinas*, 8 November 2011.

¹³³ Bdk. Kongregasi Doktrin Iman, *Deklarasi tentang Kesatuan dan Universalitas Keselamatan Yesus Kristus dan Gereja Dominus Iesus* (6 Agustus 2000), 22: AAS 92 (2000), 763-764; Id., *Catatan Doktrinal atas beberapa pertanyaan berkaitan dengan keterlibatan umat katolik dalam kehidupan politik* (24 November 2002), 8: AAS 96 (2000), 369-370.

manusia” juga merupakan kriteria untuk menilai budaya-budaya dan agama-agama. Kristianitas, agama “Allah berwajah manusia”¹³⁴, membawa kriteria yang sama dalam dirinya.

56. Agama Kristiani dan agama-agama lain dapat memberikan sumbangannya kepada perkembangan *hanya jika Allah menemukan tempat dalam ruang publik*, terutama berkaitan dengan dimensi-dimensi budaya, sosial, ekonomi, dan terutama politik. Ajaran sosial Gereja dilahirkan untuk menegaskan “status kewarganegaraan”¹³⁵ agama Kristiani. Pengingkaran hak untuk memeluk agama seseorang secara publik dan hak membawa kebenaran-kebenaran iman untuk memengaruhi kehidupan publik memiliki konsekuensi-konsekuensi negatif terhadap perkembangan sejati. Penghilangan agama dari lingkungan publik, dan pada ekstrim lainnya, fundamentalisme agama, menghalangi perjumpaan antara pribadi-pribadi dan kerja sama mereka demi kemajuan umat manusia. Kehidupan publik dilemahkan motivasinya dan politik mengambil sikap mendominasi dan agresif. Hak-hak asasi manusia berisiko tidak dihormati, baik karena dasar transenden mereka dirampas, atau karena kebebasan pribadi tidak diakui. Sekularisme dan fundamentalisme meniadakan kemungkinan dialog subur dan kerja sama efektif antara akal budi dan iman kepercayaan. *Akal budi selalu perlu dimurnikan oleh iman*, dan ini juga berlaku untuk pikiran politik, yang tidak boleh menganggap dirinya mahakuasa. Pada gilirannya, *agama selalu perlu dimurnikan oleh akal budi* untuk memperlihatkan wajah kemanusiaannya yang sejati. Kerusakan apa pun dalam dialog ini mengakibatkan kerugian besar bagi perkembangan umat manusia.
57. Dialog subur antara iman dan akal budi tidak dapat tidak membuat karya belas kasih lebih efektif dalam masyarakat dan merupakan kerangka yang paling tepat untuk memajukan

¹³⁴ Benediktus XVI, Ensiklik *Spe Salvi*, 31; *loc.cit.*, 1010; *Sambutan kepada para Peserta Kongres Nasional IV tentang Gereja di Italia*, Verona, 19 Oktober 2006.

¹³⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 5; *loc.cit.*, 798-800; Benediktus XVI, *Sambutan kepada Para Peserta Kongres Nasional tentang Gereja di Italia*, Verona, 19 Oktober 2006.

kerja sama persaudaraan antarumat beriman dan tidak beriman dalam komitmen bersama untuk bekerja demi keadilan dan perdamaian keluarga umat manusia. Dalam konstitusi pastoral *Gaudium et Spes* para Bapa Konsili menegaskan “kaum beriman maupun tak beriman hampir sependapat, bahwa segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya”¹³⁶. Bagi orang beriman, dunia bukanlah hasil dari suatu kejadian atau kebutuhan, tetapi dari rencana Allah. Darinya lahir kewajiban umat beriman untuk menyatukan upaya-upaya mereka dengan upaya-upaya semua orang yang berkehendak baik dari agama-agama lain atau orang-orang tidak beriman, sehingga dunia kita ini selaras dengan rencana ilahi: hidup sebagai satu keluarga, di bawah pengawasan Sang Pencipta. Perwujudan khusus kasih dan suatu kriteria yang menuntun pada kerja sama persaudaraan umat beriman dan tidak beriman tidak diragukan lagi adalah *prinsip subsidiaritas*¹³⁷, ungkapan kebebasan manusia yang tidak dapat dirampas. Subsidiaritas pertama-tama dan terutama adalah bantuan kepada orang, melalui otonomi badan-badan perantara. Bantuan tersebut diberikan ketika individu-individu dan subjek sosial tidak mampu melakukan sesuatu sendiri dan bantuan itu selalu dirancang untuk mencapai emansipasi mereka, karena meningkatkan kebebasan dan partisipasi melalui penerimaan tanggung jawab. Subsidiaritas menghormati martabat pribadi, dengan mengakui dalam pribadi tersebut subjek yang selalu mampu memberi sesuatu kepada yang lain. Dengan mempertimbangkan hal timbal baik sebagai inti hakikat menjadi manusia, subsidiaritas adalah penangkal paling jitu melawan setiap bentuk bantuan yang menimbulkan ketergantungan. Hal ini dapat memperhitungkan baik aneka ragam keterkaitan rencana –dan dengan demikian pluralitas subjek– maupun koordinasi rencana-rencana tersebut. Oleh karena itu, prinsip subsidiaritas secara khusus cocok untuk

¹³⁶ No 12.

¹³⁷ Bdk. Pius XI, Ensiklik *Quadragesimo Anno* (15 Mei 1931): AAS 23 (1931), 203; Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 48; *loc.cit.*, 852-854; *Katekismus Gereja Katolik*, 1883.

mengelola globalisasi dan mengarahkannya pada perkembangan sejati manusia. Supaya tidak menimbulkan suatu bahaya kekuasaan universal yang bersifat tirani, *pengaturan globalisasi harus ditandai oleh subsidiaritas*, yang dijelaskan dengan beberapa lapisan dan mencakup aneka tingkat yang dapat saling bekerja sama. Globalisasi tentu memerlukan kewenangan, karena mengajukan masalah kesejahteraan umum yang mengglobal untuk dicapai; tetapi kewenangan itu harus diatur dengan cara subsidiaritas dan stratifikasi¹³⁸, supaya tidak melanggar kebebasan namun secara konkret memberikan hasil-hasil yang efektif dalam praktik.

58. *Prinsip subsidiaritas harus tetap berkaitan erat dengan prinsip solidaritas dan demikian juga sebaliknya*, karena subsidiaritas tanpa solidaritas memberi jalan kepada privatisme sosial, sementara solidaritas tanpa subsidiaritas memberi jalan kepada bantuan yang menimbulkan ketergantungan, yang merendahkan mereka yang berkekurangan. Aturan umum ini harus dipertimbangkan secara luas ketika berhadapan dengan tema-tema yang berhubungan dengan *bantuan-bantuan internasional bagi pembangunan*. Bantuan-bantuan semacam itu, apa pun maksud para penderma, kadang-kadang dapat mengunci masyarakat dalam kondisi ketergantungan dan bahkan meningkatkan situasi penindasan dan eksploitasi yang terbatas pada negara penerima bantuan. Bantuan-bantuan ekonomi, supaya benar-benar sesuai dengan maksudnya, tidak boleh mengejar tujuan sekunder. Bantuan itu haruslah diberikan dengan melibatkan tidak hanya pemerintah negara-negara penerima bantuan, tetapi juga para pelaku ekonomi setempat dan para pemangku bu-daya dalam masyarakat sipil, termasuk Gereja lokal. Program-program bantuan semestinya semakin mendapatkan sifat partisipasi dan penyempurnaan dari akar rumput. Pada kenyataannya, sumber daya yang sangat berharga di negara-negara penerima bantuan adalah sumber daya manusia: inilah modal nyata yang perlu

¹³⁸ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*, I.c., 274.

ditingkatkan untuk mengembangkan negara-negara termiskin mencapai kemandirian yang sesungguhnya. Perlu diingat juga bahwa dalam bidang ekonomi, bentuk utama bantuan yang dibutuhkan negara-negara yang sedang berkembang adalah bentuk yang mengizinkan dan mendukung secara bertahap masuknya produk-produk mereka ke dalam pasar internasional, sehingga memungkinkan mereka berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan perekonomian internasional. Sangat sering di masa lampau bantuan-bantuan itu dimanfaatkan hanya untuk menciptakan pasar pinggirani bagi produk-produk dari negara-negara donor ini. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya permintaan produk-produk ini: oleh karena itu negara-negara tersebut perlu dibantu untuk memperbaiki produk-produk mereka dan menyesuaikannya secara lebih efektif dengan permintaan yang ada. Selanjutnya, beberapa negara sering takut terhadap akibat-akibat dari persaingan produk-produk impor, biasanya hasil pertanian, yang berasal dari negara-negara yang miskin secara ekonomi. Namun harus diingat bahwa untuk negara-negara ini, kemungkinan menjual produk-produk mereka sering sekali berarti menjamin kelangsungan hidup mereka, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Perdagangan internasional yang adil dan seimbang pada barang-barang pertanian dapat menguntungkan bagi semua pihak, baik bagi penjual maupun pembeli. Karena alasan ini, tidak hanya diperlukan orientasi komersial bagi produksi-produksi jenis ini, tetapi juga perlu menetapkan peraturan perdagangan internasional yang mendukungnya dan memperkuat keuangan menuju pengembangan yang meningkatkan produktivitas perekonomian ini.

59. *Kerja sama untuk pengembangan* tidak boleh hanya melihat dimensi ekonomi; kerja sama itu harus menawarkan *kesempatan besar untuk perjumpaan antara kebudayaan dan manusia*. Jika pihak-pihak dalam kerja sama dari negara-negara yang maju secara ekonomi tidak mampu memperhitungkan, seperti yang tidak jarang terjadi, identitas budayanya sendiri atau identitas budaya yang lain, atau nilai-

nilai kemanusiaan yang membentuknya, mereka tidak dapat masuk ke dalam dialog yang mendalam dengan penduduk negara-negara miskin. Jika negara-negara miskin ini, pada gilirannya, tidak kritis dan tanpa memilah-milah terbuka pada semua kebudayaan yang ditawarkan, mereka tidak bertanggung jawab terhadap perkembangan sejati mereka sendiri¹³⁹. Masyarakat yang secara teknologi maju tidak boleh mencampurkan perkembangan teknologi mereka dengan suatu anggapan keunggulan budaya, tetapi mereka harus menemukan kembali dalam diri sendiri keutamaan-keutamaan yang terkadang dilupakan, yang telah mereka kembangkan sepanjang sejarah mereka. Masyarakat yang berkembang harus tetap setia kepada hal-hal yang sungguh-sungguh manusiawi yang ada dalam tradisi mereka, dengan menghindari godaan menutupinya secara otomatis dengan mekanisme peradaban teknologi global. Dalam semua kebudayaan ada satu atau banyak konvergensi etis, beberapa terpisah, beberapa saling berkaitan, sebagai sebuah ungkapan kodrat manusia, yang dikehendaki Sang Pencipta, dan bahwa kebijaksanaan etis umat manusia disebut sebagai hukum kodrat¹⁴⁰. Hukum moral universal ini memberikan dasar yang kuat untuk setiap dialog budaya, agama, dan politik dan memastikan bahwa berbagai bentuk pluralisme keragaman budaya tidak melepaskan diri dari pencarian bersama akan kebenaran, kebaikan dan Tuhan. Oleh karena itu, ketaatan pada hukum yang tertulis dalam hati manusia adalah prasyarat bagi semua kerja sama sosial yang konstruktif. Dalam semua budaya ada beban-beban yang harus dilepaskan, dan bayang-bayang yang harus dijauhkan. Iman kristiani, yang menjelma dalam kebudayaan-kebudayaan dan sekaligus melampauinya, dapat membantu mereka berkembang dalam persaudaraan dan solidaritas universal demi kepentingan perkembangan semesta dan masyarakat.

¹³⁹ Bdk. Paulus VI, Ensiklik. *Populorum Progressio*, 10.41: *l.c.*, 262, 277-278.

¹⁴⁰ Bdk. BenediktusXVI, *Amanat kepada Para Anggota Komisi Teologi Internasional*, 5 Oktober 2007; *Amanat kepada para Peserta Kongres Internasional tentang Hukum Moral Kodrati*, 12 Februari 2007.

60. Dalam mencari penyelesaian krisis ekonomi dewasa ini, *bantuan untuk pembangunan negara-negara miskin harus dipertimbangkan sebagai sarana yang tepat untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua orang*. Program bantuan apa yang dapat menawarkan prospek pertumbuhan yang sangat signifikan –bahkan perekonomian dunia– sebagai dukungan bagi penduduk yang masih berada dalam tahap permulaan atau awal proses pengembangan ekonomi? Dalam perspektif ini, negara-negara ekonomi maju harus mengalokasikan jumlah yang lebih besar dari produk domestik bruto (GDP) mereka untuk bantuan-bantuan pengembangan, dengan menghormati kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh komunitas internasional. Mereka dapat melakukan hal itu dengan melihat kembali kebijakan bantuan sosial internal dan solidaritas, dengan menerapkan prinsip subsidiaritas dan menciptakan sistem *kesejahteraan sosial* yang lebih baik, yang terintegrasi dengan partisipasi aktif pribadi dan masyarakat sipil. Dengan cara ini, dimungkinkan peningkatan pelayanan sosial dan program kesejahteraan, dan sekaligus penghematan sumber daya, juga menghilangkan pemborosan dana yang tidak perlu supaya dapat dialokasikan untuk solidaritas internasional. Suatu sistem solidaritas sosial yang lebih partisipatif dan hidup, kurang birokratis tetapi tetap terkoordinasi, akan meningkatkan energi untuk kepentingan solidaritas antar bangsa-bangsa.

Suatu kemungkinan untuk bantuan pengembangan bisa terjadi dengan penerapan efektif apa yang disebut subsidiaritas fiskal, yang memungkinkan para warga untuk memutuskan bagaimana mengalokasikan sebagian pajak yang dibayarkan kepada negara. Dengan menghindari kemerosotan-kemerosotan tertentu, hal ini dapat membantu mendorong bentuk-bentuk solidaritas sosial dari bawah, dengan manfaat yang jelas di bidang solidaritas untuk pengembangan.

61. Solidaritas yang lebih luas di tingkat internasional tampak terutama dalam kemajuan yang berkesinambungan, juga dalam kondisi krisis ekonomi, akan *akses yang lebih besar terhadap pendidikan*, yang juga merupakan prasyarat penting

bagi kerja sama internasional yang efektif. Istilah “pendidikan” tidak hanya merujuk pada pengajaran di kelas atau pelatihan kerja, yang keduanya merupakan faktor penting dalam perkembangan, tetapi juga pada pembinaan pribadi secara menyeluruh. Dalam hal ini ada suatu aspek penting yang harus digarisbawahi: untuk mendidik perlu mengenal pribadi manusia, mengetahui kodratnya. Meningkatnya pemahaman relativistik tentang kodrat memunculkan persoalan serius bagi pendidikan, khususnya pada pendidikan moral, yang membahayakan perluasan universalnya. Bila jatuh ke dalam relativisme semacam itu, membuat semua orang menjadi lebih miskin, dan berdampak negatif bagi efektivitas bantuan kepada penduduk yang paling membutuhkan, yang tidak hanya kekurangan sarana ekonomi atau teknik, tetapi juga dalam cara-cara dan sarana-sarana pendidikan yang membantu mereka mewujudkan potensi manusiawi mereka sepenuhnya.

Contoh mendesaknya masalah ini diberikan oleh fenomena *pariwisata internasional*¹⁴¹ yang dapat menjadi faktor utama dalam perkembangan ekonomi dan budaya, tetapi juga dapat berubah sebagai kesempatan eksploitasi dan kemerosotan moral. Situasi saat ini memberikan peluang unik bagi aspek-aspek ekonomis perkembangan, yaitu aliran uang dan munculnya sejumlah besar perusahaan lokal, dipadukan dengan aspek-aspek budaya, terutama aspek pendidikan. Dalam banyak kasus inilah yang terjadi, tetapi pada kasus-kasus lainnya pariwisata internasional mempunyai dampak negatif yang tidak mendidik, baik bagi para wisatawan itu sendiri maupun bagi penduduk lokal. Penduduk lokal seringkali dihadapkan pada perilaku yang tidak bermoral, atau bahkan menyimpang, seperti dalam kasus yang dikenal dengan pariwisata seks, yang mengorbankan banyak manusia, bahkan kaum muda. Yang sangat menyedihkan adalah bahwa aktivitas itu berlangsung dengan dukungan pemerintah setempat, dengan sikap diam mereka kepada negara-negara asal para

¹⁴¹ Bdk. Benediktus XVI, *Sambutan kepada Para Uskup Thailand dalam Kunjungan “Ad Limina” Mereka*, 16 Mei 2008.

wisatawan dan dengan keterlibatan banyak penyelenggara pariwisata. Bahkan dalam kasus yang kurang ekstrem, pariwisata internasional seringkali mengikuti pola konsumeris dan hedonis, sebagai bentuk pelarian yang dibuat secara khas dari negara-negara asal, dan dengan demikian tidak mendukung bagi perjumpaan sejati antara pribadi-pribadi dengan budaya-budaya. Jadi, perlu dikembangkan suatu bentuk pariwisata yang berbeda, yang mampu memajukan pemahaman timbal balik yang sesungguhnya, tanpa menghilangkan unsur istirahat dan rekreasi yang sehat. Jenis pariwisata seperti ini perlu ditingkatkan, juga sebagian melalui koordinasi yang lebih erat dengan pengalaman yang diperoleh dari kerja sama internasional dan dengan usaha pembangunan.

62. Aspek lain dari perkembangan manusia seutuhnya yang layak untuk diperhatikan adalah fenomena *migrasi*. Fenomena ini mengejutkan karena banyaknya orang yang terlibat, persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama yang meningkat, serta tantangan-tantangan berat yang dihadapkannya pada masyarakat nasional dan internasional. Dapat kita katakan bahwa kita sedang berhadapan dengan sebuah fenomena sosial yang sangat penting, yang menuntut kebijakan yang kuat dan berwawasan ke depan dari kerja sama internasional untuk dapat menghadapinya secara efektif. Kebijakan tersebut harus berkembang mulai dari kerja sama erat yang dilakukan antara negara-negara asal para migran dengan negara-negara tujuan migrasi mereka; dibarengi dengan norma-norma internasional yang memadai yang mampu mengoordinasikan sistem-sistem legislatif yang berbeda, dalam perspektif menjaga kebutuhan dan hak-hak asasi pribadi dan keluarga para migran, sekaligus negara-negara penerima para migran tersebut. Tidak ada satu pun negara yang dapat sendirian saja mengatasi masalah migrasi dewasa ini. Kita semua adalah saksi beban penderitaan, ketidaknyamanan dan aspirasi yang mengiringi arus migrasi. Fenomena ini, sebagaimana yang diketahui, sulit untuk dikelola, tetapi tidak diragukan lagi bahwa para pekerja asing, meskipun mengalami kesulitan-kesulitan untuk integrasi,

memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan ekonomi negara tuan rumah melalui pekerjaan mereka, selain sumbangan yang mereka berikan kepada negara asal melalui uang yang mereka kirimkan. Jelaslah, para tenaga kerja ini tidak boleh dianggap sebagai komoditas atau buruh semata. Jadi mereka tidak boleh diperlakukan seperti faktor-faktor produksi lainnya. Setiap imigran adalah seorang pribadi manusia, dan karena itu, mempunyai hak-hak asasi yang tidak dapat dicabut dari dirinya yang harus dihormati oleh semua pihak dan dalam keadaan apa pun¹⁴².

63. Tidak ada pertimbangan terhadap masalah-masalah pembangunan yang tidak menggarisbawahi hubungan langsung antara *kemiskinan dengan pengangguran*. Orang-orang miskin, dalam banyak kasus, adalah akibat dari *pelanggaran martabat pekerjaan manusia*, entah karena terbatasnya kesempatan kerja (menjadi pengangguran atau setengah pengangguran), atau karena “rendahnya nilai yang ditempatkan pada kerja dan hak-hak yang berasal dari padanya, khususnya hak atas upah yang adil dan atas keamanan pribadi pekerja dan keluarganya”¹⁴³. Karena itu, pada 1 Mei 2000, dalam kesempatan peringatan Yubileum para pekerja, pendahulu saya Paus Yohanes Paulus II yang terhormat mengeluarkan seruan untuk “koalisi global demi mendukung ‘pekerjaan yang layak’”¹⁴⁴, yang menunjang strategi Organisasi Pekerja Internasional. Dengan cara ini, beliau memberikan dorongan moral yang kuat terhadap tujuan ini, yang merupakan dambaan keluarga-keluarga di semua negara di dunia ini. Apa arti kata “layak” yang diterapkan dalam hal pekerjaan? Hal itu berarti pekerjaan yang mengungkapkan martabat hakiki setiap laki-laki dan setiap perempuan dalam konteks masyarakatnya: pekerjaan yang dipilih secara bebas, yang menyatukan para pekerja secara efektif, baik laki-laki maupun perempuan, dengan

¹⁴² Dewan Kepausan untuk Pastoral Migran dan Perantau, Instruksi *Erga Migrantes Caritas Christi*, 3 Mei 2004; AAS 96 (2004), 762-822.

¹⁴³ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, 8: *loc. cit.*, 594-598

¹⁴⁴ Yubileum Para Pekerja, *Seruan sesudah Misa*, 1 Mei 2000

perkembangan masyarakat mereka; pekerjaan yang membuat para pekerja dihormati dan bebas dari segala bentuk diskriminasi; pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak-anak mereka, tanpa membuat anak-anak terpaksa harus bekerja; pekerjaan yang membolehkan para pekerja mengatur diri sendiri secara bebas dan memungkinkan suara mereka didengar; pekerjaan yang menyediakan cukup ruang untuk menemukan kembali akar mereka di tingkat pribadi, keluarga dan spiritual; pekerjaan yang menjamin mereka yang telah pensiun suatu standar kehidupan yang layak.

64. Sementara merefleksikan tema kerja, pantas juga mengingat pentingnya keberadaan *organisasi serikat-serikat pekerja*, yang selalu didorong dan didukung oleh Gereja, yang terbuka pada perspektif baru yang muncul dalam lingkungan pekerjaan. Dengan mengatasi keterbatasan-keterbatasan serikat pekerja, organisasi serikat itu dipanggil untuk menanggapi persoalan-persoalan baru yang muncul dalam masyarakat kita: saya berpikir, misalnya, tentang rumitnya persoalan-persoalan yang dijelaskan oleh para ilmuwan sosial menyangkut konflik antara pribadi-pekerja dengan pribadi-konsumen. Tanpa harus mendukung pendapat bahwa fokus utama pada pekerja telah beralih ke fokus utama pada konsumen, tampaknya hal ini bagi serikat pekerja juga menjadi lahan baru yang perlu dieksplorasi secara kreatif. Konteks global di mana pekerjaan berlangsung juga menuntut bahwa organisasi serikat-serikat pekerja nasional, yang cenderung tertutup dalam membela kepentingan-kepentingan para anggotanya yang terdaftar, harus mengalihkan perhatian mereka juga kepada mereka yang ada di luar keanggotaan, khususnya terhadap para pekerja di negara-negara yang sedang berkembang, di mana hak-hak sosial seringkali dilanggar. Perlindungan bagi para pekerja ini, yang sebagian didukung juga melalui prakarsa memadai yang ditujukan bagi negara-negara asal, memungkinkan organisasi serikat-serikat pekerja menjelaskan alasan-alasan etika dan budaya sejati yang mereka setujui, dalam aneka konteks sosial dan pekerjaan, untuk menjadi

faktor penentu bagi perkembangan. Ajaran tradisional Gereja selalu wajar mengemukakan perbedaan peran dan fungsi antara serikat pekerja dengan serikat politik. Perbedaan ini memungkinkan organisasi serikat-serikat mengidentifikasi masyarakat sipil sebagai lingkungan yang tepat bagi tindakan mereka yang perlu untuk membela dan memajukan dunia kerja, terutama untuk melindungi para pekerja yang dieksploitasi dan yang tidak terwakili, yang kondisi menyedihkan mereka seringkali diabaikan oleh masyarakat.

65. Oleh karena itu, *keuangan*, melalui struktur dan cara-cara pelaksanaan yang diperbarui sesudah penyalahgunaannya yang telah merugikan ekonomi riil, perlu dikembalikan menjadi *sarana finansial yang diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan dan perkembangan yang lebih baik*. Seluruh perekonomian dan keuangan, tidak hanya beberapa sektor tertentu, harus digunakan dengan cara yang etis sehingga menciptakan kondisi yang memadai bagi perkembangan manusia dan bangsa-bangsa. Tentu saja berguna, dan dalam beberapa keadaan adalah mendesak, membangkitkan prakarsa-prakarsa keuangan yang didominasi oleh dimensi kemanusiaan. Tetapi, tidak boleh dilupakan bahwa seluruh sistem keuangan harus bertujuan mendukung perkembangan sejati. Terutama, semestinya tujuan perbuatan baik tidak berlawanan dengan kemampuan nyata melakukan kebaikan. Para pemodal harus menemukan kembali dasar etika yang murni untuk bisnis mereka agar tidak menyalahgunakan alat-alat canggih yang dapat digunakan untuk mengkhianati para penanam modal. Maksud yang benar, transparansi, dan pencarian hasil yang baik, saling kompatibel dan tidak pernah boleh dipisahkan satu sama lain. Jika cinta kasih itu bijaksana, maka tahu juga bagaimana menemukan cara-cara untuk bekerja sesuai dengan kemanfaatan yang bijaksana dan adil, sebagaimana diperlihatkan, dengan cara yang sangat baik, oleh banyak pengalaman *credit union* (koperasi simpan-pinjam).

Baik regulasi sektor keuangan, untuk melindungi pihak-pihak yang lebih lemah dan mencegah spekulasi yang memalukan. Maupun percobaan dengan bentuk-bentuk baru

keuangan yang dirancang untuk mendukung proyek pengembangan, merupakan pengalaman-pengalaman positif yang perlu dikaji lebih dalam dan didukung, dengan menggarisbawahi *tanggung jawab penanam modal*. Lagipula, *pengalaman keuangan mikro*, yang berakar pada pemikiran dan kegiatan para humanis sipil –saya memikirkan terutama munculnya pegadaian–, perlu diperkuat dan disesuaikan agar menjadi lebih baik, khususnya saat-saat ini, di mana permasalahan keuangan menjadi lebih parah bagi banyak sektor masyarakat yang lebih rentan, yang harus dilindungi dari resiko riba dan keputusasaan. Para anggota masyarakat yang terlemah perlu dibantu untuk dapat membela diri terhadap riba, demikian juga seperti bangsa-bangsa miskin perlu dibantu untuk memperoleh manfaat nyata kredit mikro, sehingga mencegah eksploitasi yang mungkin terjadi di dalam dua bidang ini. Karena negara-negara kaya juga sedang mengalami bentuk-bentuk kemiskinan baru, keuangan mikro dapat memberikan bantuan praktis dengan menciptakan usaha-usaha dan bidang-bidang baru untuk menyokong masyarakat yang lebih lemah, juga pada saat melemahnya kekuatan ekonomi secara umum.

66. Kesaling-terhubungan global telah memunculkan kekuatan politik baru, yaitu *para konsumen dan perkumpulannya*. Hal ini adalah sebuah fenomena yang perlu didalami, karena mencakup unsur-unsur positif yang perlu didukung dan sekaligus eksek-eksek yang perlu dihindari. Adalah hal baik apabila orang-orang menyadari bahwa membeli selalu merupakan tindakan moral, lebih dari sekadar tindakan ekonomis. Oleh karena itu, ada suatu *tanggung jawab sosial khusus dari konsumen*, yang berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Para konsumen perlu terus-menerus dibimbing¹⁴⁵ terkait peran mereka sehari-hari, yang dapat dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip moral, tanpa mengurangi rasionalitas ekonomi intrinsik dalam tindakan membeli. Dalam industri ritel, khususnya pada saat

¹⁴⁵ Bdk. Yoh. Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, 36; *loc.cit.*, 838-840.

seperti sekarang ini ketika daya beli menurun dan orang harus hidup lebih hemat, perlu mencari cara-cara lain, misalnya bentuk-bentuk pembelian melalui koperasi, seperti koperasi konsumen, yang telah berlangsung sejak abad kesembilan belas, yang dimulai atas inisiatif umat katolik. Juga berguna mempromosikan cara-cara baru untuk memasarkan hasil-hasil dari daerah-daerah miskin di dunia ini untuk menjamin penghasilan yang layak bagi para produsen. Namun, syarat-syarat tertentu perlu dipenuhi: pasar harus sungguh-sungguh transparan, para produsen tidak hanya mendapatkan batas keuntungan yang tinggi, tetapi juga memperoleh pembinaan yang lebih baik dalam keterampilan-keterampilan profesionalisme dan teknologi, dan akhirnya pengalaman-pengalaman ekonomi untuk pengembangan seperti tersebut di atas tidak dikaitkan dengan ideologi-ideologi partisan. Peran yang lebih menentukan dari para konsumen, sejauh mereka tidak dimanipulasi oleh kelompok-kelompok yang tidak sungguh-sungguh mewakili mereka, merupakan faktor yang diharapkan oleh demokrasi ekonomi.

67. Dalam menghadapi pertumbuhan saling ketergantungan global yang tiada henti-hentinya, sangat terasa, juga di tengah resesi dunia, urgensi reformasi baik *Perserikatan Bangsa-Bangsa* maupun *lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional*, sehingga kita dapat memberikan kenyataan konkret pada konsep keluarga bangsa-bangsa. Juga dirasakan kemendesakan untuk mencari cara-cara inovatif melaksanakan prinsip *tanggung jawab untuk melindungi*¹⁴⁶ dan memberi hak suara bagi negara-negara miskin dalam pengambilan keputusan bersama. Hal ini tampaknya sungguh diperlukan mengingat tatanan politik, hukum dan ekonomi berkembang dan mengarah pada kerja sama internasional menuju perkembangan solidaritas bagi bangsa-bangsa. Untuk mengelola perekonomian dunia, untuk menghidupkan kembali perekonomian yang dihantam krisis, untuk mencegah

¹⁴⁶ Bdk. Benediktus XVI, *Sambutan kepada Para Anggota Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa*, New York, 18 April 2008.

memburuknya krisis dewasa ini dan ketidakseimbangan yang semakin parah; untuk mencapai perlucutan senjata yang menyeluruh dan memadai, ketahanan pangan dan perdamaian, untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup dan mengatur migrasi: untuk semua ini perlu adanya *kekuasaan politik dunia* yang sejati, seperti yang telah ditunjukkan oleh pendahulu saya, Beato Yohanes XXIII beberapa tahun yang lalu. Kekuasaan seperti itu harus diatur oleh hukum, mematuhi secara konsisten prinsip subsidiaritas dan solidaritas, berusaha mewujudkan kesejahteraan umum¹⁴⁷, dan *bertekad mewujudkan perkembangan manusia seutuhnya yang autentik dengan diilhami oleh nilai-nilai kasih dalam kebenaran*. Selanjutnya, kekuasaan tersebut harus diakui oleh semua, dan dilengkapi kekuatan nyata untuk menjamin keamanan bagi semua orang, memerhatikan keadilan, dan menghormati hukum¹⁴⁸. Jelaslah, bahwa kekuasaan itu harus memiliki kewenangan untuk menegakkan keputusannya dari semua pihak, dan juga langkah-langkah terkoordinasi yang diambil dari berbagai forum internasional. Tanpa hal ini, meskipun kemajuan-kemajuan besar dicapai dalam berbagai bidang, hukum internasional akan beresiko dipengaruhi oleh kekuatan yang seimbang antara bangsa-bangsa yang sangat kuat. Perkembangan integral bangsa-bangsa dan kerja sama internasional menuntut ditetapkannya taraf lebih tinggi dari pengaturan internasional, yang ditandai oleh subsidiaritas untuk pengelolaan globalisasi¹⁴⁹, dan bahwa akhirnya juga dituntut penerapan tatanan sosial yang sesuai dengan tatanan moral, dengan hubungan antara bidang moral dan sosial, serta dengan keterkaitan antara politik dan bidang-bidang ekonomi serta sipil seperti sudah diuraikan dalam Piagam PBB.

¹⁴⁷ Bdk. Yohanes XXIII, Ensiklik *Pacem in Terris*, *loc.cit.*, 293; Dewan Kepausan Perdamaian dan Keadilan, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, 441.

¹⁴⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral Gereja dalam Dunia Modern *Gaudium et Spes*, 82.

¹⁴⁹ Bdk. Yoh. Paulus II, Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, 43; *loc.cit.*, 574-575.

BAB ENAM

PERKEMBANGAN BANGSA-BANGSA DAN TEKNOLOGI

68. Tema perkembangan bangsa-bangsa berkaitan erat dengan tema perkembangan setiap pribadi manusia. Berdasarkan kodratnya, setiap pribadi manusia mengalami perkembangannya masing-masing. Perkembangan ini tidak terjadi menurut mekanisme alamiah, melainkan karena setiap orang tahu bahwa ia mempunyai kemampuan untuk memilih secara bebas dan bertanggung jawab. Perkembangan ini juga bukan hanya merupakan dorongan hati kita sendiri, karena kita semua memahami bahwa kita ada sebagai anugerah dan bukan akibat yang berasal dari diri sendiri. Pada dasarnya, kebebasan kita dibentuk oleh adanya kita dan keterbatasannya. Tidak ada seorang pun yang membentuk hati nuraninya menurut caranya sendiri, melainkan karena kita semua membangun “aku” kita berdasarkan pada “diri” yang dianugerahkan kepada kita. Bukan hanya orang lain berada di luar kendali kita, melainkan kita masing-masing berada di luar kendali diri kita sendiri. *Perkembangan seseorang akan merosot, jika ia beranggapan hanya dirinya yang bertanggung jawab atas mau menjadi apa dirinya.* Sama halnya, perkembangan umat manusia akan merosot jika kita berpikir bahwa kemanusiaan akan dapat diciptakan kembali dengan mengandalkan “keajaiban” teknologi. Demikian halnya, perkembangan ekonomi akan menjadi kabur dan berisiko jika bersandar pada “keajaiban” finansial dalam menyokong pertumbuhan yang tidak wajar dan konsumtif. Berhadapan dengan “praduga Promethean” ini, kita perlu memperteguh kasih akan kebebasan yang tidak seenaknya, tetapi yang dibuat sungguh manusiawi melalui pengakuan akan kebaikan yang mendasarinya. Untuk mencapai sasaran ini, manusia perlu masuk ke dalam dirinya sendiri untuk menemukan norma-norma dasar hukum moral kodrati yang telah dituliskan Allah di dalam hatinya.

69. Persoalan perkembangan di masa sekarang ini berkaitan erat dengan *kemajuan teknologi* dan penerapannya yang mengagumkan dalam bidang biologi. Teknologi –perlu digarisbawahi– merupakan kenyataan yang sangat manusiawi karena berkaitan dengan otonomi dan kebebasan manusia. Di dalam teknologi itu dinyatakan dan ditegaskan kuasa roh atas materi. Roh manusia “yang makin dibebaskan dari perbudakan materi, dapat lebih leluasa mengangkat diri untuk beribadat dan berkontemplasi kepada Sang Pencipta.”¹⁵⁰ Teknologi membuat orang mampu menguasai materi, mengurangi risiko, menghemat tenaga dan memperbaiki kondisi hidup kita. Teknologi menyentuh makna hakiki panggilan kerja manusia: dalam teknologi, yang tampak sebagai hasil kemampuannya, manusia mengenali dirinya sendiri dan mengungkapkan kemanusiaannya sendiri. Teknologi adalah aspek objektif dari tindakan manusia¹⁵¹, yang asal dan alasan adanya ditemukan dalam unsur subjektif yaitu: manusia yang bekerja. Maka dari itu, teknologi tidak pernah merupakan teknologi semata. Teknologi mengungkapkan manusia dan harapannya terhadap perkembangan, mengungkapkan ketegangan batin manusia yang mendorongnya secara bertahap mengatasi kondisi keterbatasan materi. Maka dari itu, teknologi, dalam arti ini, adalah tanggapan terhadap perintah Allah untuk “*mengolah dan memelihara tanah*” (*bdk. Kej. 2:15*), yang dipercayakan pada manusia dan bertujuan untuk memperkuat perjanjian antara manusia dengan lingkungan hidup yang harus mencerminkan kasih kreatif Allah.
70. Perkembangan teknologi dapat memunculkan gagasan bahwa *teknologi itu mencukupi dirinya sendiri*, apabila kita terlalu banyak memerhatikan pertanyaan *bagaimana*, tanpa mempertimbangkan banyak pertanyaan *mengapa* yang mendorong tindakan manusia. Maka dari itu, teknologi itu dapat berwajah ambigu. Lahir dari kreativitas manusia sebagai

¹⁵⁰ Paus Paulus VI, *Ensiklik Populorum Progressio*, 41: l.c. 277-278; *bdk.* Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, 57.

¹⁵¹ Paus Yohanes Paulus II, *Ensiklik Laborem Exercens*, 5; l.c., 586-589.

sarana kebebasan pribadi, teknologi juga dapat dipahami sebagai unsur kebebasan mutlak, kebebasan yang ingin mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam semua hal itu sendiri. Proses globalisasi dapat menggantikan ideologi-ideologi dengan teknologi¹⁵², yang menjadikan teknologi itu sendiri sebagai kekuasaan ideologis, yang dapat mengancam manusia terperangkap dalam *a priori* sehingga ia tidak mampu keluar untuk menemukan keberadaan dan kebenaran. Jika demikian halnya, setiap dari kita akan mengenal, menilai dan memutuskan situasi hidup kita dalam perspektif budaya teknokrasi, yang kita miliki secara struktural, tanpa pernah bisa menemukan makna yang bukan merupakan hasil kerja kita sendiri. Di masa sekarang, pandangan tentang hal-hal tersebut semakin menguatkan mentalitas teknis sehingga kebenaran bersesuaian dengan apa yang dapat dilakukan. Tetapi ketika efisiensi dan kegunaan menjadi satu-satunya kriteria kebenaran, maka secara otomatis perkembangan ditolak. Sesungguhnya, perkembangan sejati tidak terletak pertama-tama dalam “melakukan”. Kunci menuju perkembangan itu adalah kemampuan akal budi untuk memahami istilah-istilah teknologi dan untuk menangkap makna manusiawi sepenuhnya dari tindakan manusia, menurut perspektif makna pribadi dari keseluruhan adanya. Bahkan ketika kita bekerja melalui satelit atau getaran elektronik jarak jauh, perbuatan kita tetap manusiawi, ungkapan dari kebebasan kita yang bertanggung jawab. Teknologi sangat menarik karena mampu melepaskan manusia dari keterbatasan fisiknya dan memperluas cakrawalanya. *Namun kebebasan manusia menjadi autentik hanya bila ia menanggapi daya tarik teknologi dengan keputusan-keputusan yang berasal dari tanggung jawab moral.* Dari sinilah muncul kebutuhan mendesak akan pembinaan dalam penggunaan teknologi yang secara etis bertanggung jawab. Menyadari daya tarik teknologi atas keberadaan manusia, makna sejati kebebasan harus dipulihkan kembali, yang bukan merupakan kemabukan pada otonomi total,

¹⁵² Paus Paulus IV, Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, 29; l.c. 420.

melainkan merupakan jawaban atas panggilan adanya manusia, mulai dari adanya kita sendiri.

71. Kemungkinan terjadinya penyimpangan mentalitas teknologi yang berasal dari sebab manusiawi, dewasa ini nampak jelas dalam penerapan-penerapan teknologi di bidang perkembangan dan perdamaian. Perkembangan bangsa-bangsa sering dianggap sebagai persoalan teknis keuangan, pasar terbuka, pengurangan pajak, penanaman modal dalam produksi, reformasi lembaga – dengan kata lain persoalan yang semata-mata teknis. Semua bidang tersebut mempunyai peran yang sangat penting, tetapi kita perlu bertanya mengapa pilihan-pilihan teknis yang dibuat sejauh ini menimbulkan hasil yang bervariasi. Kita perlu memikirkan penyebabnya jauh lebih dalam. Perkembangan tidak akan pernah dijamin sepenuhnya oleh kekuatan yang otomatis dan impersonal, baik yang berasal dari pasar atau politik internasional. *Perkembangan tidak mungkin terjadi tanpa orang-orang yang baik, tanpa pelakupelaku ekonomi dan para politisi yang memiliki hati nurani jernih selaras dengan tuntutan kesejahteraan umum.* Diperlukan baik kemampuan profesional maupun konsistensi moral. Ketika terjadi pemutlakan teknologi, akan muncul kebingungan antara tujuan dan cara; perusahaan melihat kriteria satu-satunya pada usaha ialah untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari produksi; politisi pada konsolidasi kekuasaan; ilmuwan pada hasil penemuan ilmiah. Dengan demikian, dibawah jaringan hubungan ekonomi, perbankan dan politik, sering terjadi kesalahpahaman, kesulitan dan ketidakadilan; arus pengetahuan teknologi semakin meningkat, tetapi lebih menguntungkan para pemilik, sementara situasi nyata masyarakat yang hidup di bawah arus ini dan yang hampir tidak menyadarinya tetap tidak berubah, tanpa kesempatan nyata untuk emansipasi.
72. Bahkan perdamaian juga kadang-kadang berisiko dianggap sebagai produk teknologi, hanya sebagai hasil dari persetujuan antara pemerintah-pemerintah atau inisiatif-inisiatif yang

dimaksudkan untuk menjamin keefektifan bantuan ekonomi. Benarlah bahwa *membangun perdamaian* membutuhkan jalinan hubungan diplomatik terus-menerus, pertukaran ekonomi dan teknologi, perjumpaan budaya, persetujuan dalam proyek bersama, tetapi juga perlu ada strategi bersama untuk membendung ancaman konflik militer atau untuk membasmi terorisme sampai ke akar-akarnya. Namun, supaya usaha-usaha ini membuahkan dampak yang berlangsung lama, haruslah didasarkan pada nilai-nilai yang berakar dalam kebenaran hidup manusia. Ini berarti kita perlu mendengar suara dan melihat situasi dari bangsa-bangsa yang terkena dampak supaya dapat menafsirkan harapan mereka dengan benar. Maka, semua harus bersatu dalam upaya-upaya anonim dari banyak orang yang berkomitmen untuk meningkatkan pertemuan antara bangsa-bangsa dan memfasilitasi perkembangan berdasarkan kasih dan saling pengertian. Dari antara orang-orang tersebut dapat kita temukan umat beriman Kristiani, yang mengambil bagian dalam tugas besar untuk memberikan makna manusiawi secara penuh pada perkembangan dan perdamaian.

73. Perkembangan teknologi berhubungan erat dengan kehadiran *sarana komunikasi sosial* yang begitu dahsyat. Hampir mustahil membayangkan keberadaan keluarga manusia tanpa kehadiran media komunikasi. Dalam kondisi apa pun, media komunikasi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan dewasa ini sehingga tampaknya cukup mustahil untuk mempertahankan bahwa mereka netral, dan karenanya tidak terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan moral menyangkut orang. Seringkali, pandangan demikian yang menekankan sifat teknis media komunikasi ini secara ketat justru mendukung subordinasi terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi, yang bermaksud mendominasi pasar dan, tidak terlupakan pula, keinginan untuk menempatkan standar budaya yang berfungsi untuk tujuan ideologis dan politis. Mengingat pentingnya media komunikasi dalam menentukan perubahan cara memandang dan memahami kenyataan dan pribadi manusia sendiri, perlulah refleksi

cermat atas pengaruhnya, khususnya dalam kaitannya dengan dimensi etis-budaya dari globalisasi dan perkembangan bangsa-bangsa dalam solidaritas. Seperti halnya globalisasi dan perkembangan membutuhkan pengelolaan yang benar, *makna dan tujuan media komunikasi harus dicari dalam perspektif antropologisnya*. Hal ini berarti bahwa media komunikasi dapat memiliki *efek membudayakan* tidak hanya ketika, berkat perkembangan teknologi, memberikan peluang lebih besar dalam komunikasi dan informasi, tetapi terutama ketika ditata dan diarahkan berdasarkan visi pribadi manusia dan kesejahteraan umum yang mencerminkan nilai-nilai universal. Hanya karena media komunikasi sosial meningkatkan kemungkinan-kemungkinan untuk saling menghubungkan dan menyebarkan gagasan, tidak berarti bahwa hal itu dapat meningkatkan dan memperluas perkembangan dan demokrasi untuk semua. Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan media komunikasi yang berfokus pada kemajuan martabat pribadi dan bangsa-bangsa, yang secara nyata diilhami oleh kasih dan mengabdikan kepada kebenaran, kebaikan dan persaudaraan kodrati maupun adikodrati. Pada dasarnya, kebebasan manusia secara instrinsik terikat dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Media dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi perkembangan persekutuan persaudaraan manusia dan *etos* masyarakat, ketika dijadikan sarana untuk memajukan peran serta universal dalam pencarian bersama tentang apa itu keadilan.

74. Bidang yang sangat penting dan utama dalam konflik budaya saat ini antara supremasi teknologi dan tanggung jawab moral manusia adalah bidang *bioetika*, di mana kemungkinan perkembangan manusia seutuhnya secara radikal dipertaruhkan. Bioetika merupakan bidang yang sangat rumit dan kritis, di mana dipertimbangkan dengan seluruh daya pertanyaan mendasar: apakah manusia dihasilkan oleh dirinya sendiri atau tergantung dari Allah? Penemuan-penemuan ilmiah dalam bidang ini dan kemungkinan-kemungkinan intervensi teknologi telah berkembang begitu pesat sehingga memberikan pilihan di antara dua jenis pemikiran: pemikiran

yang terbuka pada transendensi atau pemikiran yang tertutup dalam imanensi. Kita berhadapan dengan *pilihan "atau... atau..."* yang menentukan. Tetapi rasionalitas tindakan teknologi yang egosentris justru menunjukkan hal itu tidak rasional, karena membawa serta penolakan tegas atas makna dan nilai. Maka, bukan suatu kebetulan bahwa ketertutupan terhadap hal yang transenden menghadapi kesulitan untuk memikirkan: bagaimana yang ada bisa muncul dari ketiadaan dan bagaimana akal budi itu muncul hanya dari suatu kebetulan¹⁵³. Dihadapkan pada masalah yang sedemikian dramatis ini, akal budi dan iman dapat saling membantu satu sama lain. Hanya dengan bersama-sama keduanya dapat menyelamatkan manusia. *Terpesona oleh ketergantungan pada teknologi belaka, akal budi tanpa iman akan jatuh dalam ilusi kemahakuasaannya sendiri. Iman tanpa akal budi berisiko terasing dari kehidupan nyata manusia.*¹⁵⁴

75. Paus Paulus VI telah mengakui dan menunjukkan dimensi global dari masalah sosial¹⁵⁵. Dengan mengikuti apa yang digarisikannya, pada masa kini perlu ditegaskan bahwa *masalah sosial secara radikal telah menjadi masalah antropologis*, dalam arti bahwa masalah sosial itu berdampak bukan hanya pada cara memahami tetapi juga dalam cara memanipulasi kehidupan, di mana bioteknologi semakin lama semakin menempatkannya di bawah kendali manusia. Bayi tabung, penelitian embrio, kemungkinan kloning dan hibridisasi manusia muncul dan semakin berkembang dalam budaya masa kini yang dipenuhi kekecewaan, yang berkeyakinan telah mengungkapkan segala misteri, karena sudah mencapai akar kehidupan. Di sinilah absolutisme teknologi menemukan ungkapannya yang tertinggi. Dalam budaya seperti ini, hati nurani dipanggil hanya untuk mencatat

¹⁵³ Bdk. Pidato Bapa Suci kepada para peserta Sidang Gereja Nasional Italia IV, Verona, 19 Oktober 2006: *l.c.*, 8-10; Homili selama Misa Kudus dalam penjelasan "Isling" Regensburg (12 September 2006): *l.c.* 9-10.

¹⁵⁴ Bdk. Kongregasi Ajaran Iman, Instr. *Dignitas Personae* tentang beberapa persoalan bioetika (8 September 2008): AAS 100 (2008), 858-887.

¹⁵⁵ Bdk. Ensiklik *Populorum Progressio*, 3: *l.c.* 258.

kemampuan teknis belaka. Tetapi, kita tidak boleh meremehkan skenario yang menggelisahkan masa depan manusia, termasuk sarana-sarana baru yang luar biasa, yang disediakan oleh “budaya kematian” untuk dipakai. Pada bencana aborsi yang tragis dan tersebar luas, masih dapat ditambahkan di masa depan –meskipun saat ini sudah ada secara diam-diam– perencanaan eugenika sistematis atas kelahiran. Di sisi lain, sekarang ini berkembang suatu pola pikir pro-euthanasia, sebagai suatu penegasan yang sama merugikannya dengan sikap untuk menguasai kehidupan yang dalam situasi tertentu dianggap tidak layak lagi dihayati. Di balik skenario ini terdapat pandangan budaya yang mengingkari martabat manusia. Pada saat yang sama, praktik-praktik ini menyuburkan pemahaman materialistis dan mekanistis hidup manusia. Siapakah yang dapat mengukur dampak negatif mentalitas semacam ini bagi perkembangan? Bagaimana terkejutnya kita dengan ketidakpedulian terhadap situasi kemerosotan martabat manusia, jika ketidakpedulian itu meluas bahkan sampai ke sikap kita terhadap apa yang manusiawi dan yang tidak manusiawi? Betapa mengejutkan pilihan sewenang-wenang dari apa yang sekarang ini dipandang layak dihormati. Sementara itu, orang mudah tersinggung oleh hal-hal yang tidak penting, namun banyak yang tampaknya bersikap toleran atas ketidakadilan yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Sementara orang-orang miskin di dunia terus mengetuk pintu orang kaya, dunia yang makmur semakin tidak mampu mendengarkan ketukan pintu itu, karena hati nuraninya tidak mampu lagi mengenal hal manusiawi. Allah mewahyukan manusia kepada dirinya; akal budi dan iman bekerja sama untuk menunjukkan kepada kita hal-hal yang baik, asalkan kita mau melihatnya; hukum kodrati, di mana Sang Akal Budi kreatif bersinar, menunjukkan kebesaran manusia, tetapi juga penderitaannya, apabila manusia menyangkal panggilan kepada kebenaran moral.

76. Salah satu aspek dari pola pikir teknologi modern adalah kecenderungan untuk mempertimbangkan masalah dan gerak hidup batiniah dari sudut pandang psikologis murni atau

bahkan dari sudut pandang reduksionisme neurologis. Dengan demikian, dunia batin manusia dikosongkan dari maknanya dan kesadaran akan kedalaman ontologis jiwa manusia, sebagaimana yang telah diselidiki oleh para kudus, berangsur-angsur hilang. *Masalah perkembangan berhubungan erat dengan pemahaman kita tentang jiwa manusia*, karena “aku” kita seringkali direduksi menjadi *psyche*, dan kesehatan jiwa dicampurkan dengan kesejahteraan emosional. Reduksi ini berasal dari kesalahpahaman mendalam tentang hidup rohani dan cenderung mengabaikan bahwa perkembangan manusia dan bangsa-bangsa tergantung juga pada penyelesaian masalah yang bersifat rohani. *Perkembangan harus mencakup tidak hanya kemajuan materi, tetapi juga pertumbuhan rohani*, karena pribadi manusia adalah “satu tubuh dan jiwa”¹⁵⁶, yang lahir dari cinta Allah Pencipta dan dimaksudkan untuk hidup abadi. Manusia berkembang ketika ia bertumbuh dalam roh, ketika jiwanya mengenal dirinya sendiri dan kebenaran yang benihnya telah ditanamkan oleh Allah di dalamnya, ketika ia berdialog dengan dirinya sendiri dan Penciptanya. Manakala jauh dari Allah, manusia gelisah dan rapuh. Keterasingan sosial dan psikologis, dan aneka neurosis yang banyak menimpa masyarakat makmur, juga disebabkan oleh faktor rohani. Masyarakat sejahtera, yang sangat berkembang secara material tetapi jiwanya sangat tertekan, dari dirinya sendiri tidak mendukung perkembangan sejati. Bentuk-bentuk baru perbudakan, seperti obat-obatan terlarang, dan keputusan yang dialami oleh banyak orang, dapat dijelaskan bukan hanya secara sosiologis atau psikologis, tetapi juga secara mendasar dijelaskan secara rohani. Kekosongan, di mana jiwa merasa ditinggalkan, meskipun tersedia begitu banyak terapi untuk tubuh dan jiwa, menyebabkan penderitaan. *Perkembangan holistik dan kesejahteraan umum universal tidak dapat terjadi jika tidak memperhitungkan kesejahteraan rohani dan moral manusia*,

¹⁵⁶ Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern, *Gaudium et Spes*, 14

dengan mempertimbangkan totalitasnya sebagai badan dan jiwa.

77. Absolutisme teknologi cenderung menimbulkan ketidakmampuan orang untuk memahami segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara murni material. Namun demikian, semua manusia mempunyai pengalaman dalam begitu banyak aspek imaterial dan rohani dalam hidupnya. Mengetahui bukan hanya tindakan material, karena hal yang diketahui menyembunyikan sesuatu, yang melampaui unsur-unsur empiris. Semua pengetahuan bahkan yang paling sederhana, selalu merupakan keajaiban kecil, karena hal itu tidak pernah dapat dijelaskan sepenuhnya dengan unsur-unsur materi yang kita terapkan padanya. Dalam semua kebenaran selalu ada sesuatu yang lebih dari yang kita perkirakan, dalam kasih yang kita terima, selalu ada sesuatu yang mengejutkan kita. Kita seharusnya tidak pernah berhenti mengagumi keajaiban-keajaiban ini. Dalam semua pengetahuan dan tindakan kasih, jiwa manusia mengalami "sesuatu yang lebih" yang tampaknya sangat mirip dengan anugerah yang kita terima, atau puncak ketika kita ditinggikan. Begitu juga, perkembangan manusia dan bangsa-bangsa mencapai taraf yang tinggi, jika kita beranggapan *dimensi rohani* harus ada di dalamnya supaya perkembangan itu menjadi autentik. Hal itu menuntut mata baru dan hati baru, yang mampu mengatasi visi materialistis peristiwa-peristiwa manusia dan yang mampu melihat sekilas dalam perkembangan itu "sesuatu yang lebih" yang tidak mampu diberikan oleh teknologi. Dengan jalan ini, akan dapat dimungkinkan mencapai perkembangan manusiawi seutuhnya, yang orientasinya bersumber pada daya penggerak kasih dalam kebenaran.

KESIMPULAN

78. Tanpa Allah manusia tidak tahu kemana ia harus pergi dan tidak mampu memahami siapakah dirinya. Berhadapan dengan masalah-masalah besar yang melingkupi perkembangan bangsa-bangsa, yang hampir membuat kita menyerah dalam keputusan, sabda Tuhan kita Yesus Kristus hadir mengajarkan kita: "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa" (Yoh 15:5), dan memberanikan kita: "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." (Mat 28:20). Menghadapi sejumlah besar pekerjaan yang harus dilakukan, kita ditopang oleh iman kita bahwa Allah hadir bersama dengan mereka yang bersatu dalam nama-Nya dan yang bekerja demi keadilan. Paus Paulus VI telah mengingatkan kita dalam *Populorum Progressio* bahwa manusia tidak mampu menghasilkan kemajuannya sendiri tanpa bantuan, karena sendirian saja manusia tidak mampu membangun humanisme sejati. Hanya jika kita menyadari bahwa kita dipanggil, sebagai pribadi dan sebagai komunitas, untuk menjadi bagian dalam keluarga Allah sebagai anak-anak-Nya, kita akan mampu menghasilkan pemikiran baru dan menemukan kekuatan baru untuk mengabdikan humanisme sejati seutuhnya. Oleh karena itu, kekuatan terbesar dalam pelayanan perkembangan adalah humanisme Kristiani¹⁵⁷, karena membangkitkan cinta kasih dan dipimpin oleh kebenaran, untuk menerima keduanya sebagai anugerah tetap dari Allah. Keterbukaan kepada Allah membuat kita terbuka kepada sesama dan kepada hidup yang dipahami sebagai tugas solidaritas yang menggembirakan. Sebaliknya, penolakan ideologis akan Allah dan ateisme ketidakpedulian, yang melupakan Pencipta dan juga melupakan nilai-nilai manusiawi, merupakan kendala utama untuk perkembangan sekarang ini. *Humanisme yang meniadakan Allah adalah humanisme yang tidak manusiawi*. Hanya humanisme yang terbuka pada Yang Absolut dapat memimpin kita dalam memajukan dan mewujudkan bentuk-bentuk kehidupan sipil dan sosial –dalam

¹⁵⁷ Bdk. Ensiklik *Populorum Progressio* 42: l.c., 278.

struktur, institusi, budaya, dan *etos*-, tanpa membuat kita berisiko terjatuh pada mode zaman itu. Kesadaran akan Kasih Allah yang abadi menopang kita dalam pekerjaan yang melelahkan sekaligus menggairahkan untuk keadilan dan perkembangan bangsa-bangsa, di antara keberhasilan dan kegagalan, dan dalam usaha tanpa henti untuk mengatur urusan manusiawi yang adil. *Kasih Allah mengundang kita untuk bergerak melampaui yang terbatas dan sementara, memberi kita keberanian untuk terus bekerja mencari kebaikan bagi semua*, meskipun ketika hal itu tidak segera tercapai, dan meskipun apa yang dapat dicapai, baik oleh kita, pemangku politik maupun pelaku ekonomi, selalu kurang dari apa yang kita harapkan¹⁵⁸. Allah memberi kita kekuatan untuk berjuang dan menderita demi kasih untuk kebaikan bersama, karena Dia adalah segalanya bagi kita, harapan kita yang paling besar.

79. *Perkembangan membutuhkan orang-orang Kristiani yang mengangkat tangannya pada Allah* dalam doa, orang-orang Kristiani yang digerakkan oleh pengetahuan bahwa kasih dipenuhi kebenaran, *caritas in veritate*, yang melahirkan perkembangan autentik, bukan merupakan hasil usaha kita, melainkan anugerah yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, bahkan juga pada saat-saat paling sulit dan rumit, selain memahami apa yang sedang terjadi, terutama kita harus kembali kepada kasih-Nya. Perkembangan memerlukan perhatian akan hidup rohani, pertimbangan serius atas pengalaman iman akan Allah, persekutuan rohani dalam Kristus, kepercayaan akan penyelenggaraan dan belas kasihan ilahi, kasih dan pengampunan, penyangkalan diri, penerimaan orang lain, keadilan dan perdamaian. Semuanya itu mutlak diperlukan untuk mengubah “hati yang keras” menjadi “hati yang lembut” (Yeh. 36:26), dan menjadikan hidup di bumi lebih “ilahi” sehingga menjadi lebih layak bagi umat manusia. Semua itu *milik manusia*, karena manusia adalah subjek dari keberadaannya sendiri; dan sekaligus *milik Allah*, karena Allah adalah awal dan akhir dari semua yang baik dan yang menebus

¹⁵⁸ Bdk. Ensiklik. *Spe Salvi*, 35: l.c., 1013-1014.

kita “Seluruh masa kini dan seluruh masa depan telah diberikan-Nya kepada Saudara. Semua itu milik Saudara. Saudara adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah” (1Kor. 3:22-23). Umat Kristiani merindukan seluruh keluarga manusia dapat menyebut Allah sebagai “Bapa kami”. Bersama dengan Putra-Nya yang tunggal, semoga semua orang belajar berdoa kepada Bapa dan memohon kepada-Nya, dengan kata-kata yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita, untuk memuliakan-Nya dengan hidup seturut kehendak-Nya, untuk menerima rejeki sehari-hari yang kita butuhkan, untuk mengasihi dan bermurah hati kepada yang bersalah kepada kita, untuk tidak dicobai melampaui batas-batas kita, dan untuk dibebaskan dari yang jahat (bdk. Mat 6:9-13).

Untuk menutup *tahun Paulus*, saya ingin mengungkapkan pengharapan ini dengan kata-kata Paulus sendiri yang terdapat dalam suratnya kepada jemaat di Roma: “Hendaklah kasihmu itu jangan pura-pura! Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaknya kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat” (Rom. 12:9-10). Semoga Bunda Maria, yang disebut *Mater Ecclesiae (Bunda Gereja)* oleh Paus Paulus VI dan dihormati oleh umat Kristiani sebagai *Speculum iustitiae (Cermin Keadilan)* dan *Regina Pacis (Ratu Damai)*, melindungi kita dan melalui perantaraannya mendoakan kita supaya diberi kekuatan, harapan dan kegembiraan yang perlu untuk meneruskan tugas ini dengan rendah hati demi “perkembangan semua manusia dan seluruh umat manusia”¹⁵⁹.

Diberikan di Roma, di Basilika Santo Petrus, pada 29 Juni, pada hari raya Santo Petrus dan Paulus Rasul, tahun 2009, pada tahun kelima masa kepausan saya.

PAUS BENEDIKTUS XVI

¹⁵⁹ Paus Paulus VI, Ensiklik *Populorum Progressio*, 42: l.c. 278.

SERI DOKUMEN GEREJAWI

Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (DOKPEN – KWI) berusaha menerbitkan terjemahan seri "Dokumen Gerejawi" (Dokumen Kepausan) yang penting dalam bahasa Indonesia, dengan maksud memberikan bahan bacaan dan studi yang terpercaya bagi mereka yang kurang mendapat kesempatan untuk menikmati naskah aslinya.

Agar Anda tetap memperoleh semua terbitan seri dokumen ini, kami sarankan untuk mencatatkan nama dan alamat Anda kepada kami: Dep. Dokpen KWI, Jalan Cut Meutia No. 10, Jakarta Pusat. Telp.: (021) 3901003. E-mail: dokpen@kawali.org (Penerbitan) dokpen1@kawali.org (Ekspedisi). Dengan demikian Anda selalu mendapatkan kiriman seri dokumen ini.

Harga setiap dokumen tentu saja berbeda-beda, tergantung pada panjang pendeknya dokumen yang diterbitkan, jumlah halaman dan tahun saat diterbitkannya.

Semoga terbitan Dokpen KWI ini dapat membantu Umat Katolik Indonesia lebih mendalami serta mencintai Kristus dan Gereja-Nya.

Damai Kristus,

Departemen Dokumentasi & Penerangan KWI

DAFTAR TERBITAN DOKUMEN GEREJAWI

1. **REDEMPTORIS MATER.** IBUNDA SANG PENEBUS
2. **INSTRUKSI MENGENAI KEBEBASAN DAN PEMBEBASAN KRISTIANI**
3. **SOLLICITUDO REI SOCIALIS,** KEPRIHATINAN AKAN MASALAH SOSIAL
3. (A) LAMPIRAN SERI DOGER NO.3
4. **MEMBANGUN PERDAMAIAN:** MENGHORMATI KELOMPOK MINORITAS
5. **CHRISTIFIDELES LAICI.** PARA ANGGOTA AWAM UMAT BERIMAN
6. **EVANGELII NUNTIANDI.** MEWARTAKAN INJIL
7. **LUMEN GENTIUM.** TERANG BANGSA-BANGSA. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATICAN II TENTANG GEREJA
8. **DEI VERBUM.** KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATICAN II – TENTANG WAHYU ILAHI
9. **SACROSANCTUM CONSILIUM.** KONSILI SUCI. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATICAN II – TENTANG LITURGI KUDUS
10. **NOSTRA AETATE.** PADA ZAMAN KITA ; **DIGNITATIS HUMANAЕ.** MARTABAT PRIBADI MANUSIA. PERNYATAAN KONSILI VATICAN II – TENTANG HUBUNGAN GEREJA DENGAN AGAMA-AGAMA BUKAN KRISTIANI & KEBEBASAN BERAGAMA
11. **PERFECTAE CARITATIS.** CINTA KASIH SEMPURNA. DEKRET KONSILI VATICAN II – TENTANG PEMBAHARUAN HIDUP RELIGIUS
12. **APOSTOLICAM ACTUOSITATEM.** KEGIATAN MERASUL. DEKRET KONSILI VATICAN II – TENTANG KERASULAN AWAM
13. **AD GENTES.** KEPADA SEMUA BANGSA. DEKRET KONSILI VATICAN II – TENTANG KEGIATAN MISIOBER GEREJA
14. **REDEMPTORIS MISSIO.** TUGAS PERUTUSAN SANG PENEBUS.

- ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG TUGAS PERUTUSAN GEREJA
15. **CENTESIMUS ANNUS.** ULANG TAHUN KE SERATUS. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KARYA SOSIAL GEREJA DALAM RANGKA 100 TAHUN RERUM NOVARUM
 16. **PEDOMAN TENTANG PEMBINAAN DALAM LEMBAGA RELIGIUS**
 17. **CHRISTUS DOMINUS.** KRISTUS TUHAN. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG TUGAS KEGEMBALAAN PARA USKUP
 18. **DOMINUM ET VIVIFICANTEM.** TUHAN PEMBERI HIDUP. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG ROH KUDUS
 19. **GAUDIUM ET SPES.** KEGEMBIRAAN DAN HARAPAN. KONSTITUSI PASTORAL KONSILI VATIKAN II – TENTANG GEREJA DI DUNIA DEWASA INI
 20. **PRESBYTERORUM ORDINIS.** TINGKAT PARA IMAM. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PELAYANAN DAN KEHIDUPAN PARA IMAM
 21. **UNITATIS REDINTEGRATIO.** PEMULIHAN KESATUAN. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG EKUMENISME
 22. **OPTATAM TOTIUS.** DEKRET TENTANG PEMBINAAN IMAM. **ORIENTALIUM ECCLESiarUM.** DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PEMBINAAN IMAM DAN GEREJA-GEREJA TIMUR
 23. **INTER MIRIFICA.** DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG UPAYA-UPAYA KOMUNIKASI SOSIAL. **GRAVISSIMUM EDUCATIONS.** PERNYATAAN TENTANG PENDIDIKAN KRISTEN
 24. **INDEX ANALITIS.** DOKUMEN-DOKUMEN KONSILI VATIKAN II
 25. **PASTORES DABO VOBIS.** GEMBALA-GEMBALA AKAN KUANGKAT BAGIMU. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG PEMBINAAN IMAM ZAMAN SEKARANG
 26. **AETATIS NOVAE.** TERBITNYA SUATU ERA BARU. INSTRUKSI PASTORAL – TENTANG RENCANA PASTORAL DI BIDANG KOMSOS
 27. **KONSTITUSI APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG UNIVERSITAS KATOLIK**

28. **CATECHESI TREDENDAE.** PENYELENGGARAAN KATEKESE. ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KATEKESE MASA KINI
29. **SALVIFICI DOLORIS.** PENDERITAAN YANG MEMBAWA KESELAMATAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MAKNA PENDERITAAN MANUSIA
30. **FAMILIARIS CONSORTIO.** ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG PERANAN KELUARGA KRISTEN DALAM DUNIA MODERN
31. **PEDOMAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA EKUMENE**
32. **MULIERIS DIGNITATEM.** MARTABAT WANITA. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MARTABAT DAN PANGGILAN WANITA PADA KESEMPATAN TAHUN MARIA
33. **KEDAMAIAN DAN KELUARGA.** BEBERAPA AMANAT SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KEDAMAIAN, PERDAMAIAN, DAN KELUARGA. A.L. DI DEPAN KORPS DIPLOMATIK
34. **SURAT KEPADA KELUARGA-KELUARGA DARI PAUS YOHANES PAULUS II**
35. **VERITATIS SPLENDOR.** CAHAYA KEBENARAN. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MARTABAT DAN PANGGILAN WANITA PADA KESEMPATAN TAHUN MARIA
36. **MATER ET MAGISTRA.** IBU DAN GEREJA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES XXIII
37. **POPULORUM PROGRESSIO.** PERKEMBANGAN BANGSA-BANGSA. ENSIKLIK SRI PAUS PAULUS VI
38. **REDEMPTORIS HOMINIS.** PENEBUS UMAT MANUSIA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II
39. **LABOREM EXERCENS.** DENGAN BEKERJA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II 90 TAHUN RERUM NOVARUM
40. **DE LITURGIA ROMANA ET INCULTURATIONE.** LITURGI ROMAWI DAN INKULTURASI. INSTRUKSI IV – TENTANG PELAKSANAAN KONSTITUSI LITURGI VATICAN II NO. 37 SECARA BENAR

41. **EVANGELIUM VITAE.** INJIL KEHIDUPAN. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II – TENTANG NILAI HIDUP MANUSIAWI YANG TAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
42. **RERUM NOVARUM.** ENSIKLIK SRI PAUS LEO XIII – TENTANG AJARAN SOSIAL GEREJA
43. **QUADRAGESIMO ANNO.** 40 TAHUN ENSIKLIK RERUM NOVARUM
44. **PACEM IN TERRIS.** DAMAI DI BUMI. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES XXIII
45. **OCTOGESIMA ADVENIENS.** ENSIKLIK SRI PAUS DALAM RANGKA 80 TAHUN RERUM NOVARUM
46. **UT UNUM SINT.** SEMOGA MEREKA BERSATU. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II – TENTANG KOMITMEN TERHADAP EKUMENISME.
47. **PEDOMAN-PEDOMAN TENTANG PARA PEMBINA SEMINARI**
48. **DIREKTORIUM TENTANG PELAYANAN DAN HIDUP PARA IMAM**
49. **PERKEMBANGAN MODERN KEGIATAN FINANSIAL DALAM TERANG TUNTUTAN-TUNTUTAN ETIKA KRISTIANI**
50. **ORIENTALE LUMEN.** TERANG DARI TIMUR. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG GEREJA-GEREJA TIMUR; MENANDAI ULANG TAHUN KE SERATUS SURAT ORIENTALIUM DIGNITATEM
51. **VITA CONSECRATA.** HIDUP BAKTI. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG BAGI PARA RELIGIUS
52. **PIAGAM BAGI PELAYAN KESEHATAN.** PIAGAM PANITYA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL KESEHATAN – TENTANG MASALAH-MASALAH BIO-ETIKA, ETIKA KESEHATAN DAN PENDAMPINGAN ORANG SAKIT – 1995

Tergabung dalam terbitan Ajaran Sosial Gereja (ASG)

53. **(A) PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA KOMUNIKASI. SEBUAH JAWABAN PASTORAL. (B) ETIKA DALAM IKLAN**
54. **DIES DOMINI. HARI TUHAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MENGUDUSKAN HARI TUHAN**
55. **(A) ZIARAH DALAM YUBILEUM AGUNG. PANITIA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN DAN PERANTAU. (B) NORMA-NORMA BARU REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS PAULUS INSTRUKSI TENTANG REKSA PASTORAL BAGI ORANG-ORANG YANG BERMIGRASI**
56. **FIDES ET RATIO. IMAN DAN AKAL BUDI. ENSIKLIK BAPA SUCI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA PARA USKUP – TENTANG HUBUNGAN ANTARA IMAN DAN AKAL BUDI, PADA HARI RAYA KEJAYAAN SALIB**
57. **GEREJA DI ASIA. ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II PASCA SINODAL, NEW DELHI**
58. **(A) SURAT KEPADA PARA ARTIS (SENIMAN-SENIWATI). (B) ETIKA DALAM KOMUNIKASI**
59. **SURAT SRI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA UMAT LANJUT USIA**
60. **(A) SISTER CHURCHES. GEREJA-GEREJA SESAUDARI. DOKUMENTASI: CATATAN DOKTRINER KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN. (B) DEKLARASI DOMINUS IESUS. PERNYATAAN TENTANG YESUS TUHAN. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG UNITAS DAN UNIVERSALITAS PENYELAMATAN YESUS KRISTUS DAN GEREJA**
61. **INSTRUKSI MENGENAI DOA PENYEMBUHAN. INSTRUCTION ON PRAYER FOR HEALING. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG DOA UNTUK PEMULIHAN KESEHATAN**
62. **NOVO MILLENIO INEUNTE. PADA AWAL MILENIUM BARU. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG SERUAN DAN AJAKAN UNTUK MENGENANGKAN MASA LAMPAU DENGAN PENUH SYUKUR, MENGHAYATI MASA SEKARANG DENGAN PENUH ANTUSIASME DAN MENATAP MASA DEPAN PENUH KEPERCAYAAN**

63. **ROSARIUM VIRGINIS MARIAE.** ROSARIO PERAWAN MARIA. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II, IMAM AGUNG, KEPADA PARA USKUP, KLERUS DAN KAUM BERIMAN – TENTANG ROSARIO PERAWAN MARIA
64. **IMAM, GEMBALA DAN PEMIMPIN PAROKI.** INSTRUKSI KONGREGASI KLERUS
65. **ORANG KATOLIK DALAM POLITIK.** KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG CATATAN AJARAN PADA BEBERAPA PERTANYAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERAN SERTA UMAT KATOLIK DI DALAM KEHIDUPAN POLITIK
66. **YESUS KRISTUS PEMBAWA AIR HIDUP.** LEMBAGA KEPAUSAN UNTUK BUDAYA DAN DIALOG ANTARAGAMA, SUATU REFLEKSI IMAN
67. **ECCLESIA DE EUCHARISTIA.** EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA. SURAT ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA
68. **BERTOLAK SEGAR DALAM KRISTUS: KOMITMEN HIDUP BAKTI YANG DIBAHARUI DI MILLENIUM KETIGA.** INTRUKSI KONGREGASI UNTUK HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP APOSTOLIK.
69. **HOMOSEKSUALITAS.** (A) ARTIKEL 8, PASTORAL DAN HOMOSEKSUALITAS. (B) SURAT KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK TENTANG REKSA PASTORAL ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL. (C) KATEKISMUS GEREJA KATOLIK ART. 2357-2359. (D) PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SEHUBUNGAN DENGAN USUL MEMBERIKAN PENGAKUAN LEGAL KEPADA HIDUP BERSAMA ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL.
70. **KERJA SAMA PRIA DAN PEREMPUAN DALAM GEREJA DAN DUNIA.** SURAT KONGREGASI AJARAN IMAN KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK
71. **PERAYAAN PASKAH DAN PERSIAPANNYA.** LITTERAE CIRCULARES DE FESTIS PASCHALIBUS PRAEPARANDIS ET CELEBRANDIS
72. **KELUARGA DAN HAK-HAK ASASI**
73. **ABORSI.** 1 PERNYATAAN TENTANG ABORSI; 2. KHK, KAN. 1398; 3. EVANGELIUM VITAE 58-63; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK,

- 2270-2272, 2274; 5. REFLEKSI KARDINAL ALFONZO LOPEZ TRUJILLO "ABORSI KELAHIRAN PARSIAL" ; 6. LAMPIRAN: PERNYATAAN SIKAP MAJELIS-MAJELIS KEAGAMAAN TENTANG ABORSI
74. **EUTANASIA.** 1. PERNYATAAN TENTANG EUTANASIA "IURA ET BONA" ; 2. EVANGELIUM VITAE 64-67; 3. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK, 2276-2279; 4. HORMAT TERHADAP HIDUP ORANG DALAM PROSES KEMATIAN; 5. PERNYATAAN BERSAMA TENTANG STATUS VEGETATIF; 6. PERNYATAAN OLEH MSGR. ELIO SGRECCIA: LEGALISASI EUTANASIA BAGI ANAK-ANAK DI NEDERLAND
75. **HORMAT TERHADAP HIDUP MANUSIA TAHAP DINI**
76. **LARANGAN KOMUNI.** 1. FAMILIARIS CONSORTIO ART. 84 ; 2. KHK, KAN. 915, 916, 987, 1007; 3. ANNUS INTERNATIONALIS ; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK 1650-1651
77. **DE FACTO UNIONS.** HIDUP PASANGAN TANPA NIKAH
78. **HIV-AIDS**
79. **NAPZA**
80. **MARIALIS CULTUS.** MENGHORMATI MARIA
81. **KLONING**
82. **SEL INDUK**
83. **DEUS CARITAS EST.** ALLAH ADALAH KASIH
84. **KERJA SAMA KAUM BERIMAN TANPA TAHBISAN DALAM PELAYANAN PARA IMAM**
85. **HUBUNGAN ANTARAGAMA DAN KEPERCAYAAN**
86. **PLURALISME**
87. **HUKUMAN MATI**
88. **SPE SALVI.** DALAM PENGHARAPAN KITA DISELAMATKAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI
89. **CARITAS IN VERITATE.** KASIH DAN KEBENARAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI
90. **PERDAGANGAN MANUSIA, WISATA SEKS, DAN KERJA PAKSA**

91. **PORTA FIDEL.** PINTU KEPADA IMAN. SURAT APOSTOLIK DALAM BENTUK MOTU PROPRIO UNTUK MENCANANGKAN TAHUN IMAN, PAUS BENEDIKTUS XVI
92. **LINGKUNGAN HIDUP**
93. **LUMEN FIDEL.** TERANG IMAN. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS
94. **EVANGELII GAUDIUM.** SUKACITA INJIL. SERUAN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS
95. **TAHUN HIDUP BAKTI.** SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PERINGATAN TAHUN HIDUP BAKTI 2015
96. **PANGGILAN DAN PERUTUSAN KELUARGA DALAM GEREJA DAN DUNIA ZAMAN SEKARANG.** LINEAMENTA SIDANG UMUM BIASA XIV, SIDANG PARA USKUP
97. **MENDIDIK DI MASA KINI DAN MASA DEPAN: SEMANGAT YANG DIPERBARUI.** INSTRUMENTUM LABORIS. KONGREGASI UNTUK PENDIDIKAN KATOLIK
98. **LAUDATO SI'.** TERPUJILAH ENGKAU. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS
99. **DIVES IN MISERICORDIA.** ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II. **MISERICORDIAE VULTUS.** BULLA PAUS FRANSISKUS
100. **AMORIS LAETITIA.** SUKACITA KASIH. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS
101. **MENYAMBUT KRISTUS DALAM DIRI PENGUNSI DAN MEREKA YANG TERPAKSA MENGUNSI**
102. **MISERICORDIA ET MISERA.** BELAS KASIH DAN PENDERITAAN. SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PENUTUPAN YUBILEUM LUAR BIASA KERAHIMAN
103. **PANGGILAN DAN MISI KELUARGA DALAM GEREJA DAN DALAM DUNIA DEWASA INI.** RELATIO FINALIS. SINODE PARA USKUP SIDANG UMUM BIASA KE XIV
104. **ANGGUR BARU DALAM KANTONG KULIT BARU.** KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP KERASULAN
105. **IDENTITAS DAN MISI BRUDER RELIGIUS DALAM GEREJA.** KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT

HIDUP KERASULAN

106. **GAUDETE ET EXULTATE.** BERSUKACITALAH DAN BERGEMBIRALAH. SERUN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS – TENTANG PANGGILAN KEKUDUSAN DI DUNIA DEWASA INI
107. **ORANG MUDA, IMAN, DAN PENEGASAN ROHANI.** DOKUMEN AKHIR SIDANG UMUM BIASA KE XV SINODE PARA USKUP
108. **MAXIMUM ILLUD.** SURAT APOSTOLIK PAUS BENEDIKTUS XV TENTANG PENYEBARAN IMAN KATOLIK DI SELURUH DUNIA
109. **CHRISTUS VIVIT.** KRISTUS HIDUP. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS
110. **VOS ESTIS LUX MUNDI.** MOTU PROPRIO PAUS FRANSISKUS TENTANG PELAPORAN PENYALAHGUNAAN SEKSUAL OLEH KLERIKUS

FORMULIR PEMESANAN

Dengan ini, kami ... *(beri tanda ✓ pada tabel di bawah ini)*

<input type="checkbox"/>	Mencatatkan diri sebagai Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Memesan Dokumen

Terbitan DOKPEN KWI, Jakarta

(terlampir nama/judul dokumen dan jumlah pesanan)

Nama : _____

Alamat (lengkap/jelas) : _____

_____ Kota: _____ Kode Pos: _____

Pembayaran:

1. Rekening di KWI *) _____
2. Via Bank

(Mohon kirimkan tanda bukti pembayaran Anda, sebagai sarana cek administrasi)

Isi dan kirimkan kepada:

Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI

Jalan Cikini 2 No. 10, Jakarta 10330

Telp.: (021) 3901003

Email: dokpen@kawali.org

dokpen1@kawali.org

Nama dan Tanda Tangan Pemesan
